



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP Tahun 2021**

RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
Jl. Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSSI Pangkalan Bun Tahun 2021. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja RSSI Pangkalan Bun dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalan Bun, 14 Januari 2022

Direktur Rumah Sakit  
Umum Daerah  
Sultan Imanuddin  
Pangkalan Bun,



**dr. FACHRUDDIN**

NIP.19711121 200212 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga beeran sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara periodik yaitu dengan menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulanan untuk mengetahui kendala permasalahan pencapaian target kinerja. Adapun hasil capaian kinerja RSSI Pangkalan Bun tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	80%	92,99%	116,24 (Sangat Berhasil)
		BOR	60%	63,71%	105,28% (Sangat Berhasil)
		LOS	6hari	4,79 hari	78,83% ( Berhasil)
		TOI	3 hari	2,73 hari	91% (Berhasil)
		BTO	50 kali	48,55 kali	97,1% (Sangat Berhasil)
		NDR	25/1000	23,78/1000	104,88% (Sangat Berhasil)
		GDR	45/1000	38,91/1000	113,53% (Sangat Berhasil)
2.	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%	99,64 %	116,06 (Sangat Berhasil)
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan	80%	86,18%	107,72 (Sangat Berhasil)
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian

	Strategis dan efektif.	Minimal (SPM) yang mencapai target			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	>76,61%	82,03%	107,07 (Berhasil)

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2021 Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah menetapkan program sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk 3 (tiga) program tersebut adalah sebesar Rp. 298.577.274.013 dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 289.540.492.355,48 (96,97).

Dalam pencapaian kinerja tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan maka perlu peningkatan komitmen dan tanggung jawab semua pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Rumah Sakit Sultan Imanudin tahun berikutnya serta menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan Rumah Sakit Sultan Imanudin.

## DAFTAR ISI

Halaman Cover	
KATA PENGANTAR .....	
i IKHTISAR EKSEKUTIF .....	
ii DAFTAR ISI .....	
iv	DAFTAR
	TABEL
vi	DAFTAR
GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	
1	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Data Umum Perangkat Daerah .....	3
1.3 Aspek Strategis Perangkat Daerah .....	14
1.4 Permasalahan Utama Perangkat Daerah .....	17

1.5 Sistematika Penyajian .....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	20
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	20
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	24
2.3 Program dan Kegiatan – Sub Kegiatan .....	25
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	27
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat .....	31
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan .....	35
2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	37
2.5 Perjanjian Kinerja .....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	44
1.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	44
Berhasil .....	44
3.1.1 Perbandingan antara realisasi dan terget kinerja indikator kinerja utama .....	46
Sasaran I .....	46
┌ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Sasaran I .....	47
a. Persentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi .....	47
b. BOR .....	47
c. LOS .....	48
d. TOI .....	48
e. BTO .....	48
f. NDR .....	49
g. GDR .....	49
┌ Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....	50
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat .....	50
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan .....	65
┌ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	72
Sasaran II .....	75
┌ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Sasaran II .....	75
a. Cost Recovery Rate (CRR) .....	75
b. Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal	

(SPM).....	
78 c. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	
87	
Γ Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....	90
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	90
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu .....	99
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra) .....	101
1.2 Realisasi Anggaran .....	103
1.3 Efisiensi Realisasi Anggaran RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 .....	111
BAB IV PENUTUP .....	
114	
5.1 Kesimpulan .....	114
5.2 Solusi Atas Permasalahan .....	114
Lampiran .....	
115	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	116
2. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Tentang Indikator Kinerja Utama .....	117
3. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung .....	123
a. Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi.....	123
b. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik .....	124
4. Laporan Realisasi Anggaran .....	127
5. Apresiasi yang Pernah Diterima .....	137
6. SOP penyusunan LKjIP .....	138
7. Realisasi Indikator Kinerja Individu Pejabat RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 .....	140

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Ketenagaan Pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 .....	8
Tabel 2. Sarana Prasarana RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun .....	11

Tabel 3. Keselarasan Visi Rumah Sakit dengan Visi Pemerintah Daerah .....	20
Tabel 4. Keselarasan Misi Rumah Sakit dengan Misi Pemerintah Daerah .....	20
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	22
Tabel 6. IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun .....	24
Tabel 8. Rencana Kinerja Tahunan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 .....	38
Tabel 9. Rencana Target Kinerja Dan Dasar Penentuan Target Kinerja OPD ..	40
Tabel 10. Capaian Cost Recovery Rate RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun .....	77
Tabel 14. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	79
Tabel 11. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	87
12. Rekapitulasi Survei IKM Tahun 2018 sd 2021 .....	89
Tabel 13. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD .....	101
Tabel 14. Target dan realisasi penerimaan/pendapatan .....	103
Tabel 15. Anggaran Belanja .....	103
Tabel 16. Sumber Dana Anggaran Belanja .....	105

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Keselarasan Visi Misi .....	21
Gambar 2. Pohon Kinerja .....	22
Gambar 3. Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2 .....	23
Gambar 4. Grafik Barber Johnson RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 .....	73







## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat (*public services*) khususnya pelayanan kesehatan rujukan yang komprehensif, teadur dan efisien serta dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu, terjangkau secara adil dan merata baik pelayanan yang bersifat dasar spesialisik maupun subspecialistik. Sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan secara paripurna merupakan pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pada masa depan tantangan utama yang akan mempengaruhi dunia rumah sakit di Indonesia adalah globalisasi. Rumah Sakit milik pemerintah khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam melaksanakan fungsinya sebagai rumah sakit pemerintah menghadapi berbagai tantangan :

1. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan investasi jangka panjang;
2. RSUD mempunyai kewajiban untuk melayani penduduk miskin (*public goods*) yang setelah terjadi krisis jumlahnya semakin banyak;
3. RSUD diharapkan lebih responsif dan proaktif terhadap tuntutan segmen masyarakat yang mampu (*private goods*) dengan pelayanan bermutu;
4. RSUD semakin bersaing dengan rumah sakit lain dalam menangkap potensi pasar dan memperebutkan sumber daya manusia;
5. RSUD berhadapan dengan perkembangan teknologi kedokteran dan teknologi manajemen modern;
6. RSUD harus menghadapi inflasi ekonomi dan inflasi input kesehatan;
7. RSUD merupakan salah satu organisasi padat karya, profesi, fungsi, teknologi dan modal.

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai lembaga usaha nirlaba (*non-profit*) yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pusat rujukan pelayanan kesehatan yang tetap memperhatikan standar mutu pelayanan professional, diharapkan tetap dipercaya oleh masyarakat serta mampu menarik pelanggan.

Namun demikian sebenarnya masih banyak kendala yang dihadapi rumah sakit dalam mengelola administrasi dan manajemennya, antara lain penetapan tarif yang perhitungannya masih di bawah *unit cost*, pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada teknik *accrual basis* yang mana belum diikuti dengan cara yang sama oleh pemerintah daerah. **Smart Hospital** adalah sebuah impian kedepan sehingga dalam upaya untuk mewujudkannya, manajemen perlu terus melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sehingga mampu menghadapi tantangan zaman modern yang serba digital. Begitu pula sarana dan prasarana pelayanan yang belum lengkap dan semakin tua, serta ketinggalan zaman. Disisi lain teknologi kedokteran dan teknologi informasi dalam perkembangan yang bersifat global sangat pesat perkembangannya.

Tuntutan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin merupakan kebutuhan mendesak yang perlu disikapi dengan kemampuan petugas pelayanan serta dukungan peralatan yang memadai, merupakan unsur prioritas dalam meningkatkan performa kinerja rumah sakit. Posisi wilayah kota Pangkalan Bun sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah wilayah barat, merupakan posisi strategis sekaligus memerlukan tantangan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit yang memadai.

Efisiensi merupakan alasan aktual lainnya yang merupakan aspek yang harus dioptimalkan dengan mengedepankan pelayanan yang memuaskan, karena di sisi lain akan mendatangkan income bagi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, khususnya untuk pelayanan yang bersifat perorangan (*private good*) dengan tetap berupaya melakukan perbaikan kualitas pelayanan untuk fungsi sosial Rumah Sakit terutama bagi pasien kurang mampu. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin memerlukan pengelolaan yang strategik dan bermutu, optimalisasi sumber daya kesehatan yang ada, menggalang kemitraan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor.

Selanjutnya dengan mengacu pada perencanaan strategis Rumah Sakit dan rencana kinerja Rumah Sakit tahun 2018 – 2022 (Renstra), maka perlu

disusun program dan kegiatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021 sebagai tahapan menuju terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## 1.2 Data Umum Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun merupakan unit organik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di kota Pangkalan Bun. Organisasi RSUD Sultan Imanuddin sebagai Rumah Sakit Kelas B berdasarkan SK Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/01/PK/XII/BPMDP/2015 Tanggal 30 Desember Tahun 2015, dan pada bulan Oktober 2017 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mendapatkan izin operasional kelas B.

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ditunjuk sebagai Pusat Rujukan Regional II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/339/2009.

Pada tanggal 17 Desember 2012 melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor RS/U.12.12.1910.I.1 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan harapan mutu pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2017 s.d 2021 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun meraih predikat “**Lulus Akreditasi Paripurna**”.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58);

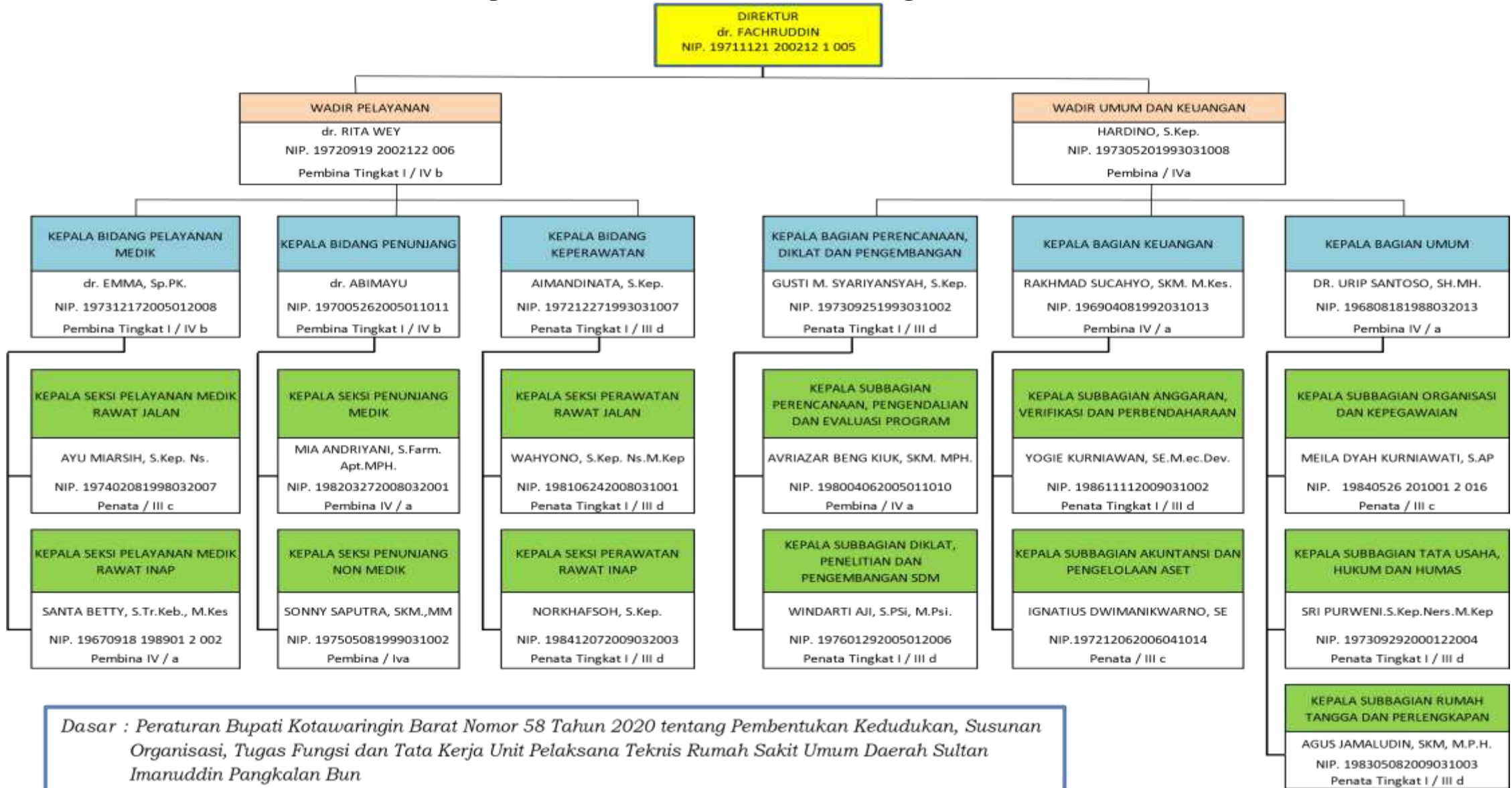
(1) Mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan; dan
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas, UPT RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis non medis;
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan; dan
- g. Administrasi umum dan keuangan.

## Struktur Organisasi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021







## **Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin**

- a. Pelayanan gawat darurat;
- b. Pelayanan rawat jalan;
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan bedah;
- e. Pelayanan persalinan (Kebidanan) dan perinatologi;
- f. Pelayanan intensif (ICU/ICCU);
- g. Pelayanan radiologi;
- h. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
- i. Pelayanan rehabilitasi medik;
- j. Pelayanan farmasi;
- k. Pelayanan hemodialisis;
- l. Pelayanan gizi;
- m. Pelayanan transfusi darah;
- n. Pelayanan keluarga miskin, BPJS kesehatan;
- o. Pelayanan rekam medis;
- p. Pengelolaan limbah;
- q. Pelayanan administrasi manajemen;
- r. Pelayanan ambulans/kereta jenazah;
- s. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
- t. Pelayanan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit;
- u. Pelayanan laundry;
- v. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- w. CSSD.

## **Rawat Jalan dan Rawat Darurat :**

1. Klinik Kebidanan dan Kandungan;
2. Klinik Kesehatan Anak;
3. Klinik Penyakit Dalam;
4. Klinik Bedah;
5. Klinik Mata;
6. Klinik Saraf;
7. Klinik THT;
8. Klinik Jiwa;
9. Klinik Kulit dan Kelamin;

10. Klinik Paru;
11. Rawat Darurat;
12. Klinik Umum;
13. Klinik Gigi dan Mulut;
14. Klinik Orthodontis;
15. Klinik MCU;
16. Klinik Psikologi;
17. Klinik Gizi;
18. Klinik Rehabilitasi Medis;
19. Klinik VCT;
20. Klinik KIA-KB, Klinik Imunisasi;
21. Medical Check Up;
22. Klinik Tumbuh Kembang Anak;
23. Unit Elektro Kardio Graph;
24. Pojok Laktasi.
25. Hemodialisa.
26. Pojok Dots.
27. Klinik Orthopedi **Rawat Inap :**
  1. Perawatan Kebidanan dan Kandungan;
  2. Perawatan Anak;
  3. Perawatan VIP;
  4. Perawatan Bedah;
  5. Perawatan Perinatologi;
  6. Perawatan Penyakit Dalam;
  7. Perawatan ICU/ICCU;
  8. Bedah Sentral;
  9. Anastesi dan Reanimasi.
  10. Ruang Isolasi

**Penunjang Medis Dan Non Medis :**

1. Radiologi;
2. Laboratorium Klinik;
3. Farmasi;
4. Gizi;
5. Laundry;

6. Ambulan 118 dan transportasi jenazah;
7. Pemulasaran jenazah;
8. Sterilisasi (CSSD).
9. Hemodialisa. 10. Bank Darah.

**Administrasi dan SIMRS :**

1. Billing System;
2. Sisten Informasi dan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (SIM BLUD);
3. SIM Farmasi;
4. SIM Aset
5. Rekam Medis;
6. Keterangan Kesehatan (MCU);
7. Pendidikan dan Pelatihan;
8. Pemasaran Sosial;
9. PKRS;
10. Peustakaan;
11. Keuangan;
12. Perencanaan;
13. UKP

**Pengelolaan Limbah :**

1. Limbah Padat Rumah Sakit;
2. Limbah Cair Rumah Sakit;

No	Jenis Tenaga	Jumlah	%
1	Dokter Umum	17	2,66
2	Dokter Gigi	1	0,17
3	Dokter Spesialis	30	4,99
4	Dokter Gigi Spesialis	3	0,50
5	Keperawatan	185	29,78
6	Non Nakes	213	34,44
7	Kebidanan	45	7,15
8	Kefarmasian	31	4,83
9	Keteknisian Medis	45	3,16
10	Nakes lainnya	14	0,17
11	Gizi	11	1,83
12	Keterapian Fisik	9	1,50
13	Kesehatan Lingkungan	2	0,17
14	Kesehatan Masyarakat	1	0,83
15	Pejabat Struktural	21	2,33
<b>JUMLAH</b>		<b>628</b>	<b>100</b>

## Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada tahun 2021 didukung oleh tenaga medis sebanyak 576 orang sesuai tabel tersebut dibawah ini.

**Tabel 1. Jumlah Ketenagaan Pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021**

*Sumber data: RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021*

### **Dokter Spesialis Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021**

<b>Dokter Spesialis</b>	<b>PNS</b>	<b>Kontrak</b>	<b>Jumlah</b>
Dokter Spesialis Anak	3	-	<b>3</b>
Dokter Spesialis Anastesi	1	1	<b>2</b>
Dokter Spesialis Bedah	3	-	<b>3</b>
Dokter Spesialis Ilmu Kes. Kulit & Kelamin	2	-	<b>2</b>
Dokter Spesialis Mata	1	-	<b>1</b>
Dokter Spesialis Neorologi/Syaraf	2	-	<b>2</b>
Dokter Spesialis Obsgyn	4	-	<b>4</b>
Dokter Spesialis Orthopedi	-	-	<b>0</b>
Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	-	<b>2</b>
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	-	<b>3</b>
Dokter Spesialis Psikiatri	1	-	<b>1</b>
Dokter Spesialis Radiologi	1	-	<b>1</b>
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	-	<b>1</b>
Dokter Spesialis THT	2	-	<b>2</b>
Dokter Spesialis Paru	1	1	<b>2</b>

Dokter Spesialis Forensik	1	-	1
<b>JUMLAH</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>30</b>

### Dokter Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

Dokter Spesialis	PNS	KONTRAK	Jumlah
Dokter Gigi	1	-	1
Dokter Gigi Spesialis Orthodonti	1	-	1
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	-	1
Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	-	1
Dokter Spesialis Anak	3	-	3
Dokter Spesialis Anastesi	1	1	2
Dokter Spesialis Bedah	3	-	3
Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	2	-	2
Dokter Spesialis Mata	1	-	1
Dokter Spesialis Neorologi/Syaraf	2	-	2
Dokter Spesialis Obgyn	4	-	4
Dokter Spesialis Orthopedi	-	-	
Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	-	2
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	-	3
Dokter Spesialis Psikiatri	1	-	1
Dokter Spesialis Radiologi	1	-	1
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	-	1
Dokter Spesialis Paru	1	1	2
Dokter Spesialis THT	2	-	2
Dokter Spesialis Forensik	1	-	1
Dokter Umum	8	9	17
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>51</b>

Sumber data: RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021

### Standar Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (Tenaga Fungsional Tertentu)

No	JENIS KETENAGAAN	STANDAR KELAS B	KEADAAN RSSI
2	Tenaga kefarmasian		
	a Apoteker	8	10
	b Tenaga teknis kefarmasian	12	31
3	Tenaga keperawatan (Perawat: TT)	1:1	
	a Perawat	+	185
	b Perawat spesialis	+/-	-
4	Tenaga kebidanan	+	45
5	Tenaga kesehatan lainnya		
	a Gizi		
	1) Nutrisionis	+	7
	2) Dietesien	+/-	-
	b Psikologi klinis	+	1
	c Keterampilan Fisik		

	1) Fisioterapis	+	7
	2) Terapis wicara	+	-
	3) Okupasi terapis	+	2
	d Keteknisian medis		
	1) Perekam medis dan informasi kesehatan	2	9
	2) Penata anestesi	5	6
	e Teknik biomedika		
	1) Radiografer	2	8
	2) Elektromedis	+	1
	3) Fisikawan medik	+	-
	4) Ortotis prostetis	+/-	-
	5) Radioterapis	+/-	-
	6) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	2	26
	f Sanitarian/kesling	+	2
	g Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	1
6	Tenaga non kesehatan	+	218

### Sarana dan Prasarana

**Tabel 2. Sarana Prasarana RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun**

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)
1	Gedung Kantor dan Administrasi	1 Unit
2	Instalasi Gawat Darurat	1 Unit
3	Rawat Jalan	2 Unit
4	Rawat Inap	9 Unit
5	Kamar Operasi	4 Unit
6	Kamar Bersalin	4 Unit
7	Instalasi Farmasi / Apotik	1 Unit
8	Laboratorium	1 Unit
9	Radiologi	1 Unit
10	Fisioterapy	1 Unit
11	Instalasi Gizi	1 Unit
12	Kamar Jenazah	1 Unit
13	IPAL	1 Unit
14	Incenerator	2 Unit
15	Gedung Genset	1 Unit
16	Perumahan Dokter Ahli	26 Unit

17	Perumahan Direktur	1 Unit
18	Kendaraan Dinas Direktur (roda 4)	1 Unit
19	Kendaraan Dinas Dokter Ahli (roda 4)	17 Unit
20	Kendaraan Dinas Dokter Umum (roda 2 )	1 Unit
21	Ambulance	3 Unit
22	Mobil Jenazah	2 Unit
23	Lemari Pasien	222 Unit
24	Kursi pertemuan	160 Unit
25	Kursi Tunggu Pasien	100 Unit
26	Laptop	24 Unit
27	Komputer	75 Unit
28	Printer	82 Unit
29	LCD Projector	5 Unit
30	Faximile	2 Unit
31	Kipas Angin	20 Unit
32	Kulkas	30 Unit
33	Televisi	38 Unit
34	AC	255 Unit
35	WhiteBord	16 Unit
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (UNIT)</b>
36	Genset	5 Unit
37	USG	2 Unit
38	UV sterilizer	1 Unit
39	Baby Incubator	13 Unit
40	Laser Theraphy	1 Unit
41	Blood Bank Refrigerator	1 Unit
42	Photometer Full Analyzer	1 Unit
43	Mesin Phacoemulsification	1 Unit
44	Operating Microscope	1 Unit
45	Basic Radiography System	1 Unit
46	X-ray Unit	1 Unit
47	CT- Scanner	1 Unit
48	Automatic Film Processing	1 Unit

49	Electro Countary Treatment	2 Unit
50	Incenerator	2 Unit
51	Server	2 Unit
52	CCTV	61 Unit
53	Alat Pemadam Kebakaran/Hydrant	18 Tabung

### **Kondisi Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang digunakan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun meliputi gedung/bangunan, rumah dinas, kendaraan operasional, peralatan kesehatan dan perlengkapan Rumah Sakit, yang secara rinci kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Gedung/bangunan RSUD Sultan Imanuddin terdiri dari :

- 1) Gedung Administrasi;
- 2) Instalasi Gawat Darurat;
- 3) Gedung Poliklinik (Umum dan Spesialis);
- 4) Gedung Radiologi;
- 5) Gedung Fisioterapi;
- 6) Gedung Laboratorium;
- 7) Gedung ICU - ICCU;
- 8) Gedung bedah sentral;
- 9) Ruang Perawatan Penyakit Dalam Pria (Akasia);
- 10) Ruang Perawatan Penyakit Dalam Wanita (Sindur);
- 11) Ruang Perinatologi;
- 12) Ruang kebidanan dan kandungan (Bengkirai);
- 13) Ruang VIP (Ulin);
- 14) Ruang VIP (Ramin);
- 15) Ruang Perawatan Bedah (Meranti);
- 16) Ruang perawatan anak (Lanan);
- 17) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana (IPSRs);
- 18) Gedung Apotik dan Farmasi;
- 19) CSSD dan Laundry;
- 20) Instalasi Kamar Jenazah;
- 21) Instalasi Gizi/ Dapur;
- 22) Gedung Genset;



23) Incenerator; 24) IPAL

Gedung/bangunan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun masih perlu dikembangkan sesuai dengan **master plan RSUD Sultan Imanuddin**, sehingga ada beberapa gedung yang perlu dibangun yakni, gedung rawat inap, gedung rehabilitasi medik, gedung pemulasaraan jenazah, gudang sentral, gedung CSSD, gedung hemodialisa, gedung laundry, dan pemagaran dilingkungan RSUD Sultan Imanuddin.

b. Rumah Dinas RSUD Sultan Imanuddin sebanyak **27 buah** terdiri dari :

- 1) Rumah dinas jabatan (direktur) : 1 buah (rumah pemda);
- 2) Rumah dinas dokter umum/drg/spesialis: 26 buah;

Kondisi rumah dinas RSUD Sultan Imanuddin dari 26 buah rumah dinas, 22 rumah dinas kondisinya baik, 4 rumah dinas rusak ringan, dan 1 rumah dinas rusak berat, sehingga perlu perbaikan/rehabilitasi.

c. Kendaraan dinas/Operasional RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebanyak 38 buah terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 26 buah dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 12 buah, secara rinci sebagai berikut:

- 1). Kendaraan dinas roda empat jabatan direktur : 1 buah;
- 2). Kendaraan dinas roda empat dokter spesialis : 15 buah;
- 3) Kendaraan dinas roda empat operasional : 2 buah;
- 4) Kendaraan dinas roda empat ambulance pasien : 5 buah, (2 buah ambulance pasien hibah dari PT. ASKES dan PT. BRI);
- 5) Kendaraan dinas roda empat ambulan jenazah : 3 buah; (1 buah rusak berat dan 1 rusak ringan);
- 6) Kendaraan dinas roda dua operasional : 12 buah.

Kondisi kendaraan dinas RSUD Sultan Imanuddin baik roda empat maupun roda dua pada umumnya baik, namun perlu penambahan kendaraan yaitu ambulan (tipe 4WD) untuk mengatasi peningkatan jumlah pasien yang perlu diantar terutama untuk daerah-daerah teencil dengan medan yang berat, serta kendaraan dinas roda empat untuk operasional dokter spesialis.

d. Peralatan kesehatan/kedokteran yang dimiliki RSUD Sultan Imanuddin terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, peningkatan ini sejalan dengan arah peningkatan kelas Rumah Sakit menjadi kelas B Pendidikan.

- e. Perlengkapan yang dimiliki RSUD Sultan Imanuddin seperti meubeler, komputer, printer, peralatan audiovisual untuk kegiatan penyuluhan/promosi, telepon/aiphone, AC, perlengkapan rumah tangga (dapur, laundry) dan lain-lain pada umumnya dalam kondisi baik, namun dengan bertambahnya pengunjung/pelanggan RSUD Sultan Imanuddin, dan penyesuaian dengan standar akreditasi rumah sakit, maka masih diperlukan pengadaan perlengkapan rumah sakit untuk menunjang kelancaran pelayanan.

### 1.3 Aspek Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

#### Analisa SWOT dan isu-isu strategis

<b>SWOT</b>	<b>KEKUATAN (S)</b>	<b>KELEMAHAN(W)</b>
	Sebagai RS Rujukan Propinsi dan Regional	Sarana dan prasarana RS belum sesuai standar RS kelas B
	RS sudah menjadi kelas B	Alat kesehatan belum sesuai standar RS kelas B

		RS sudah terakreditasi	Sumber Daya Tenaga Kesehatan belum sesuai standar RS kelas B
		Tersedianya dana APBD dan APBN	Struktur Organisasi belum sesuai dengan RS kelas B
		Adanya dukungan SIM RS	Belum ada sistem pemasaran RS
		Adanya program unggulan dan berbagai jenis pelayanan medis dan penunjang medis	Diklat Tenaga Kesehatan belum sesuai SPM.
		Komitmen aparaturnya RS dalam pengembangan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan	
<b>PELUANG (O)</b>	Lokasi rumah sakit strategis	Menjamin keterjangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat.	Pengembangan rumah sakit yang sesuai dengan standar rumah sakit kelas B
	Luas lahan untuk pengembangan	Mejamin pelayanan rumah sakit yang bermutu	Membangun sistem pemasaran rumah sakit
	Mobilisasi penduduk cukup tinggi dari luar wilayah	Mendorong peningkatan kunjungan ke rumah sakit	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan
	Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dan kemitraan	
	Kemajuan teknologi kedokteran yang terus berkembang	Pengembangan jenis layanan di rumah sakit	
	dan peluang KSO		
	Adanya jejaring kemitraan yang luas		

	Kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk mendapatkan layanan kesehatan		
	Sistem JKN dan Asuransi lain		
	Adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan rumah sakit menggunakan obat generik		
<b>ANCAMAN (T)</b>	Sarana pelayanan kesehatan pesaing semakin bertambah	Mendorong peningkatan daya saing mutu pelayanan rumah sakit	Membangun triptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas
	Pendapatan rumah sakit belum dapat membiayai belanja operasional	Mendorong peningkatan pendapatan rumah sakit	Mengembangkan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan
	Fluktuasi harga obat dan BAKHP masih tinggi	Menjamin ketersediaan obat dan BAKHP	
	Kekosongan obat Fornas	Mendorong percepatan pembayaran klaim BPJS	
	Keterlambatan pembayaran klaim BPJS kesehatan ke rumah sakit		
	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat		
	Citra rumah sakit masih negatif, dengan ditambah adanya pandemi Covid, masyarakat jadi takut ke RS		

#### 1.4 Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Pelayanan kesehatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan.

Permasalahan internal adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya dokter spesialis seperti dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis bedah syaraf, guna mendukung peningkatan layanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional.
2. Dengan bertambahnya gedung-gedung baru di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, akan membutuhkan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sampai saat ini kebutuhan SDM masih belum mencukupi khususnya bagi tenaga kesehatan di unit pelayanan rawat inap.
3. Masih tingginya biaya operasional rumah sakit dibanding pendapatan RS
4. Memasuki tahun anggaran 2021 secara global, nasional maupun lokal, kita dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan, diantaranya Pandemi Covid-19. Pandemi COVID-19 secara langsung menyebabkan perubahan besar dalam layanan rumah sakit. Seiring dengan perkembangan penyakit ini yang begitu pesat, berbagai masalah pun mulai bermunculan. Permasalahan yang berkembang bukan hanya masalah bagaimana ketersediaan sumber daya rumah sakit yang kemudian menyebabkan keterbatasan dalam memberikan layanan, tetapi juga bagaimana rumah sakit mempersiapkan mental para tenaga kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan juga harus mempersiapkan bagaimana ketakutan masyarakat akan COVID-19 menyebabkan keengganan untuk mendapatkan pertolongan kesehatan atas masalahnya sendiri di rumah sakit. Pada pasien yang harus mendapatkan layanan kesehatan secara utin dan termasuk dalam populasi berisiko, harus dilakukan penyesuaian layanan. Penundaan pengobatan yang dapat dilakukan atau melanjutkan pengobatan dengan peningkatan kewaspadaan akan transmisi COVID-19 merupakan opsi yang dapat dilakukan dan dipertimbangkan secara matang oleh klinisi. Hal utama yang harus dilakukan adalah pemberian edukasi terhadap pasien dalam menentukan rencana tata laksana yang dapat dilakukan selanjutnya.
5. Stigma RSSI Sebagai RS Covid
6. Rujukan Berjenjang Bpjs Pelayanan Belum Optimal
7. Keterbatasan Anggaran Pemenuhan SDM, Sarana dan Prasarana
8. Layanan Rumah Sakit Belum total Berbasis Digital
9. Belanja Gaji Pegawai
10. Perkiraan ahli, pandemi berakhir dalam 1-2 tahun kedepan

11. Rencana Pelaksanaan Single Tarif BPJS
12. Minimalnya provider asuransi swasta yang bekerjasama dengan RSSI → preferensi pasien untuk memilih provider yankes

### **1.5 Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021 merupakan suatu media yang mengkomunikasikan pencapaian target kinerja organisasi di tahun 2021. Pencapaian target kinerja organisasi pada periode tersebut diukur melalui perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Melalui analisis capaian target kinerja, RSSI Pangkalan Bun akan mampu untuk mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) yang dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, sistematika penyajian LKjIP Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021 (sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat) dijabarkan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Data Umum Perangkat Daerah

1.3 Aspek Strategis Perangkat Daerah

1.4 Permasalahan Utama Perangkat Daerah

1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.4 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

### 3.2 Realisasi Anggaran BAB

## IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

### 4.2 Solusi Atas Permasalahan

#### Lampiran:

1. Surat keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung
5. Laporan Realisasi Anggaran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

**Tabel 3. Keselarasan Visi Rumah Sakit dengan Visi Pemerintah Daerah**

Visi Rumah Sakit	Keterkaitan Dengan Visi Pemerintah Daerah
Rumah Sakit Mandiri Dengan Pelayanan Prima.	<p>Visi Pemerintah Daerah “Gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”.</p> <p>Selaras dengan Visi Pemerintah Daerah maka Visi Rumah Sakit Sultan Imanuddin mendukung terwujudnya kejayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dengan pelayanan prima khususnya pelayanan rujukan.</p>

**Tabel 4. Keselarasan Misi Rumah Sakit dengan Misi Pemerintah Daerah**

No.	Misi Rumah Sakit	Keterkaitan Dengan Misi Pemda
1	Mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional dengan prinsip sosial ekonomi secara efektif dan efisien serta mampu berdaya saing.	Rumah Sakit Sultan Imanuddin melaksanakan penjabaran dari misi 2 (dua) yaitu: “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, <b>Kesehatan</b> , dan Olahraga”.
2	Meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit yang profesional, produktif dan berkomitmen sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran/kesehatan.	
3	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat secara cepat, tepat, nyaman dan terjangkau dengan dilandasi etika profesi.	
4	Mewujudkan pelayanan yang proaktif dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.	





**Gambar 1. Keselarasan Visi Misi**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian targetnya masingmasing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan. Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam bentuk tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

Tujuan JMD	Indikator Tujuan JMD	Sasaran JMD	Indikator Sasaran JMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Olahraga	Indek Pembangunan Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prosentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	Terwujudnya akses pelayanan kesehatan yang bermutu	Presentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi
---	---------------------------	---	---	--	---



Gambar 2. Pohon Kinerja

**SASARAN RPJMD**  
**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**  
*Indikator : Angka Harapan Hidup*

**SASARAN OPD**  
**Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit**  
*Indikator:*

1. <i>Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi</i>	4. <i>TOI</i>
2. <i>BOR</i>	5. <i>BTO</i>
3. <i>LOS</i>	6. <i>NDR</i>
	7. <i>GDR</i>

**SASARAN OPD**  
**Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.**  
*Indikator:*

1. *Cost Recovery Rate (CRR)*
2. *Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target*
3. *Indeks Kepuasan Masyarakat*

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Pengembangan Rumah Sakit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Gambar 3. Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2

## 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

**Tabel 6. IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun**

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran	Satuan Target
Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Persentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi SNARS, dibagi Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada, dikalikan dengan 100.	> 80 % (Paripurna)
	BOR	Bed Occupancy Rate (BOR) Yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, standar ideal : 60-85%.	60-85%
	LOS	Average Length of Stay (Av LOS) Yaitu rata-rata lama perawatan seseorang, standar ideal : 6 – 9 hari.	6 – 9 hari
	TOI	Turn Over Interval (TOI) Yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1 – 3 hari.	1 – 3 hari
	BTO	Bed Turn Over (BTO) Yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai: 40-50 kali.	40-50 kali
	NDR	Net Death Rate (NDR) Yaitu angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 orang penderita keluar, angka yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.	25/1000

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran	Satuan Target
	GDR	Gross Death Rate (GDR) Yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.	45/1000
Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	Nilai dalam Persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Cost Recovery = Realisasi Pendapatan dibagi realisasi pengeluaran	60%
	Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Jumlah indikator SPM yang memenuhi target minimal yang telah ditetapkan dibagi seluruh indikator SPM RS dikali seratus.	80%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	76,61%

### 2.3 Program dan Kegiatan – Sub Kegiatan

Program Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Selaras dengan kebutuhan pada Tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat mengeluarkan kebijakan perubahan (pergeseran) anggaran Tahun 2021 dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 900/89.a/TAPD/2021 Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Perubahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, program dan kegiatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 terdiri atas :

**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar  
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		Pengembangan Rumah Sakit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk merencanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan yang disusun, baik Renstra maupun Renja. Pada program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan.

Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<p>Maksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelaraskan program dan kegiatan dengan pelaksana urusan di tingkat Perangkat Daerah</li> <li>2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</li> <li>3. Mensinergikan rancangan program dan kegiatan dengan kebijakan nasional.</li> <li>4. Meningkatkan kinerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;</li> <li>5. Termonitornya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.</li> </ol> <p>Tujuan: Adanya peningkatan kerja dan kinerja di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<p>Maksud: Terbayarnya Gaji sebagai kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.</p> <p>Tujuan: Adanya peningkatan kerja dan</p>
---	-----------------------------------	---

Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan
		kinerja di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam pelayanan kepada masyarakat.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<p>Maksud: Menyajikan pencapaian kinerja keuangan dan laporan realisasi APBD yang dibebankan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.</p> <p>Tujuan: Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun 2020 dan draf laporan akhir tahun 2021.</p>
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<p>Maksud: Meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja seluruh Pegawai di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.</p> <p>Tujuan: Tersedianya pakaian seragam dan tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang wajib dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.</p>

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<p>Maksud: Untuk mendukung kegiatan Kantor dalam kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk aktifitas sehari hari.</p> <p>Tujuan: Pengadaan Peralatan Kantor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan.</li> <li>Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal.</li> <li>Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur.</li> <li>Untuk menjamin keselamatan bagi yang menggunakan alat-alat tersebut.</li> </ol> <p>Perlengkapan kantor adalah segenap benda yang dipergunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri dari perabot kantor, mesin kantor, perbekalan kantor dan interior kantor.</p> <p>Pengadaan Perlengkapan Kantor: a. Mendukung aktivitas dan pekerjaan kantor.</p>
---------------------------------------	--	---

Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghemat tenaga dan biaya.</li> <li>Memudahkan pengawasan.</li> <li>Dapat menghemat biaya, bila dipergunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan.</li> <li>Dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rapi.</li> <li>Keterangan yang dimuat dapat lebih banyak.</li> <li>Dapat mengurangi kelelahan pegawai sehingga dapat menambah mutu pekerjaan.</li> </ol>
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<p>Maksud: Untuk mendukung kegiatan Kantor dalam Kebutuhan Bahan Cetakan dan penggandaan untuk aktifitas sehari hari Tujuan: Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan selama satu tahun.</p>

	<p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	<p>Maksud:          Untuk proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain supaya tercapainya tujuan bersama. Koordinasi juga merupakan suatu proses saling mengerti dan memahami antara 2 pihak atau lebih dalam menjalankan suatu hal.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terciptanya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi guna pencapaian tujuan organisasi dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.</li> <li>Pimpinan menjadi mudah dalam melakukan sinergi serta integrasi berjalannya tugas yang ada dengan pihak yang berhubungan. Ketika keterkaitan dengan unitunit atau divisi semakin besar maka akan semakin tinggi kebutuhan koordinasinya.</li> <li>Mendukung pimpinan untuk mensinergikan serta mengontrol perkembangan antara satu unit dengan unit yang lain.</li> <li>Pimpinan bisa melakukan sinkronisasi kegiatan fungsional dengan berbagai tujuan masingmasing unit yang berbeda demi tercapainya tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia.</li> </ol>
Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan

<p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>	<p>Maksud: Tersedianya kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional lapangan, kendaraan dinas operasional khusus yang digunakan oleh dokter spesialis. Tujuan: tersedianya kendaraan operasional untuk Jabatan Dokter Spesialisasi dan mempermudah mobilisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p>
<p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>	<p>Maksud: Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat. Tujuan: a. Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait. b. Berjalan lancarnya kegiatan operasional perkantoran secara efektif, cepat dan efisien.</p>
<p>7. Peningkatan Pelayanan BLUD</p>	<p>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</p>	<p>Maksud: Keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Tujuan: Memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.</p>

## 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya

### Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dan mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan yang merujuk pada Standar Teknis Pelayanan Rumah Sakit.

Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan.

Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Maksud: Bertambahnya Sarana dan Prasarana pendukung layanan di Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Tujuan: Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit meliputi Dokumen Detail Gambar Kerja, Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, Kajian kemampuan pembiayaan, Strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya sepuluh tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan. Dokumen dimaksud dapat terdiri dari Dokumen Studi kelayakan (Fesibility Study), Master Plan, Detail Engineering Design (DED), dan dokumen perencanaan lainnya yang diperlukan

	Pengembangan Rumah Sakit	Maksud: Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu
--	--------------------------	---

Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan
		meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan: Terdapat Jumlah Peningkatan Kelas dan/atau Perubahan Jenis RSUD

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	<p>Maksud: Kegiatan Pembangunan /Pengembangan/Rehabilitasi merupakan satu lingkup istilah "Pembangunan" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 /PRT/ M / 2018 Tahun 2018.</p> <p>Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis (X1), pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).</p> <p>Tujuan: Terdapat Jumlah gedung RSUD yang Dibangun/Dikembangkan /Direhabilitasi.</p>
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<p>Maksud: Dilaksanakannya Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendukung pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin pangkalan Bun</p>
Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan
		<p>Tujuan: Agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu sarana, prasarana dan peralatan alat</p>

		kesehatan RS selalu berada dalam keadaan layak.
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<p>Maksud: Ketersediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Kelas Layanan</p> <p>Tujuan: Digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.</p>
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	<p>Maksud: Memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin, tidak mampu atau pasien terlantar</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk masyarakat tidak mampu, yang meliputi perawatan dan pengobatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, perawatan dan pengobatan pada unit rawat inap kelas 3 (tiga) rumah sakit milik Pemerintah Daerah, yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan;</li> <li>Masyarakat yang mengalami perawatan dan pengobatan pada unit rawat inap kelas 3 (tiga) rumah sakit;</li> <li>Masyarakat yang menjadi objek sasaran program pada Dinas.</li> </ol>
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Maksud: Sistem Informasi Manajemen RS merupakan sistem



Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan
Terintegrasi		<p>pengelolaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung manajemen rumah sakit dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.</p> <p>Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan merupakan bentuk penyajian data dan fakta secara tertulis yang menggambarkan informasi terkait penggunaan /penerapan Sistem Informasi rumah sakit dalam mendukung pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya serta pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan pelaksanaan penggunaan aplikasi SIMRS di semua unit pelayanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.</li> <li>b. Memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat.</li> <li>c. Teknologi yang dirancang khusus untuk membantu proses pengolahan data di rumah sakit adalah teknologi informasi berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) rumah sakit.</li> <li>d. Untuk meningkatkan keakuratan informasi</li> </ol>

		<p>e. Untuk mempermudah koordinasi antar unit pelayanan di RS</p>
Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan

		<p>f. Untuk mempercepat pengambilan keputusan</p> <p>g. Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik</p> <p>h. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik</p>
--	--	---

### 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Kegiatan	Sub Kegiatan	Penjelasan → Maksud dan Tujuan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Maksud: Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.</p> <p>Tujuan: Kegiatan peningkatan kompetensi atau pengembangan yang dimaksud meliputi pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang dimaksud adalah penugasan pendidikan melalui tugas belajar baik tugas belajar daerah atau tugas belajar pusat dan termasuk ijin belajar. Pelatihan yang dimaksud dapat berupa pelatihan manajemen kesehatan, pelatihan teknis kesehatan dan pelatihan fungsional kesehatan. Pelatihan dapat diselenggarakan dalam beberapa metode misal pelatihan tatap muka, seminar, coaching, praktek lapangan dan sebagainya.</p>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	<p>Maksud: Kecukupan Sumber Daya Manusia di ruang sakit</p> <p>Tujuan: Upaya pemenuhan standar dan spesifikasi SDM RS sebagaimana hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK).</p>

### Penyediaan Pagu/Anggaran RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun

2021:

- a. APBD Murni Tahun 2021
  - Program : 3 Program
  - Kegiatan : 11 Kegiatan
  - Sub Kegiatan : 19 Sub Kegiatan
  - Pagu : Rp. 252.276.548.536
  
- b. APBD Pergeseran ke 3/ Refocusing Tahun 2021
  - Program : 3 Program
  - Kegiatan : 11 Kegiatan
  - Sub Kegiatan : 19 Sub Kegiatan
  - Pagu : Rp. 274,854,239,386
  
- c. APBD Perubahan Tahun 2021
  - Program : 3 Program
  - Kegiatan : 11 Kegiatan
  - Sub Kegiatan : 17 Sub Kegiatan
  - Pagu : Rp. 298.577.274.013,00

Terjadi penambahan pagu dari refocusing 3 ke Perubahan 2021 sebesar Rp. 46.300.725.477.

## **2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja disusun dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan penetapan target. Penetapan sasaran Rencana Kinerja dituangkan sesuai dengan sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra.

Sasaran tersebut kemudian diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja. Pada setiap akhir tahun, Penetapan Kinerja ini akan dipertanggungjawabkan capaian kerjanya pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berikut rumusan rencana kinerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun TA. 2021

Penjabaran dari rencana kinerja tahunan disertai dengan program/kegiatan dan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Komponen Penetapan

Kinerja terdiri dari Sasaran, Indikator Kinerja, Target, program/kegiatan dan anggaran tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel 7. Rencana Kinerja Tahunan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021**

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Program-Kegiatan-Subkegiatan	Anggaran (Rp)
A.	Sasaran 1: Meningkatkan Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi  BOR LOS TOI  BTO NDR GDR	80%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	104,253,030,366.00
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	103,933,030,339.00
			60-85%	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1,072,718,910.00
				Pengembangan Rumah Sakit	77,098,087,000.00
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2,041,578,000.00
			6-9 hari 1-3 hari	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,595,488,429.00
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21,125,158,000.00
			40-50 kali	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270,000,027.00
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	270,000,027.00
			25/1000 45/1000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	50,000,000.00
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50,000,000.00
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11,362,520,867.00
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11,332,100,867.00
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	11,332,100,867.00
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,420,000.00

				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,420,000.00
--	--	--	--	---	---------------

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Program-Kegiatan-Subkegiatan	Anggaran (Rp)
B.	Sasaran 2: Meningkatkan kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>182,961,722,780.00</b>
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,500,000.00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,500,000.00
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	80%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38,015,903,158.00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38,014,313,158.00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,590,000.00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	45,774,310.00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,794,310.00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,500,000.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	>76,61%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,480,000.00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	704,999,812.00
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	704,999,812.00

				Peningkatan Pelayanan BLUD	144,188,545,500.00
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	144,188,545,500.00
<b>TOTAL ANGGARAN 2021 (SAMPAI PERUBAHAN 2021)</b>					<b>298,577,274,013.00</b>

**Tabel 8. Rencana Target Kinerja Dan Dasar Penentuan Target Kinerja OPD**

PENYESUAIAN RENSTRA							
Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran	Penjelasan terhadap skala capaian	SATUAN TARGET	RENCANA TARGET		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022



Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi SNARS, dibagi Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada, dikalikan dengan 100. Idealnya untuk capaian adalah paripurna (>80%)	<p>Dasar: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. Pada pasal berbunyi "Penetapan status Akreditasi sebagaimana aksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi berdasarkan rekomendasi Akreditasi dari survei"</p> <p>rek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak lulus akreditasi□□ Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 15 bab yang disurvei, semua mendapat nilai kurang dari</li> <li>2. 60 %□□ Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 15 bab yang di survei hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %□□</li> <li>3. Akreditasi tingkat madya□□ Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 15 bab yang di survei ada 8 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 7 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %□□</li> <li>4. Akreditasi tingkat utama□□ Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 15 bab yang di survei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %□.</li> <li>5. Akreditasi tingkat paripurna□□ Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 15 bab yang di survei semua bab mendapat nilai minimal 80 %</li> </ol>	> 80 % (Paripurna)	80 %	90 %	90 %
	BOR	Bed Occupancy Rate (BOR) Yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, standar ideal : 60-85%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan ketersediaan ruangan dan tempat tidur yang ada di RSUD</li> <li>2. Kelebihan beban kerja dari para SDM di RSUD</li> </ol>	%	60-85%	60-85%	60-85%

PENYESUAIAN RENSTRA							
Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran	Penjelasan terhadap skala capaian	SATUAN TARGET	RENCANA TARGET		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	LOS	Average Length of Stay (Av LOS) Yaitu rata-rata lama perawatan seseorang, standar ideal : 6 – 9 hari.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semakin panjang LOS maka menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama (lama sembuh).</li> <li>Dari aspek ekonomis, semakin panjang LOS berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien</li> </ol>	hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari
	TOI	Tum Over Interval (TOI) Yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1 – 3 hari.	Semakin kecil angka TOI berarti semakin singkat saat TT menunggu pasien berikutnya. Hal ini berarti TT sangat produktif, apalagi TOI = 0 berarti TT tidak sempat kosong satu hari pun ini menguntungkan dari segi ekonomi. Tapi sangat merugikan bagi pasien karena TT tidak sempat disiapkan secara baik. Akibatnya kejadian nosokomial mungkin bisa meningkat	hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari
	BTO	Bed Tum Over (BTO) Yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai: 40-50 kali.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semakin tinggi BTO maka TT tersebut semakin sering digunakan bergantian.</li> <li>Mudah menimbulkan ketidakpuasan pasien</li> <li>Bisa menurunkan kinerja kualitas medis</li> <li>Bisa meningkatkan kejadian nosokomial karena tempat tidur tidak sempat dibersihkan atau disterilkan.</li> </ol>	kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali
	NDR	Net Death Rate (NDR) Yaitu angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiaptiap 1000 orang penderita keluar,	Angka yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000
	GDR	Gross Death Rate (GDR) Yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar	Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.	45/1000	45/1000	45/1000	45/1000
PENYESUAIAN RENSTRA							
	Indikator Kinerja		Penjelasan terhadap skala capaian		RENCANA TARGET		

Sasaran RENSTRA PD	Sasaran RENSTRA PD	Formulasi/rumus/cara menghitung kinerja sasaran		SATUAN TARGET	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022																									
Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	Nilai dalam Persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Cost Recovery= Realisasi Pendapatan dibagi realisasi pengeluaran. Nilai ideal CRR adalah > 60%.	Kemampuan mempertahankan hidup dan mengembangkan rumah sakit. 2. CRR harus di atas 60%. 3. Untuk mencapai cost recovery yang baik tentu saja tarifnya harus dihitung berdasarkan total biaya meliputi investasi dan biaya operasional (total cost) yang dikeluarkan.	%	>60%	>70%	>80%																									
	Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Jumlah indikator SPM yang memenuhi target minimal yang telah ditetapkan dibagi seluruh indikator SPM RS dikali seratus. Nilai ideal untuk indikator pelayanan minimal adalah 80%.	Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Berisi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pada bagian lampiran Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit terdapat SPM Rumah sakit. Target yang persyaratkan untuk SPM RSUD adalah di atas 80 %.	%	80%	80%	80%																									
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang. Capaian kinerja unit pelayanan minimal adalah baik (>78,61 %).	<p>Nilai persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Interval Konversi</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Permenpan – RB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Target yang direncanakan untuk kinerja unit pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin adalah di atas Nilai Interval Konversi lebih dari 76,61 % dengan kinerja yang diharapkan Baik sampai Sangat Baik</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik	%	>76,61 %	>76,61 %	>76,61 %
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																												
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																												
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																												
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																												
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik																												

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

## 1.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

### Kategorisasi Pencapaian Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Berhasil
2	76 % ≤ 90 %	Berhasil
3	66 % ≤ 75 %	Cukup Berhasil
4	51 % ≤ 85 %	Kurang Berhasil
5	≤ 50 %	Tidak Berhasil

Perhitungan capaian kinerja per sasaran:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

### Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja secara keseluruhan (capaian kinerja organisasi) dan memuat capaian kinerja persasaran.

NO	Sasaran	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit.	93,81	Sangat Berhasil	101,12 %	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	107,45	Sangat Berhasil	126,95 %	Sangat Berhasil

#### 3.1.1 Perbandingan antara realisasi dan target kinerja indikator kinerja utama

<b>Sasaran I</b>	<b>Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit.</b>
------------------	---

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Rumus Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	%	80%	92,99%	116,24	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
				(Sangat Berhasil)	
BOR	%	60%	63,71%	105,28%	

				(Sangat Berhasil)	_____
LOS	hari	6hari	4,79 hari	78,83% (Berhasil)	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$
TOI	hari	3 hari	2,73 hari	91% (Berhasil)	_____
BTO	kali	50 kali	48,55 kali	97,1% (Sangat Berhasil)	_____
NDR	permil	25/1000	23,78/ 1000	104,88% (Sangat Berhasil)	_____
GDR	permil	45/1000	38,91/ 1000	113,53% (Sangat Berhasil)	_____
<b>Capaian Kinerja Sasaran I</b>				<b>101,12 % → Sangat Berhasil</b>	

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Sasaran I**

**a. Persentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi**

Akreditasi rumah sakit merupakan proses kegiatan peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan terus menerus oleh rumah sakit. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor YM.02.02/IV/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit.

Pada tahun 2021 tidak dilaksanakan survei verifikasi akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Dengan adanya Surat Edaran tersebut yang menunda pelaksanaan survei akreditasi tetap diberikan sertifikat akreditasi dengan mengacu pada nilai tahun 2019, dimana RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, telah memenuhi syarat penilaian dan telah melaksanakan rekomendasi dari semua standar dan elemen penilaian pada masing-masing Pokja. Dari 15 Pokja dengan jumlah elemen penilaian sebanyak 1535 elemen, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mampu memenuhi dan melakukan upaya perencanaan perbaikan strategis (PPS) sebanyak 92,96% atau sebanyak 1427 elemen penilaian sudah memenuhi syarat penilaian dengan status akreditasi

Pariपुरna.

## **b. BOR**

Yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, standar: 60-85%. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur rumah sakit pada satu satuan waktu tertentu, dengan satuan %.

BOR sering disebut juga :

- *Percent of Occupancy*
- *Occupancy Percent*
- *Occupancy Ratio*

Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (>85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, sehingga perlu pengembangan rumah sakit/penambahan tempat tidur.

Tahun 2021 sebesar 63,71 % hal ini menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang ideal.

## **c. LOS**

Yaitu rata-rata lama perawatan seseorang, standar ideal : 6-9 hari.

AvLOS adalah rata-rata lamanya seorang pasien dirawat. Indikator ini dirumuskan sebagai rasio jumlah hari perawatan rumah sakit terhadap jumlah pasien keluar (hidup dan mati), satuan hari. Indikator ini di samping memberikan gambaran *tingkat efisiensi* juga dapat memberikan gambaran *mutu pelayanan*. Interetasi AvLOS tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersama sama dengan interetasi BOR, BTO dan TOI.

LOS dianjurkan serendah mungkin tanpa mempengaruhi kualitas pelayanan perawatan. Dari aspek medis, semakin panjang LOS maka menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama (lama sembuhnya). Dari aspek ekonomis, semakin panjang LOS berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien jadi diperlukan keseimbangan antara sudut pandang medis dan ekonomi untuk menentukan LOS yang ideal. Tahun 2021 LOS sebesar 4,79 hari, rata-rata lama perawatan pasien waktunya lebih singkat dikarenakan pada masa pandemi diupayakan untuk tidak terlalu lama untuk melakukan rawat inap.

## **d. TOI**

Yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1-3 hari. Indikator ini dirumuskan sebagai rasio selisih jumlah tempat tidur dikalikan hari dalam satuan waktu kemudian dikurangi hari perawatan rumahsakit terhadap jumlah pasien keluar (hidup dan mati). Memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin



besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur makin jelek. Semakin besar angka TOI, berarti semakin lama saat kosongnya TT. Hal ini berarti TT tidak produktif. Kondisi ini tidak menguntungkan dari segi ekonomi rumah sakit. Semakin kecil angka TOI berarti semakin singkat saat TT menunggu pasien berikutnya. Hal ini berarti TT sangat produktif, apalagi TOI = 0 berarti TT tidak sempat kosong satu hari pun ini menguntungkan dari segi ekonomi. Tapi sangat merugikan bagi pasien karena TT tidak sempat disiapkan secara baik. Akibatnya kejadian nosokomial mungkin bisa meningkat. Capaian TOI di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 sebesar 2,73 hari. Hal ini sudah ideal sesuai dengan yang target yang telah ditentukan.

#### **e. BTO**

Yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai: 40-50 kali. BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit dalam satuan waktu tertentu yang diukur sebagai rasio jumlah pasien keluar (hidup dan mati) terhadap jumlah tempat tidur, satuan kali. Indikator ini memberikan gambaran *tingkat efisiensi* dari pemakaian tempat tidur. Interpretasi indikator BTO dilakukan bersama-sama dengan TOI dan LOS. Semakin tinggi BTO maka TT tersebut semakin sering digunakan bergantian. Kondisi ini mudah menimbulkan ketidakpuasan pasien, bisa menurunkan kinerja kualitas medis, bisa meningkatkan kejadian nosokomial karena tempat tidur tidak sempat dibersihkan atau disterilkan. Realisasi BTO di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2020 sebesar 48,55 kali (ideal).

#### **f. NDR**

Yaitu angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 orang penderita keluar, angka yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000. Tahun 2021 sebesar 23,78 permil, artinya angka kematian bersih di rumah sakit berkategori baik karena terletak kurang dari 25 per 1000.

#### **g. GDR**

Yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar. Tahun 2021 sebesar 38,91 permil. Hal ini dipicu oleh banyaknya pasien covid-19 yang meninggal dunia.

➤ **Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Pagu Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian (dengan rumus <math>\frac{\text{realisasi}}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%</math>)</b>
Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	115.615.551.233	112.110.779.086	<b>96,97%</b>
Capaian Kinerja Keuangan			

**1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dan mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan yang merujuk pada Standar Teknis Pelayanan Rumah Sakit.

Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan.

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
1.	Program PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
1)	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah pembangunan RS beserta sarana dan prasarannya	17 Unit	17 Unit	100%

Maksud dari Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya adalah: Bertambahnya Sarana dan Prasarana pendukung layanan di Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yaitu: pembangunan pagar sudah termasuk jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan untuk kegiatan pembangunan fisik.

Pada sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya tersedia anggaran sebesar Rp. 323.9993676,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 322.410.110,00 (99,51%) dengan realisasi fisik 100%.

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	%	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	323.999.676	322.410.110	99,51	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	323.999.676	322.410.110	99,51	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	323.999.676	322.410.110	99,51	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	323.999.676	322.410.110	99,51	
	Backdrop	46 M2	M2	183.999.816	
	Spesifikasi : Spesifikasi : 2 sisi (HPL, 3D)				
	[#] Pembuatan Nurse Station Gedung 5 Lantai				
	Backdrop	35 M2	M2	139.999.860	
	Spesifikasi : Spesifikasi : 2 sisi (HPL, 3D)				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	748.719.234	745.873.319	99,62	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	748.719.234	745.873.319	99,62	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	748.719.234	745.873.319	99,62	
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	560.569.734	558.540.819	99,64	
	[#] Lanjutan Pembangunan pagar keliling			184.800.000	
	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang	112 M	m	184.800.000	
	Spesifikasi : Pondasi batu belah; sloof, kolom dan ringbalk beton bertulang; dinding bata merah; finishing plester dan acian dicat tembok setara Nodrop				
	[#] pembangunan gapura belakang RSUD			149.374.440	
	1 m" Pembangunan PAGAR DEPAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA	66 M	M"	149.374.440	
	[#] Penataan Jalan Lingkungan Menuju BSL 3			199.701.497	
	1 M2 PEKERJAAN PENGECORAN JALAN + LATA SIR (READY MIX)	352 M2	M2	199.701.497	
	[#] Pengawasan Lanjutan Pembangunan pagar keliling			5.544.000	

	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang Spesifikasi : Pondasi batu belah; sloof, kolom dan ringbalk beton bertulang; dinding bata merah; finishing plester dan acian dicat tembok setara Nodrop	112 M x 0.03 Paket	m	5.544.000		
	[#] Pengawasan pembangunan gapura belakang RSUD			4.481.233		
	1 m" Pembangunan PAGAR DEPAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA	66 M x 0.03 Paket	M"	4.481.233		
	[#] Pengawasan penataan jalan lingkungan menuju BSL 3			5.991.045		
	1 M2 PEKERJAAN PENGECORAN JALAN + LATASIR (READY MIX)	352 M2 x 0.03 Paket	M2	5.991.045		
	[#] Perencanaan Lanjutan Pembangunan pagar keliling			3.696.000		
	Pembangunan Pagar Samping dan Belakang Spesifikasi : Pondasi batu belah; sloof, kolom dan ringbalk beton bertulang; dinding bata merah; finishing plester dan acian dicat tembok setara Nodrop	112 M x 0.02 Paket	m	3.696.000		
	[#] Perencanaan pembangunan gapura belakang RSUD			2.987.489		
	1 m" Pembangunan PAGAR DEPAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA	66 M x 0.02 Paket	M"	2.987.489		
	[#] Perencanaan penataan jalan lingkungan menuju BSL 3			3.994.030		
	1 M2 PEKERJAAN PENGECORAN JALAN + LATASIR (READY MIX)	352 M2 x 0.02 Paket	M2	3.994.030		
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman			188.149.500	187.332.500	99,57
	[#] Pembuatan Taman RSUD			179.190.000		
	Penataan Halaman dan Taman	181 M2	M2	179.190.000		
	[#] Pengawasan Pembuatan Taman RSUD			5.375.700		
	Penataan Halaman dan Taman	181 M2 x 0.03 Paket	M2	5.375.700		
	[#] Perencanaan Pembuatan Taman RSUD			3.583.800		
	Penataan Halaman dan Taman	181 M2 x 0.02 Paket	M2	3.583.800		
<b>Grand Total :</b>				<b>1.072.718.910</b>		



No	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
2)	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembangan RS	2 Unit	2 Unit	2 Unit

Tujuan dari sub kegiatan pengembangan rumah sakit terdapat jumlah peningkatan kelas dan/atau perubahan jenis RSUD. Anggaran yang tersedia pada sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit adalah Rp. 77.098.087.000,00 bersumber dana DAK 2021. Realisasi anggaran sebesar Rp. 76.420.739.800,00 (92,12%) dengan realisasi fisik 100%.

Kode Rekening	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	%
5	BELANJA DAERAH		<b>77.098.087.000</b>	76.420.739.800	<b>92,12</b>
5.2	BELANJA MODAL		77.098.087.000	76.420.739.800	92,12
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		77.098.087.000	76.420.739.800	92,12
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		77.098.087.000	76.420.739.800	92,12
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		77.098.087.000	76.420.739.800	92,12
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan		77.098.087.000	76.420.739.800	92,12
	Pembangunan Gedung CSSD dan Ruang Perawatan Isolasi	1 Paket	Unit	35.698.087.000	
	Spesifikasi : (DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB sub bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi menu Ruang CSSD)				
	Pembangunan Gedung Operasi Bedah Sentral Tahap I	1 Paket	Unit	38.600.000.000	
	Spesifikasi : (DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB sub bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi menu Ruang Operasi)				
	Pengawasan Pembangunan Gedung CSSD dan Ruang Perawatan Isolasi	1 Paket	Kegiatan	1.400.000.000	
	Spesifikasi : (DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB sub bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi menu Ruang CSSD)				
	Pengawasan Pembangunan Gedung Operasi Bedah Sentral Tahap I	1 Paket	Kegiatan	1.400.000.000	
	Spesifikasi : (DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB sub bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi menu Ruang Operasi)				
<b>Grand Total :</b>			<b>77.098.087.000</b>		



No	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
----	--------------	-----------	---------------------------	------------------------------	--------------------------------

3)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas	14 Unit	14 Unit	100%
----	---	--	---------	---------	------

Maksud dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit 90 % sarana, prasarana dan peralatan alat kesehatan RS selalu berada dalam keadaan layak dan memenuhi syarat dan siap di gunakan.

Tujuan dari penyelenggaraan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit yaitu:

- a. Memperpanjang usia bangunan
- b. Menjaga fungsi bangunan agar sesuai dengan rencana penggunaan
- c. Menjamin keselamatan pengguna yang berada atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit.
- d. Menjaga kenyamanan pengunjung Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
- e. Pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit tersedia anggaran sebesar Rp. 2.041.578.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.032.681.500,00 (99,56%) dengan realisasi fisik 100%.

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	
5	BELANJA DAERAH	2.041.578.000	2.032.681.500	99,56	
5.2	BELANJA MODAL	2.041.578.000	2.032.681.500	99,56	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.041.578.000	2.032.681.500	99,56	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.041.578.000	2.032.681.500	99,56	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.041.578.000	2.032.681.500	99,56	
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.041.578.000	2.032.681.500	99,56	
	[#] Pemeliharaan gedung Bengkirai	199.320.000			
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit	151 M2	M2	199.320.000	
	[#] Pemeliharaan Gedung meranti dan akasia	105.600.000			
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit	80 M2	M2	105.600.000	



	[#] Pemeliharaan gedung radiologi			99.000.000		
	Rehab Bagunan Gedung	75 M2	M2	99.000.000		
	Rumah Sakit					
	[#] Pemeliharaan gedung lanan sindur			179.520.000		
	Rehab Bagunan Gedung	136 M2	M2	179.520.000		
	Rumah Sakit					
	[#] Pengawasan rehab gedung radiologi, Bengkirai, Meranti-Akasia, Sindur-Lanan, Gizi, Laboratorium, Koridor, Poliklinik, Logistik, Laundry, Ulin-Ramin, Jiwa.			58.330.800		
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit	1473 M2 x 0.03 Paket	M2	58.330.800		
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit	1473 M2 x 0.02 Paket	M2	38.887.200		
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit (Rehab instalasi laboratorium)	125 M2	M2	165.000.000		
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit (Rehab koridor)	136 M2	M2	179.520.000		
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit (Rehab ringan ruang poli RSUD)	151 M2	M2	199.320.000		
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit (Rehab ruang logistik)	121 M2	M2	159.720.000		
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit (Rehab Ruang Laundry)	113 M2	M2	149.160.000		
	[#] Rehab ruang ulin ramin			179.520.000		
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit	136 M2	M2	179.520.000		
	[#] Rehab untuk bangsal jiwa			149.160.000		
	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit	113 M2	M2	149.160.000		
	[#] Ruang instalasi gizi			179.520.000		

	Rehab Bagunan Gedung Rumah Sakit	136 M2	M2	179.520.000		
Grand Total :				2.041.578.000		

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
4)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	12 Jenis	12 Jenis	100%

Maksud dari Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu sarana, prasarana dan peralatan alat kesehatan RS selalu berada dalam keadaan layak. Tujuan dari penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu: tersedianya sarana melengkapi fasilitas layanan. Pada sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersedia anggaran sebesar Rp. 2.595.488.429,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.844.596.985,00 (96,27%) dengan realisasi fisik 100%.

Kode Rekening	Uraian			Anggaran	Realisasi Keuangan	%
5	BELANJA DAERAH			2.595.488.429	1.844.596.985	96,27
5.1	BELANJA OPERASI			1.915.993.600	1.844.596.985	96,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			1.915.993.600	1.844.596.985	96,27
5.1.02.01	Belanja Barang			1.915.993.600	1.844.596.985	96,27
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			1.915.993.600	1.844.596.985	96,27
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			1.100.000	1.100.000	100
	Mata pisau	5 Buah	buah	200.000	1.100.000	
	Spesifikasi : mesin potong rumput					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			273.282.000	272.766.876	99,81
	[#] DAU-Dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya - Penanganan Covid19			273.282.000		

	Bento						
	Spesifikasi : BENTO		Pcs	2.500	118.500.000		
	Manual chemical detergen enzymatik		Pouch	820.000	127.920.000		
	Spesifikasi : DETERGEN						
	Plastik Bento						
	Spesifikasi : PLASTIK		Pak	11.000	8.646.000		
	Plastik Merah Besar		Pack	35.000	1.386.000		
	Spesifikasi :						

	PLASTIK						
	Plastik Putih 60x100						
	Spesifikasi : PLASTIK		Buah	30.000	1.530.000		
	Sendok Plastik						
	Spesifikasi : SENDOK		Pcs	1.500	15.300.000		
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya				493.755.000	452.670.909	91,68
	Catridge TCM Covid 19						
	Spesifikasi : Reagen		Box	5.142.500	154.275.000		
	Neutralizer plus						
	Spesifikasi : NEUTRALIZER PLUS		Box	1.760.000	40.480.000		
	Plasma sterilizer agent						
	Spesifikasi : STERILIZER		Box	6.000.000	24.000.000		
	Rapid Test Antigen						
	Spesifikasi : ANTIGEN		Pcs	55.000	275.000.000		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura				2.400.000	2.400.000	100
	Garam curah						
	Spesifikasi : GARAM		Kg	10.000	2.400.000		
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan				1.145.456.600	1.115.659.200	97,40
	Disposable Surgical Face Mask 3 Fly Earloop						
			Box	43.847	131.541.000		

	Spesifikasi : MASKER						
	Disposable Surgical Face Mask 3 Fly Headloop		Box	47.910	143.730.000		
	Spesifikasi : MASKER						
	Gaun/ Jas petugas		Lembar	350.000	199.150.000		
	Spesifikasi : GAUN/JAS						
	Hazmat Boho		Pcs	126.500	316.250.000		
	Spesifikasi : BAJU HAZMAT						
	Masker N95 Onemed		Box	275.000	192.500.000		
	Spesifikasi : MASKER						
	Nurse Cup		Box	130.000	26.000.000		
	Spesifikasi : TOPI BEDAH						
	Plastik Apron		Box	550.000	27.500.000		
	Spesifikasi : PLASTIK						
	Sarung Tangan		Box	220.000	15.400.000		

	Nitrile						
	Spesifikasi : SARUNG TANGAN						
	Sarung Tangan Non Steril		Box	220.000	88.000.000		
	Spesifikasi : 50 pairs/box						
	Sarung Tangan Steril		Pcs	8.800	5.385.600		
	Spesifikasi : SARUNG TANGAN						
5.2	BELANJA MODAL				679.494.829		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				679.494.829		
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar				79.999.975		
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu				79.999.975		
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa				79.999.975	76.670.000	95,84
	Pompa air groundfos air bersih	1 Unit	Unit	18.181.810	19.999.991		
	Spesifikasi : 1x220240V,50Hz						
	Pompa air groundfos limbah	1 Unit	Unit	18.181.810	19.999.991		
	Spesifikasi : 1x220240V,50Hz						

	Pompa groundfos sumur dalam	1 Unit	Unit	36.363.630	39.999.993		
	Spesifikasi :						
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				7.700.000	7.700.000	100
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin				7.700.000	7.700.000	100
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service				7.700.000	7.700.000	100
	Jet cleaner/mesin pembersih AC <sup>2</sup>		Unit	3.500.000	7.700.000		
	Unit Spesifikasi :						
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				389.449.854		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				389.449.854		
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih				13.000.000	13.000.000	100
	[#] DAU-Dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya - Penanganan Covid19				13.000.000		
	Pengadaan mesin pengering		Unit	6.500.000	13.000.000		
	Spesifikasi : MESIN PENERING (laundry)						
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin				165.749.958	153.120.000	92,38
	AC 2 PK	3 Unit	Unit	8.181.810	26.999.973		
	Spesifikasi :						
	A.C. Split	3 Set	set	4.545.450	14.999.985		
	Spesifikasi : 1 PK						
	Kulkas	45 Buah	Buah	2.500.000	123.750.000		
	Spesifikasi : 1 pintu						
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				191.449.896	190.597.000	99,55
	Televisi	68 Set	set	3.977.270	131.249.910		
	Spesifikasi : LED 43"						
	Tempat Sampah	7 Buah	buah	6.000.000	46.200.000		
	Spesifikasi :						
	Tempat Sampah 120 Liter (Pedal)	14 Buah	Buah	909.090	13.999.986		
	Spesifikasi :						
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran				19.250.000	19.250.000	100
	[#] Pengadaan Sarana Pendukung Rumah Sakit				19.250.000		
	Alat Pemadam/Portable	5 Unit	Unit	3.500.000	19.250.000		
	Spesifikasi : Tabung Alat						

	pemadam Api Ringan						
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				202.345.000	201.674.997	99,67
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran				202.345.000	201.674.997	99,67
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum				202.345.000	201.674.997	99,67
	[#] DAU-Dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya - Penanganan Covid19				202.345.000		
	Flowmeter						
	Spesifikasi : ALAT UKUR		Buah	945.000	94.500.000		
	Mini Microcentrifuge (Spindown)		Unit	8.360.000	16.720.000		
	Spesifikasi : ALAT MICROCENTRIFUGE						
	Regulator Tabung						
	Spesifikasi : REGULATOR		Buah	405.000	20.250.000		
	Three Way						
	Spesifikasi : KONEKTOR INFUS		Buah	2.025.000	70.875.000		
Grand Total :					2.595.488.429		

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
5)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alkes	268 Jenis	264 Jenis	98,50%

Maksud dari Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Tujuan dari penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu:

- a. Dalam rangka pengembangan pelayanan rujukan sub spesialisasi khususnya pelayanan penunjang diagnostik, dalam upaya tercapainya standar pelayanan RS.
- b. Pemenuhan dan ketersediaan, sarana, prasarana dan alat kesehatan merupakan faktor penting di fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- d. Pada sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersedia anggaran sebesar Rp. 21.125.158.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 19.410.239.313,00 (91,88%) dengan realisasi fisik 100%.

Kode Rekening	Uraian			Anggaran	Realisasi Keuangan	%
5	BELANJA DAERAH			21.125.158.000	19.410.239.313	91,88
5.2	BELANJA MODAL			21.125.158.000	19.410.239.313	91,88
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			21.125.158.000	19.410.239.313	91,88
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan			21.125.158.000	19.410.239.313	91,88
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran			21.125.158.000	19.410.239.313	91,88
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum			21.125.158.000	19.410.239.313	91,88
	[#] DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Ruang CSSD			2.000.000.000		
	Autoclave	1 Unit	Unit	187.841.700	187.841.700	
	Sterilisator Suhu Rendah / Low Term Sterilizer	1 Unit	Unit	1.605.398.300	1.605.398.300	
	Trolley Barang Bersih	8 Unit	Unit	8.360.000	66.880.000	

	Ultra Sonik / Ultrasonic cleaner for medical instruments	1 Unit	Unit	139.880.000	139.880.000	
--	--	--------	------	-------------	-------------	--

	[#] DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Ruang Radiologi				10.000.000.000		
	Apron	1 Unit	Unit	7.513.350	7.513.350		
	Computer Radiography / CR	1 Unit	Unit	336.050.100	336.050.100		
	Digital Radiography / DR	1 Unit	Unit	853.064.500	853.064.500		
	Mammografi	1 Unit	Unit	1.189.358.636	1.189.358.636		
	Mobile X-Ray	1 Unit	Unit	2.564.283.475	2.564.283.475		
	PACS-RIS	1 Unit	Unit	4.746.219.114	4.746.219.114		
	Printer Processing Film / Paper	1 Unit	Unit	95.760.600	95.760.600		
	Survey Meter	1 Unit	Unit	207.750.225	207.750.225		
	[#] DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Ruang Bersalin				2.000.000.000		
	CTG / Cardiotocography	1 Unit	Unit	99.450.318	99.450.318		
	Incubator Transport	1 Unit	Unit	559.170.096	559.170.096		
	Infusion Pump	7 Unit	Unit	19.964.720	139.753.040		
	Tensimeter /Sphygmomanometer	8 Unit	Unit	26.025.000	208.200.000		
	USG 2D	2 Unit	Unit	205.664.000	411.328.000		
	USG 3D/4D	1 Unit	Unit	582.098.546	582.098.546		
	[#] DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Ruang ICU				2.000.000.000		
	Bed Side Monitor/ Pasien Monitor	2 Unit	Unit	199.674.215	399.348.430		
	Icu Bed / Tempat Tidur Icu (Bed Electric)	11 Unit	Unit	116.910.786	1.286.018.646		



	Infus Pump	10 Unit	Unit	19.964.720	199.647.200		
	Nebulizer	4 Unit	Unit	8.781.710	35.126.840		
	Suction Pump Portable / Aspirator /Vacuum	3 Unit	Unit	26.619.628	79.858.884		
	[#] DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Ruang Laboratorium				2.000.000.000		
	Blood Gas Analyzer	1 Unit	Unit	221.700.000	221.700.000		
	Imunologi Analyzer	1 Unit	Unit	730.300.000	730.300.000		
	Urine Particle Analyzer	1 Unit	Unit	1.048.000.000	1.048.000.000		
	[#] DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Ruang NICU				1.125.158.000		
	Infant Resusitator	4 Unit	Unit	281.288.784	1.125.155.136		
	Infant Resusitator	1 Unit	Rupiah	2.864	2.864		
	Spesifikasi : Sisa Dana DAK Fisik						
	[#] DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Ruang Operasi				2.000.000.000		
	Bed Pasien Set	11 Unit	Unit	51.247.300	563.720.300		
	Laryngoscope Set	6 Unit	Unit	13.102.000	78.612.000		
	Operating Lamp Ceilling Type	1 Unit	Unit	438.861.700	438.861.700		
	Operating Table Universal	1 Unit	Unit	879.500.000	879.500.000		
	Syringe Pump	2 Unit	Unit	19.653.000	39.306.000		
Grand Total :						21.125.158.000	

--

No.	Uraian	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>100%</b>
1)	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah perawatan dan pengobatan bagi pasien tidak mampu	135 OK	135 OK	100%

**Maksud:**

Memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin, tidak mampu atau pasien terlantar  
**Tujuan:**

- a. Untuk masyarakat tidak mampu, yang meliputi perawatan dan pengobatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, perawatan dan pengobatan pada unit rawat inap kelas 3 (tiga) rumah sakit milik Pemerintah Daerah, yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan;
- b. Masyarakat yang menjalani perawatan dan pengobatan pada unit rawat inap kelas 3 (tiga) rumah sakit;
- c. Masyarakat yang menjadi objek sasaran program pada Dinas.

Dari anggaran yang disediakan sebanyak Rp.270.000.000 terealisasi sebesar Rp. 242.615.882 (89,86%)

Kode Rekening	Uraian				Anggaran	Realisasi Keuangan	%
5	BELANJA DAERAH				270.000.027	242.615.882	89,86
5.1	BELANJA OPERASI				270.000.027	242.615.882	89,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				270.000.027	242.615.882	89,86
5.1.02.01	Belanja Barang				270.000.027	242.615.882	89,86
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				270.000.027	242.615.882	89,86
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat				270.000.027	242.615.882	89,86
	[-] Penyediaan Obat-obatan untuk Pasien Tidak Mampu						
	Obat-obatan	135 Orang	Paket	1.818.182	24.545.457	270.000.027	
	Spesifikasi : pelayanan pengobatan tidak mampu						
Grand Total :					270.000.027		

No.	Uraian	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
No.	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 Jenis	1 Jenis	100%

1)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
----	--------------	--	---	------------	------------	------

Maksud dari Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan adalah mewujudkan pelaksanaan penggunaan aplikasi SIM-RS di semua unit pelayanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Tujuan dari penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan yaitu:

- a. Memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat.
- b. Teknologi yang dirancang khusus untuk membantu proses pengolahan data di rumah sakit adalah teknologi informasi berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) rumah sakit.
- c. Untuk meningkatkan keakuratan informasi
- d. Untuk mempermudah koordinasi antar unit pelayanan di RS
- e. Untuk mempercepat pengambilan keputusan
- f. Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik
- g. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

Pada sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan tersedia anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 49.555.000,00 (99,11%) dengan realisasi fisik 100%.

Kode Rekening	Uraian			Anggaran	Realisasi Keuangan	%
5	BELANJA DAERAH			50.000.000	49.555.000	99,11
5.1	BELANJA OPERASI			50.000.000	49.555.000	99,11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000	49.555.000	99,11
5.1.02.02	Belanja Jasa			50.000.000	49.555.000	99,11
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor			50.000.000	49.555.000	99,11
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			50.000.000	49.555.000	99,11
	[#] Pengembangan Aplikasi SIMBLUD RSUD			50.000.000		
	Satuan biaya tenaga kerja	2 Orang	Orang / Bulan	5.000.000	50.000.000	
	Spesifikasi : Programmer Lanjutan (Advance Beginner Programmer)	x 5 Bulan				
Grand Total :				50.000.000		

## 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dan mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan yang merujuk pada Standar Teknis Pelayanan Rumah Sakit.

Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan.

2.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Cakupan Kemitraan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 jenis</b>	<b>100%</b>
1)	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga yang mengikuti penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan	2 OK	2 OK	100%

Maksud dari Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai dalam rangka pengembangan Sumber daya manusia berkelanjutan.

Tujuan dari penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di RS.
- b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021;
- c. Memberikan informasi tentang rencana kerja dan program penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di RSUD Sultab Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021.
- d. Pada sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tersedia anggaran sebesar Rp. 30.420.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 14.460.000,00 (47,53%) dengan realisasi fisik 100%.

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
5	BELANJA DAERAH	30.420.000	14.460.000	47,53
5.1	BELANJA OPERASI	30.420.000	14.460.000	47,53
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.420.000	14.460.000	47,53
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.500.000	9.000.000	85,71
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000	9.000.000	85,71
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.500.000	9.000.000	85,71

	[#] Bimbingan Teknis Non Tenaga Kesehatan				7.000.000		
	Satuan biaya Diklat	2 Orang	Peserta	3.500.000	7.000.000		
	Spesifikasi : Diklat Teknis	/ Kegiatan					
	[#] Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan				3.500.000		
	Satuan biaya Diklat	1 Orang	Peserta	3.500.000	3.500.000		
	Spesifikasi : Spesifikasi : Diklat Teknis	/ Kegiatan					
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				19.920.000	5.460.000	27,41
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				19.920.000	5.460.000	27,41
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				19.920.000	5.460.000	27,41
	[#] Bimbingan Teknis Non Tenaga Kesehatan				13.280.000		
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Orang x	Orang Per Hari	160.000	1.280.000		
	Spesifikasi : Uang Harian DIKLAT di Wilayah Provinsi D.K.I Jakarta	4 Hari					
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Orang x	Orang / Kali	1.700.000	6.800.000		
	Spesifikasi : Transportasi ke Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah - Udara/ Darat	2 Kali					
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Orang x	Per Hari	650.000	5.200.000		
	Spesifikasi : Penginapan di Luar Provinsi Kalimantan	4 Hari					
	Tengah - Eselon IV/ Golongan III/II/I						
	[#] Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan				6.640.000		
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang Per Hari	160.000	640.000		

	Spesifikasi : Uang Harian DIKLAT di Wilayah Provinsi D.K.I Jakarta						
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	Spesifikasi : Transportasi ke Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah - Udara/ Darat	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	1.700.000	3.400.000		
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	Spesifikasi : Penginapan di Luar Provinsi Kalimantan Tengah - Eselon IV/ Golongan III/II/I	1 Orang x 4 Hari	Per Hari	650.000	2.600.000		
Grand Total :					30.420.000		

No.	Kegiatan	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>100%</b>
2)	Sub Kegiatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	92 Orang	92 Orang	100%



Maksud:

Kecukupan Sumber Daya

Manusia di ruang sakit

Tujuan:

Upaya pemenuhan standar dan spesifikasi SDM RS sebagaimana hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK).

Pada tahun 2021, anggaran di subkegiatan ini dialokasikan pada pemenuhan sumber daya dalam rangka penanganan covid19 khususnya bagi SDM Non ASN. Dari anggaran Rp. 11.332.100.867 terealisasi Rp. 10.365.595.180 (91,47%).

Kode Rekening	Uraian			Anggaran	Realisasi Keuangan	%
5	BELANJA DAERAH			11.332.100.867	10.365.595.180	91,47
5.1	BELANJA OPERASI			11.332.100.867	10.365.595.180	91,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			11.332.100.867	10.365.595.180	91,47
5.1.02.02	Belanja Jasa			11.332.100.867	10.365.595.180	91,47
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor			11.332.100.867	10.365.595.180	91,47
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			1.138.860.000	859.854.000	75,50
	[#] DAUDukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya- Penanganan Covid19			1.138.860.000		
	[-] Honor Relawan Non ASN-Non Nakes					
	Satuan Biaya Jasa Tenaga Kerja	3 Orang x 4	Orang / Bulan	3.309.000	39.708.000	

	Spesifikasi : Relawan Penanganan COVID-19 (Non Tenaga Kesehatan Pendidikan S1)	Bulan					
	Satuan Biaya Jasa Tenaga Kerja						
	Spesifikasi : Relawan Penanganan COVID-19 (Non Tenaga Kesehatan Pendidikan S1)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.309.000	79.416.000		
	Satuan Biaya Jasa Tenaga Kerja						
	Spesifikasi : Relawan Penanganan COVID-19 (Non Tenaga Kesehatan Pendidikan SMA)	15 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	3.030.000	181.800.000		

	Satuan Biaya Jasa Tenaga Kerja						
	Spesifikasi : Relawan Penanganan COVID-19 (Non Tenaga Kesehatan Pendidikan DIII)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.168.000	38.016.000		
	Satuan Biaya Jasa Tenaga Kerja						
	Spesifikasi : Relawan Penanganan COVID-19 (Non Tenaga Kesehatan Pendidikan SMA)	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.030.000	799.920.000		

5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				124.848.000	124.848.000	100
	Satuan Biaya Jasa Tenaga Kerja						
	Spesifikasi : Relawan Penanganan COVID-19 (Non Tenaga Kesehatan Pendidikan SD)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.601.000	124.848.000		
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19				10.068.392.867	9.380.893.180	93,17
	[#] DAUDukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya - Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid19				10.068.392.867		
	[-] Insentif Nakes Lainnya						
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan	15 Orang x 4	Orang / Bulan	5.000.000	300.000.000		

	Covid-19	Bulan					
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Lainnya						
	[-] Insentif Tahun 2021						
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 - Non ASN	10 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000	800.000.000		

	Spesifikasi : Dokter Umum/Dokter Gigi						
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 - Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.000.000	360.000.000		
	Spesifikasi : Dokter Spesialis						
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 - Non ASN	46 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500.000	4.140.000.000		
	Spesifikasi : Perawat/Bidan						
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 - Non ASN	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	600.000.000		
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Lainnya						
	[-] Membayar Tunggakan Insentif Tahun 2020						
	Insentif Tenaga Kesehatan - Non ASN						
	Spesifikasi : Utang atas Kinerja Tahun 2020 pada RSSI (dokter spesialis)	1 Tahun	Tahun	91.071.430	91.071.430		
	Insentif Tenaga Kesehatan - Non ASN	1 Tahun	Tahun	410.000.000	410.000.000		
	Spesifikasi : Utang atas Kinerja Tahun 2020 pada RSSI (Nakes Lainnya)						
	Insentif Tenaga Kesehatan - Non ASN	1 Tahun	Tahun	1.692.321.436	1.692.321.436		

	Spesifikasi : Utang atas Kinerja Tahun 2020 pada RSSI (perawat/bidan)						
	Insentif Tenaga Kesehatan - Non ASN	1 Tahun	Tahun	235.000.001	235.000.001		
	Spesifikasi : Utang atas Kinerja Tahun 2020 pada RSSI (dokter umum)						
	[-] Nakes: Perawat/Bidan						
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	48 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	7.500.000	1.440.000.000		
	Spesifikasi : Perawat/Bidan RSUD						
Grand Total :					11.332.100.867		

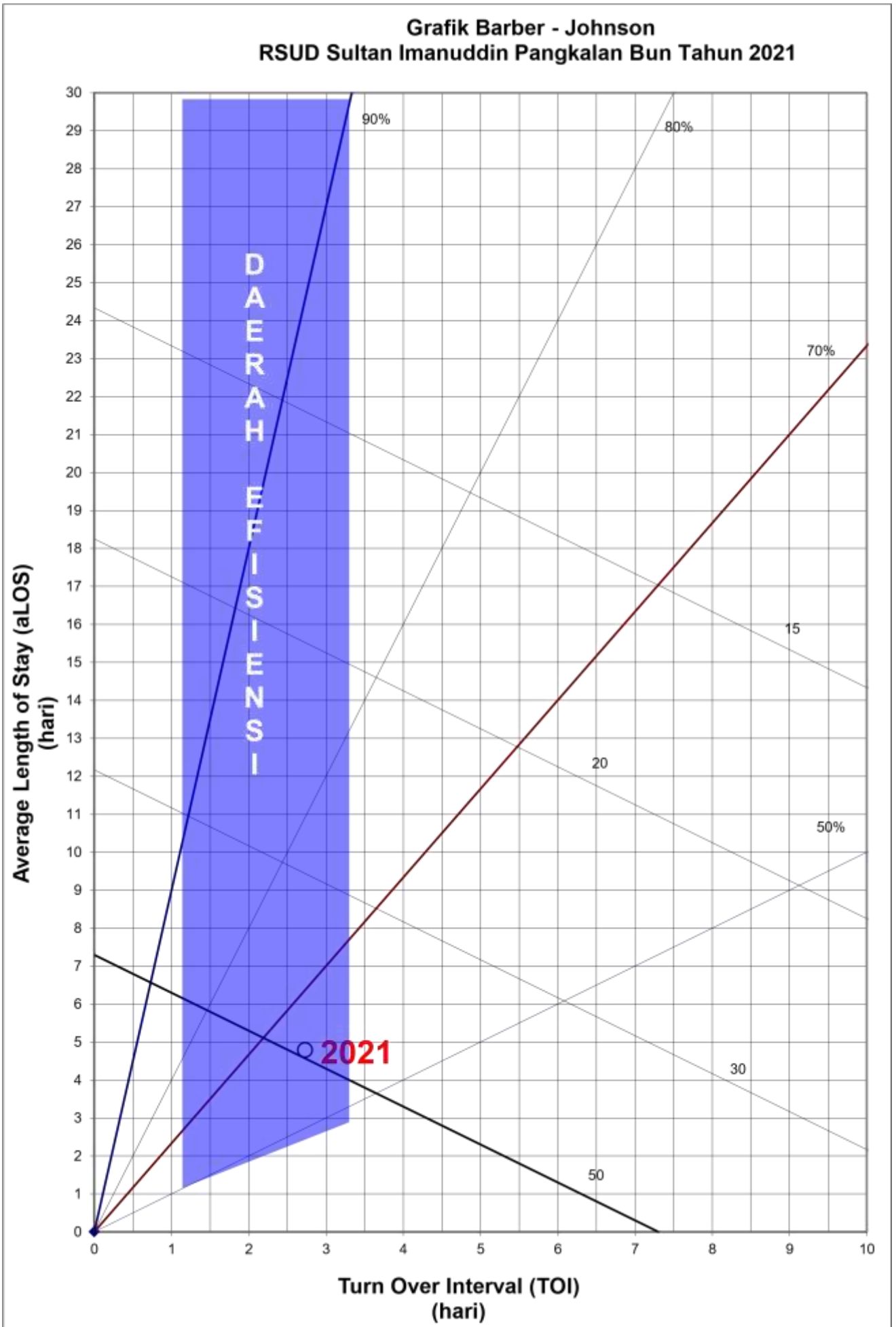
➤ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Adapun tujuan rumah sakit, rumah sakit mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Efisiensi merupakan salah satu parameter indikator kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja suatu organisasi dalam hal ini rumah sakit Efisiensi dapat digunakan untuk pengalokasian sumber daya dengan lebih tepat sasaran sehingga sumber daya yang datang dapat dioptimalkan. Pemanfaatan sumber daya yang berdaya guna dan berhasil guna juga berpengaruh terhadap efisiensi rumahsakit.

Oleh karena itu, nilai efisiensi sangat penting untuk diukur dan diketahui oleh manajemen rumah sakit, untuk mengukur tingkat efisiensi rumah sakit yang biasa digunakan adalah grafik Barber Johnson. Dalam grafik ini terdapat suatu daerah yang disebut sebagai daerah efisien.

Grafik Barber Johnson sebagai salah satu indikator efisiensi pengolahan rumah sakit berguna untuk membandingkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur, memonitor perkembangan target efisiensi penggunaan tempat tidur dan membandingkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur antar unit. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi yaitu dengan menggunakan parameter BOR (*Bed Occupancy Rate*), LOS (*Length of Stay*), TOI (*Turn Over Interval*), dan BTO (*Bed Turn Over*). Apabila titik temu keempat garis tersebut berada pada daerah efisien, maka pemanfaatan tempat tidur sudah efisien, begitu pula sebaliknya. Grafik Barber Johnson memiliki indikator yang sama dengan yang telah ditetapkan, namun memiliki standar yang berbeda. Standar yaitu BOR 60-85%, ALOS 6-9 hari, TOI 1-3 hari, dan BTO 40-50 kali.



**Gambar 4. Grafik Barber Johnson RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021**

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa sumbu x dan sumbu y yang menghubungkan antar variabel masih dalam batasan efisien. Titik temu keempat garis tersebut berada pada daerah efisien.

Upaya mempertahankan nilai efisiensi sumber daya tersebut antara lain:

1. Terus mempromosikan Rumah Sakit lebih luas lagi agar ada peningkatan dalam jumlah pasien atau dengan pengalokasian tempat tidur.
2. Penerapan dari penetapan standar pelayanan yang disepakati. Standar pelayanan ini mencakup indikasi perawatan rumah sakit, prosedur dan proses pelayanan yang selanjutnya harus dilaksanakan.
3. Melakukan manajemen organisasi yang baik yaitu menyesuaikan besarnya kegiatan dan beban kerja rumah sakit dan pembagian tugas.
4. Melihat laporan statistik agar pemakaian tempat tidur bisa terkontrol dan cara pengalokasian tempat tidur.
5. Membuat laporan statistik rumah sakit teratur agar dapat digunakan untuk mengontrol pemakaian tempat tidur.
6. Pemanfaatan efisiensi sumber daya agar berjalan dengan baik maka perlu dilakukan : Peningkatan pelatihan SDM, pembuatan rekapitulasi sensus harian rawat inap secara rutin, membuat SPO tentang cara pembuatan laporan statistik.
7. Meningkatkan sistem SIMRS dan lebih memanfaatkannya.

<b>Sasaran II</b>	<b>Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.</b>
-------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran II, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun 2021			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (dengan rumus realisasi dibagi target kali 100%)
Cost Recovery Rate (CRR)	%	>60%	99,64 %	116,06 (Sangat Berhasil)
Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	80%	86,18%	107,72 (Sangat Berhasil)



Indeks Kepuasan Masyarakat	%	>76,61 %	82,03%	107,07 (Berhasil)
<b>Capaian Kinerja Sasaran II</b>				<b>126,95 % → Sangat Berhasil</b>

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Sasaran II**

**a. Cost Recovery Rate (CRR)**

*Cost Recovery Rate* (CRR) adalah indikator efisiensi dan merupakan tingkat kemampuan mengembalikan biaya dari suatu unit usaha dalam periode tertentu. *Cost Recovery Rate* (CRR) merupakan perbandingan antara total pendapatan dan faktor biaya berdampak terhadap CRR. Rumah sakit harus dapat mempertahankan hidup dan mengembangkan rumah sakit dengan biaya mandiri secara bertahap yaitu:

- CRR harus di atas 60%.
- Harus sudah menyusun bisnis plan yang baik.
- Untuk mencapai cost recovery yang baik tentu saja tarifnya harus dihitung berdasarkan total biaya meliputi investasi dan biaya operasional (total cost) yang dikeluarkan.

Sumber dana di rumah sakit merupakan salah satu penentu keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemampuan keuangan rumah sakit sangat berpengaruh terhadap pengembangan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layannya. Pada dasarnya kemampuan keuangan rumah sakit sangat tergantung pada besarnya penerimaan fungsional rumah sakit, jumlah pengeluaran, serta subsidi yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan fungsional rumah sakit dapat disebabkan karena kenaikan volume kegiatan, kenaikan tarif dan perbaikan manajemen.

Peningkatan *Cost Recovery Rate* (CRR), yaitu nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Rumah Sakit menutup biayanya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (*Revenue*). Secara singkat CRR adalah perbandingan antara seluruh pendapatan dengan seluruh biaya produksi. Proses ini menghasilkan seberapa besar subsidi diberikan kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien askes.

Perhitungan cost recovery rate (CRR) digunakan untuk mengetahui berapa besar yang telah diperoleh kembali dari keseluruhan total biaya yang telah

dikeluarkan untuk pengadaan suatu barang investasi atau dalam melaksanakan kegiatan.

Rumus CRR yaitu Total Realisasi Pendapatan dibagi Total Realisasi Belanja. Untuk mencapai cost recovery yang baik dengan menghitung berdasarkan total biaya meliputi investasi dan biaya operasional (*total cost*) yang dikeluarkan.

$$CRR \text{ (Cost Recovery Rate)} = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

Beberapa macam cost recovery rate yaitu:

1. CRR jangka pendek, hanya menutup biaya operasional saja tanpa memikirkan biaya investasi, CRR ini hanya mengalokasikan waktu kurang 1 Tahun.
2. CRR jangka menengah, dapat menutup biaya operasional dan mengembangkan biaya investasi atau mengganti alat yang tidak dapat terpakai. CRR ini mengalokasikan waktu 5 tahun.
3. CRR jangka panjang, dapat menutup biaya operasional dan biaya investasi. CRR mengalokasikan waktu lebih dari 5 tahun.

CRR kurang dari 100% menyatakan bahwa nilai tersebut belum dapat membiayai biaya produksinya. CRR sama dengan 100% menyatakan bahwa nilai tersebut sama antara biaya produksi dan pendapatannya dan CRR lebih 100% menyatakan bahwa pendapatan bagian tersebut telah melampaui biaya produksinya atau telah mendapat laba.

Manfaat yang dapat diperoleh melalui analisis Cost Recovery, adalah:

1. Sebagai informasi dalam kebijakan tarif, apakah akan menguntungkan atau malah sebaiknya.
2. Perencanaan anggaran, digunakan untuk:
  - a. Merencanakan biaya satuan;
  - b. Memproyeksikan tingkat utilitas pelayanan;
  - c. Patokan dalam menentukan kebutuhan elemen biaya;
3. Control anggaran, sebagai alat untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional, misalnya untuk melihat penggunaan biaya.
4. Evaluasi dan pertanggungjawaban, digunakan untuk menilai *performance* keuangan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan.
5. Untuk mengetahui berapa tarif yang tepat untuk menjamin cost recovery, sehingga dengan volume yang diperoleh biasa dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan subsidi silang.

$$\begin{array}{l} \text{Rp289.478.592.169,00} \\ \text{Per 31/12/2021 =} \qquad \qquad \qquad = 99,64\% \\ \text{Rp290.521.486.155,48} \end{array}$$

CRR per 31 Des 2021 = 99,64 %

Menurut SPM RSUD Sultan Imanuddin berdasarkan Perbup 13 Tahun 2013 tentang SPM standar adalah 60%, sudah di atas Standar.

**Tabel 9. Capaian Cost Recovery Rate RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun**

No	Tahun	Satuan	Target	Perhitungan (Total Realisasi Pendapatan)/(Total Realisasi Belanja)	Capaian
1.	2017	%	≥60%	Rp. 62.570.315.255,65	43,34%
				Rp. 144.361.630.848,23	
2.	2018	%	≥60%	Rp. 80.353.251.760,98	55,74%
				Rp. 144.150.859.702,84	
3.	2019	%	≥60%	Rp. 79.723.080.765,43	51,20%
				Rp. 155.723.776.448,12	
4.	2020	%	≥60%	Rp. 123.250.695.234,25	62,26%
				Rp. 197.971.417.881,64	
5.	2021	%	≥60%	Rp.289.478.592.169,00	99,64%
				Rp.290.521.486.155,48	

Tahun 2021 Nilai CRR sebesar 99,64% jauh di atas standar yaitu 60% (sesuai target dalam Standar Pelayanan Minimal) dan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya percepatan penyelesaian pembayaran klaim Covid-19 untuk pelayanan Tahun 2020 dan Tahun 2021 oleh Kemenkes R.I. khususnya pada Bulan Desember 2021 yang terdapat pembayaran Klaim Covid-19 sebesar Rp105.623.018.555,00. Realisasi klaim tersebut didominasi oleh klaim pelayanan Tahun 2020 reguler, dispute dan pending.

#### **b. Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses hasil dan atau manfaat pelayanan.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Berisi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pada bagian lampiran Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit terdapat SPM Rumah sakit. Target yang persyaratkan untuk SPM RSUD adalah di atas 80%. Pada tahun 2021 pencapaian SPM RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 86,18%.

Total SPM Tahun 2021 = 152 SPM

Yang tercapai = 131

Yang belum tercapai = 21

**Tabel 10. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal → Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit**

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		No.	STANDAR	Capaian		Capaian		
	Jenis	Uraian			Capaian 2020	T/BT	Capaian 2021	T/BT	
Pelayanan Gawat Darurat	Input	1.	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	1	100%	100	T	100%	T
		2.	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku : ATLS/BTLS/ ACLS/PPGD	2	100%	87%	BT	100%	T
		3.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	3	1 tim	100%	T	100%	T
	Proses	4.	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	4	24 Jam	100%	T	100%	T
		5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5	≤ 5 menit dilayani setelah pasien datang	100%	T	100%	T
		6.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	6	100%	100%	T	100%	T
	Output	7.	Kematian pasien (≤ 8 jam) di IGD	7	≤ 2 per seribu (0,2%)	1,24%	BT	1.51%	BT
	Outcome	8.	Kepuasan Pelanggan	8	≥70%	80%	T	85.19%	T
Pelayanan Rawat Jalan	Input	1.	Ketersediaan Pelayanan	9	Minimal sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS	100%	T	100%	T
		2.	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	10	100% Dokter Spesialis	100%	T	100%	T
	Proses	3.	Jam buka pelayanan dengan ketentuan	11	08.00 s.d. 13.00, setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 s.d. 11.00	100%	T	57.49%	BT
		4.	Waktu tunggu di rawat jalan	12	≤60 menit	100%	T	100%	T
	Outcome	5.	Kepuasan Pelanggan	13	≥90%	93%	T	91%	T
Pelayanan Rawat Inap	Input	1.	Ketersediaan Pelayanan	14	Sesuai jenis & kelas RS	100%	T	100%	T

	2.	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	15	Sesuai pola ketenagaan, jenis & kelas RS	100%	T	100%	T
	3.	Tempat tidur dengan pengaman	16	100%	90%	BT	100%	T
	4.	Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	17	100%	95%	BT	100%	T

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		No.	STANDAR	Capaian		Capaian			
	Jenis	Uraian			Capaian 2020	T/BT	Capaian 2021	T/BT		
Jenis Pelayanan	Proses	5.	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	18	100%	100%	T	100%	T	
		6.	Jam Visite Dokter Spesialis	19	08.00 s/d 14.00	92.25%	T	96.25%	T	
		7.	Kejadian infeksi pasca operasi	20	≤1,5%	0%	T	0.14%	T	
		8.	Kejadian Infeksi Nosokomial	21	≤21%	2,30	T	5.71%	T	
		9.	Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	22	100%	100%	T	100%	T	
	Output	10.	Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	23	≤5%	4,67%	T	0.67%	T	
		11.	Kematian pasien > 48 jam	24	≤ 0,24%	0,49%	BT	0.023%	T	
	Outcome	12.	Kepuasan pelanggan	25	≥ 90%	87%	T	90.02%	T	
	Pelayanan Bedah Sentral	Input	1.	Ketersediaan tim bedah	26	Sesuai dengan kelas RS	100%	T	100%	T
			2.	Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi	27	Sesuai dengan kelas RS	100%	T	100%	T
			3.	Kemampuan melakukan tindakan operasi	28	Sesuai dengan kelas RS	100%	T	100%	T
		Proses	4.	Waktu tunggu operasi elektif	29	≤2 hari	98%	BT	100%	T
5.			Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	30	100%	100%	T	100%	T	
6.			Tidak adanya kejadian operasi salah orang	31	100%	100%	T	100%	T	
7.			Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	32	100%	100%	T	100%	T	
8.			Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	33	100%	100%	T	100%	T	
9.			Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>	34	≤6%	0%	T	0%	T	
Output		10.	Kejadian kematian di meja operasi	35	≤1%	0,00%		0%	T	

	Outcome	11.	Kepuasan pelanggan	36	≥80%	90%		86.71%	T
Persalinan dan Perinatologi	Input	1.	Pemberi pelayanan persalinan normal	37	Dokter Sp.OG, Dokter umum, & bidan	100%	T	100%	T
		2.	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	38	Tim PONEK terlatih	100%	T	100%	T
		3.	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	39	Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, Dokter Sp.An	100%	T	100%	T

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		No.	STANDAR	Capaian		Capaian		
	Jenis	Uraian			Capaian 2020	T/BT	Capaian 2021	T/BT	
		4.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr	40	100%	92%	BT	89%	BT
		5.	Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia	41	100%	97%	BT	83.12%	BT
	Proses	6.	Pertolongan Persalinan melalui seksio caesaria non rujukan	42	≤20%	27%	BT	25%	BT
		7.	Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum terlatih	43	100%	100%	T	100%	T
		8.	Konseling KB mantap oleh bidan terlatih	44	100%	100%	T	100%	T
	Output	9.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	45	a. Perdarahan ≤ 1%	0,00%	T	0.00%	T
				46	b. Pre-eklampsia <30%	0,00%	T	5.56%	T
				47	c. Sepsis < 0,2%	0,00%	T	0.00%	T
	Outcome	10.	Kepuasan Pelanggan	48	≥80%	96%		87.18%	T
	Pelayanan Intensif	Input	1.	Pemberi pelayanan	49	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%	T	100%
2.			Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU	50	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%	T	100%	T
3.			Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator	51	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%	T	100%	T
Proses		4.	Kejadian infeksi nosokomial	52	<9%	0,00%	T	9.36%	T

	Output	5.	Pasien yang kembali ke perawatan intensif dg kasus yg sama <72 jam	53	≤3%	0,87%	T	0.00%	T
	Outcome	6.	Kepuasan pelanggan	54	≥70%	100%	T	89.73%	T
<b>Pelayanan Radiologi</b>	Input	1.	Pemberi pelayanan radiologi	55	Dokter spesialis radiologi,radiografer	75.00%	BT	100%	T
		2.	Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi	56	Sesuai kelas RS	63.64%	BT	100%	T
	Proses	3.	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	57	≤3jam	100%	T	100%	T
		4.	Kerusakan foto	58	≤2%	2.51%	T	1.84%	T
		5.	Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	59	100%	100%	T	100%	T
	Output	6.	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi	60	Dokter spesialis radiologi	92.38%	BT	92.38%	BT
	Outcome	7.	Kepuasan pelanggan	61	≥80%	84.00%	T	80.53%	T

Jenis Pelayanan	INDIKATOR			No.	STANDAR	Capaian		Capaian	
	Jenis	Uraian				Capaian 2020	T/BT	Capaian 2021	T/BT
<b>Pelayanan Patologi Klinik</b>	Input	1.	Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik	62	Sesuai kelas RS	100%	T	100%	T
		2.	Fasilitas dan peralatan	63	Sesuai kelas RS	81.88%	BT	50,61%	BT
	Proses	3.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik	64	≤120 menit	100%	T	88,97%	BT
		4.	Tidak adanya kejadian tertukar specimen	65	100%	100%	T	100%	T
		5.	Kemampuan memeriksa HIV-AIDS	66	Tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%	T	89,30%	BT
		6.	Kemampuan mikroskopis TB Paru	67	Tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%	T	100%	T
	Output	7.	Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	68	Dokter spesialis patologi klinis	100%	T	100%	T
		8.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	69	100%	100%	T	100%	T
		9.	Kesesuaian baku mutu internal	70	100%	100%	T	100%	T



	Outcome	10.	Kepuasan pelanggan	71	≥80%	100%	T	80,14%	T
<b>Pelayanan Rehabilitasi Medik</b>	Input	1.	Pemberi pelayanan rehabilitasi medik	72	Sesuai persyaratan kelas RS	100%	T	100%	T
		2.	Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medis	73	Sesuai persyaratan kelas RS	100%	T	100%	T
	Proses	3.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	74	100%	100%	T	100%	T
	Output	4.	Kejadian <i>Drop Out</i> pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	75	≤50%	100%	T	100%	T
	Outcome	5.	Kepuasan Pelanggan	76	≥80%	90%	T	82,73%	T
<b>Pelayanan Farmasi</b>	Input	1.	Pemberi pelayanan farmasi	77	Sesuai kelas rumah sakit	50.0%	BT	100%	T
		2.	Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	78	Sesuai kelas rumah sakit	81,25	BT	100%	T
		3.	Ketersediaan formularium	79	Tersedia dan updated paling lama 3 thn.	100%	T	100%	T
	Proses	4.	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	80	≤30 menit	100%	T	71,99%	BT

Jenis Pelayanan	INDIKATOR		No.	STANDAR	Capaian		Capaian		
	Jenis	Uraian			Capaian 2020	T/BT	Capaian 2021	T/BT	
		5.	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	81	≤60 menit	100%	T	87,72%	BT
	Outcome	6.	Kepuasan pelanggan	82	≥80%	100%	T	80,16%	T
<b>Pelayanan Gizi</b>	Input	1.	Pemberi pelayanan gizi	83	Sesuai pola ketenagaan	89.19%	BT	100%	T
		2.	Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi	84	Tersedia	100%	T	100%	T
	Proses	3.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	85	≥90%	100%	T	95,65%	T
		4.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	86	100%	100%	T	100%	T
	Output	5.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	87	≤20%	100%	T	25,19%	BT

<b>Pelayanan Tranfusi Darah</b>	Input	1.	Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit	88	Sesuai standar BDRS	100%	T	100%	T
		2.	Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit	89	Sesuai standar BDRS	94,44%	T	94,44%	BT
	Proses	3.	Kejadian reaksi transfusi	90	≤ 0,01%	0,02%	BT	0,37%	BT
	Output	4.	Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di RS	91	100%	100%	T	100%	T
<b>Pelayanan Pasien Keluarga Miskin</b>	Output	1.	Semua pasien keluarga miskin dilayani	92	100%	100%	T	100%	T
<b>Pelayanan Rekam Medik</b>	Input	1.	Pemberi pelayanan Rekam Medik	93	Sesuai persyaratan	100%	T	100%	T
		Proses	2.	Waktu penyediaan dok. RM pel. rawat jalan	94	≤10 menit	100%	T	86,19%
	3.		Waktu penyediaan dok. RM pel. rawat inap	95	≤15 menit	100%	T	100%	T
	Output	4.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	96	100%	95%	BT	98,09%	BT
		5.	Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	97	100%	100%	T	100%	T
<b>Pengelolaan Limbah</b>	Input	1.	Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit	98	Adanya SK direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 Th. 2004)	100%	T	100%	T
		2.	Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit : padat dan cair	99	Sesuai peraturan perundangan.	100%	T	100%	T

Jenis Pelayanan	INDIKATOR			No.	STANDAR	Capaian		Capaian		
	Jenis	Uraian				Capaian 2020	T/BT	Capaian 2021	T/BT	
			3.			Pengelolaan limbah padat		100	Sesuai peraturan perundangan.	100%
	Output	4.	Baku mutu limbah cair		101	a. BOD < 30mg/liter	78%	BT	60,51%	BT
						b. COD < 80g/liter				

					c. TSS < 30g/liter				
					d. pH 6-9				
<b>Administrasi dan Manajemen</b>	Input	1.	Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi	102	≥90%	96%	T	100%	T
		2.	Adanya peraturan internal rumah sakit	103	Ada	100%	T	100%	T
		3.	Adanya peraturan karyawan rumah sakit	104	Ada	100%	T	100%	T
		4.	Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	105	Ada	100%	T	100%	T
		5.	Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit	106	Ada	100%	T	100%	T
		6.	Adanya perencanaan pengembangan SDM	107	Ada	100%	T	100%	T
	Proses	7.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	108	100%	100%	T	100%	T
		8.	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	109	100%	100%	T	100%	T
		9.	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	110	100%	100%	T	100%	T
		10.	Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	111	≥90%	100%	T	100%	T
		11.	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	112	100%	100%	T	100%	T
		12.	Kecepatan waktu pemberian informasi ttg tagihan pasien RI	113	≤2jam	100%	T	100%	T
	Output	13.	<i>Cost recovery</i>	114	≥60%	55,74%	BT	99,64%	T
		14.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	115	100%	100%	T	100%	T
		15.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	116	≥60%	18%	BT	0,08%	BT
		16.	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	117	100%	100%	T	100%	T
<b>Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah</b>	Input	1.	Waktu pelayanan <i>ambulance</i> /Kereta Jenazah	118	24 Jam	100%	T	100%	T

Jenis Pelayanan	INDIKATOR			No.	STANDAR	Capaian		Capaian	
	Jenis	Uraian				Capaian 2020	T/BT	Capaian 2021	T/BT
		2.	Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah		119	Supir ambulans terlatih	100%	T	100%

		3.	Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah	120	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	20%	BT	100%	T
	Proses	4.	Kecepatan memberikan pelayanan <i>ambulance</i> /mobil Jenazah di Rumah Sakit	121	≤30 menit	100%	T	94%	BT
		5.	Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	122	≤30 menit	100%	T	100%	T
	Output	6.	Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian	123	100%	96%	BT	100%	T
Perawatan Jenazah	Input	1.	Ketersediaan pelayanan pemulasaraan jenazah	124	24 Jam	100%	T	100%	T
		2.	Ketersediaan fasilitas kamar jenazah	125	Sesuai kelas rumah sakit	100%	T	100%	T
		3.	Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah	126	Ada SK Direktur	100%	T	100%	T
	Proses	4.	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) pelayanan pemulasaraan jenazah	127	≤15 menit setelah di kamar jenazah	100%	T	100%	T
		5.	Perawatan jenazah sesuai <i>standard universal precaution</i>	128	100%	100%	T	100%	T
		6.	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah	129	100%	100%	T	100%	T
Pelayanan Laundry	Input	1.	Ketersediaan pelayanan laundry	130	Tersedia	100%	T	100%	T
		2.	Adanya penanggung jawab pelayanan laundry	131	Ada SK Direktur	100%	T	100%	T
		3.	Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry	132	Tersedia	100%	T	100%	T
	Proses	4.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	133	100%	100%	T	100%	T
		5.	Ketepatan pengelolaan linen infeksius	134	100%	100%	T	100%	T
	Output	6.	Ketersediaan linen	135	2,5 - 3 set x 2,5 - 3 set x	100%	T	100%	T
		7.	Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi	136	100%	100%	T	100%	T
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Input	1.	Adanya penanggung jawab IPSRS	137	SK Direktur	100%	T	100%	T
		2.	Ketersediaan bengkel kerja	138	Tersedia	100%	T	100%	T
Jenis Pelayanan	INDIKATOR			No.	STANDAR	Capaian		Capaian	

	Jenis	Uraian				Capaian 2020	T/BT	Capaian 2021	T/BT
	Proses	3.	Waktu tanggap kerusakan alat ≤15 menit	139	≥80%	96,41%	T	98,22%	T
		4.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	140	100%	100%	T	100%	T
		5.	Ketepatan waktu kalibrasi alat	141	100%	100%	T	100%	T
<b>Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)</b>	Input	1.	Ada anggota tim PPI yang terlatih	142	Anggota Tim PPI yang terlatih 75%	100%	T	100%	T
		2.	Ketersediaan APD di setiap instalasi/ departemen	143	≥60%	63%	T	100%	T
		3.	Rencana program PPI	144	Ada	100%	T	100%	T
	Proses	4.	Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	145	100%	100%	T	100%	T
		5.	Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	146	100%	100%	T	100%	T
	Output	6.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI ( <i>health care associated infections</i> ) di rumah sakit (minimum 1 parameter)	147	≥75%	75%	T	89,61%	T
<b>Pelayanan Keamanan</b>	Input	1.	Petugas keamanan bersertifikat pengamanan	148	100%	75%	BT	68,75%	BT
		2.	Sistem pengamanan	149	Ada	100%	T	100%	T
	Proses	3.	Petugas keamanan melakukan keliling RS	150	Setiap jam	100%	T	100%	T
		4.	Evaluasi terhadap sistem pengamanan	151	Setiap 3 bulan	99.7%	T	100%	T
	Output	5.	Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang	152	100%	100%	T	100%	T

### c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Secara umum kualitas pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dipersepsikan Baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai IKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 82,03. Hasil survei menunjukkan ada 1 unsur pelayanan yang dipersepsikan Sangat Baik yaitu unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Dan 8 unsur yang dipersepsikan Baik oleh masyarakat, meliputi : 1) Biaya/tarif, 2) Kompetensi Petugas, 3) Persyaratan Pelayanan, 4) Perilaku Petugas, 5) Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, 6) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 7) Sarana dan Prasarana, dan 8) Waktu Pelayanan. Meskipun unsur-unsur pelayanan tersebut sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi.

**Tabel 11. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan – RB Nomor 14 Tahun 2017

#### Rekomendasi:

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama dalam kedisiplinan menjalankan SOP.
2. Diperlukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bunyang terlibat secara langsung dalam pelayanan.
3. Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan baik kepada masyarakat maupun pelaksana terkait aturan-aturan yang berlaku.
4. Memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memberi motivasi untuk mendapatkan prestasi di masa mendatang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Tabel 12. Rekapitulasi Survei IKM Tahun 2018 sd 2021**

No.	Unsur Pelayanan	Tahun 2018		Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan Pelayanan	75,59	Kurang Baik	78,26	B	Kurang Baik	77,54	B	Baik	81,83	B	Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	73,95	Kurang Baik	76,43	C	Kurang Baik	77,67	B	Baik	80,56	B	Baik
U3	Waktu Pelayanan	68,09	Kurang Baik	67,32	C	Kurang Baik	72,40	C	Kurang Baik	77,66	B	Baik
U4	Biaya/tarif	83,22	Baik	80,43	B	Baik	81,86	B	Baik	85,53	B	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	74,63	Kurang Baik	75,75	C	Kurang Baik	76,56	C	Kurang Baik	79,75	B	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	76,05	Kurang Baik	78,40	B	Kurang Baik	78,78	B	Baik	81,94	B	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	77,63	Baik	78,46	B	Baik	77,02	B	Baik	81,25	B	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	67,24	Kurang Baik	70,18	C	Kurang Baik	72,93	C	Kurang Baik	79,28	B	Baik



U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	82,17	Baik	85,39	B	Baik	89,00	A	Sangat Baik	90,51	A	Sangat Baik
<b>Nilai IKM</b>		<b>75,35</b>	<b>Kurang Baik</b>	<b>76,74</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>	<b>78,19</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>	<b>82,03</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

➤ **Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian (dengan rumus <math>\frac{\text{realisasi}}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%</math>)</b>
Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	182.961.722.780,00	177.429.713.269,48	96,98 %
Capaian Kinerja Keuangan			96,98 %

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk merencanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan yang disusun, baik Renstra maupun Renja. Pada program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan.

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)</b>
1	<b>Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disediakan</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>100%</b>
1.	<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>100%</b>

Maksud:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan dengan pelaksana urusan di tingkat Perangkat Daerah
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Mensinergikan rancangan program dan kegiatan dengan kebijakan nasional.
4. Meningkatkan kinerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
5. Termonitornya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Tujuan:

Adanya peningkatan kerja dan kinerja di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran yang disediakan Rp.6.500.000 dan semua terealisasi.

Kode Rekening	Uraian				Anggaran
5	BELANJA DAERAH				6.500.000
5.1	BELANJA OPERASI				6.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				6.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang				6.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				6.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				6.500.000
	Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya	17 Per Buku	Per Buku	20.000	340.000
	Spesifikasi : Spesifikasi : Penjilidan Biasa				
	Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya	17600 Lembar	Lembar	350	6.160.000
	Spesifikasi : Spesifikasi : Fotokopi (Penggandaan)				
Grand Total :		Grand Total :			6.500.000

No	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang disediakan	2 Jenis		
1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN	232 Orang	232 Orang	100%

**Maksud:**

Terbayarnya Gaji sebagai kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.

**Tujuan:**

Adanya peningkatan kerja dan kinerja di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran yang disediakan Rp. 38.014.313.158 dengan realisasi Rp. 30,486,810,954.00 (89,20%).

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
5	BELANJA DAERAH	38.014.313.158		
5.1	BELANJA OPERASI	38.014.313.158		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.138.956.000		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	20.282.796.000		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	15.093.046.000		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	15.093.046.000		
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.093.046.000		
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	15.093.046.000		
		1 Tahun	15.093.046.000	15.093.046.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.319.350.000		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.319.350.000		

	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	1.319.350.000	1.319.350.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN			206.360.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			206.360.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	206.360.000	206.360.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN			1.879.437.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			1.879.437.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	1.879.437.000	1.879.437.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN			100.942.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			100.942.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	100.942.000	100.942.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN			896.414.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			896.414.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	896.414.000	896.414.000

5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				26.559.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				26.559.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		26.559.000	26.559.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				293.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				293.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		293.000	293.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				636.110.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				636.110.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		636.110.000	636.110.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				31.184.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				31.184.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		31.184.000	31.184.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				93.101.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				93.101.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		93.101.000	93.101.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				5.848.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN				5.848.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS				5.848.000.000
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN				5.848.000.000

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.848.000.000	5.848.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				8.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				8.160.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				8.160.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				8.160.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		680.000	8.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				11.875.357.158

5.1.02.02	Belanja Jasa				11.875.357.158
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				11.875.357.158
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19				11.875.357.158
	[#] DAU-Dukungan pendanaan belanja kesehatan dan Belanja Prioritas lainnya - Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid19				11.875.357.158
	[-] Insentif Januari sd Desember 2021				
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000	840.000.000
	Spesifikasi : Dokter Umum/Dokter Gigi RSUD				
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	79 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	7.500.000	4.740.000.000
	Spesifikasi : Perawat/Bidan RSUD				
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	17 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	765.000.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Lainnya				
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.000.000	2.160.000.000
	Spesifikasi : Dokter Spesialis RSUD				
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.500.000	7.500.000
	Spesifikasi : Perawat/Bidan RSUD				
	[-] Membayar Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan - ASN Tahun 2020 (September, Oktober, November dan Desember)				
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 - ASN	1 Tahun	Tahun	308.571.430	308.571.430
	Spesifikasi : Utang atas Kinerja Tahun 2020 Nakes pada RSI (dokter umum)				
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 - ASN	1 Tahun	Tahun	1.137.857.154	1.137.857.154
	Spesifikasi : Utang atas Kinerja Tahun 2020 Nakes pada RSI (dokter spesialis)				

	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 - ASN	1 Tahun	Tahun	380.000.000	380.000.000
	Spesifikasi : Utang atas Kinerja Tahun 2020 Nakes pada RSSI (Nakes Lainnya)				
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 - ASN	1 Tahun	Tahun	1.536.428.574	1.536.428.574
	Spesifikasi : Utang atas Kinerja Tahun 2020 Nakes pada RSSI (perawat/bidan)				
Grand Total :					38.014.313.158

2.	Koordinasi dan Penyusunan Sub Laporan Keuangan Akhir Kegiatan Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6 Laporan	-	-
----	--	--	-----------	---	---

Maksud:

Menyajikan pencapaian kinerja keuangan dan laporan realisasi APBD yang dibebankan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Tujuan:

Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun 2020 dan draf laporan akhir tahun 2021. Anggaran yang disediakan Rp. 1.590.000 (setelah perubahan) dengan realisasi Rp. 1.500.000 (94,34%).

Kode Rekening	Uraian				Anggaran
5	BELANJA DAERAH				1.590.000
5.1	BELANJA OPERASI				1.590.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				1.590.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				1.590.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				1.590.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1.590.000
	[#] Belanja perjalanan dinas luar daerah				1.590.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 Orang / Hari	Orang Per Hari	530.000	1.590.000
	Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Harian di Wilayah Provinsi D.K.I Jakarta				
Grand Total :					1.590.000

No	Administrasi Umum Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang disediakan	3 Jenis		
1.	Sub Penyediaan Peralatan dan Kegiatan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100%

Maksud:

Untuk mendukung kegiatan Kantor dalam kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk aktifitas sehari hari.

Tujuan:

Pengadaan Peralatan Kantor:

- Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan.
- Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal.
- Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur.
- Untuk menjamin keselamatan bagi yang menggunakan alat-alat tersebut.

Perlengkapan kantor adalah segenap benda yang dipergunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri dari perabot kantor, mesin kantor, perbekalan kantor dan interior kantor.

Pengadaan Perlengkapan Kantor:

- Mendukung aktivitas dan pekerjaan kantor.
- Menghemat tenaga dan biaya.
- Memudahkan pengawasan.
- Dapat menghemat biaya, bila dipergunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan.
- Dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rapi.
- Keterangan yang dimuat dapat lebih banyak.
- Dapat mengurangi kelelahan pegawai sehingga dapat menambah mutu pekerjaan.

Anggaran yang disediakan Rp. 15.794.310 dengan realisasi Rp. 15.794.310 (100%)

Kode Rekening	Uraian				Anggaran
5	BELANJA DAERAH				15.794.310
5.2	BELANJA MODAL				15.794.310
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				15.794.310
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				15.794.310
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit				15.794.310
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya				15.794.310
	PC All-in-One	1 Unit	Unit	15.794.310	15.794.310
	Spesifikasi : Processor: Intel Core i7-8550U, RAM: 4GB DDR4, HDD: 1TB, VGA: NVIDIA GeForce 930MX 2GB, Konektivitas: LAN + Wifi + Bluetooth, Ukuran Layar: 23.8 Inch FHD, Sistem Operasi: Windows 10				
Grand Total :					15.794.310



2.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2 Jenis	-	-
----	---	--	---------	---	---

**Maksud:**

Untuk mendukung kegiatan Kantor dalam Kebutuhan Bahan Cetak dan pengandaan untuk aktifitas sehari hari Tujuan:  
Tersedianya kebutuhan cetak dan pengandaan selama satu tahun.

Anggaran yang disediakan Rp. 19.500.000 dengan realisasi Rp. 19.500.000 (100%)

Kode Rekening	Uraian				Anggaran
5	BELANJA DAERAH				19.500.000
5.1	BELANJA OPERASI				19.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				19.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang				19.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				19.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				19.500.000
	Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya	54000 Lembar	Lembar	350	18.900.000
	Spesifikasi : Spesifikasi : Fotokopi (Pengandaan)				
	Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya	30 Per Buku	Per Buku	20.000	600.000
	Spesifikasi : Spesifikasi : Penjilidan Biasa				
<b>Grand Total :</b>					<b>19.500.000</b>

3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14 OK	14 OK	100%
----	---	---	-------	-------	------

**Maksud:**

Untuk proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain supaya tercapainya tujuan bersama. Koordinasi juga merupakan suatu proses saling mengerti dan memahami antara 2 pihak atau lebih dalam menjalankan suatu hal.

**Tujuan:**

- e. Terciptanya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi guna pencapaian tujuan organisasi dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.
- f. Pimpinan menjadi mudah dalam melakukan sinergi serta integrasi berjalannya tugas yang ada dengan pihak yang berhubungan. Ketika keterkaitan dengan unit-unit atau divisi semakin besar maka akan semakin tinggi kebutuhan koordinasinya.
- g. Mendukung pimpinan untuk mensinergikan serta mengontrol perkembangan antara satu unit dengan unit yang lain.
- h. Pimpinan bisa melakukan sinkronisasi kegiatan fungsional dengan berbagai tujuan masing-masing unit yang berbeda demi tercapainya tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Anggaran yang tersedia Rp. 10.480.000 dengan realisasi Rp. 9,608,027.00 (91,68%)

Kode Rekening	Uraian			Anggaran	
5	BELANJA DAERAH			10.480.000	
5.1	BELANJA OPERASI			10.480.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			10.480.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas			10.480.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			10.480.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.480.000	
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Orang x 3 Hari	Orang Per Hari	530.000	3.180.000
	Spesifikasi : Uang Harian di Wilayah Provinsi D.K.I Jakarta				
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	1.700.000	3.400.000
	Spesifikasi : Transportasi ke Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah - Udara/ Darat				
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Orang x 3 Hari	Per Hari	650.000	3.900.000
	Spesifikasi Penginapan di Luar Provinsi Kalimantan Tengah - Eselon IV/ Golongan III/II/I				
Grand Total :					10.480.000

Kegiatan	Pengadaan Barang Milik	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100%

		<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
1.	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	4 Unit	100%

**Maksud:**

Tersedianya kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional lapangan, kendaraan dinas operasional khusus yang digunakan oleh dokter spesialis.

**Tujuan:**

Tersedianya kendaraan operasional untuk Jabatan Dokter Spesialisasi dan mempermudah mobilisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Anggaran yang tersedia Rp 704.999.812 dengan realisasi Rp. 700.000.000 (99,29%)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5	BELANJA DAERAH	704.999.812
5.2	BELANJA MODAL	704.999.812
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	704.999.812
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	704.999.812
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	704.999.812
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	704.999.812
	[#] Mobil Dokter Spesialis	704.999.812
	Mobil minibus	
		4 Unit x 0.94 %
		Unit 170.454.500 64.090.892
		704.999.812
Grand Total :		704.999.812

No.	Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan	Jumlah Pelayanan BLUD yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100%
1.	Sub Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Pelayanan BLUD	Jumlah operasional pelayanan rumah sakit	12 Bulan	12 Bulan	100%

**Maksud:**

Keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

**Tujuan:**

Memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Anggaran yang tersedia Rp. 144.188.545.500 dengan realisasi Rp.

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>			<b>Anggaran</b>
5	BELANJA DAERAH			144.188.545.500
5.1	BELANJA OPERASI			136.965.547.127
5.1.01	Belanja Pegawai			69.439.817.076
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD			69.439.817.076
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD			69.439.817.076
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD			69.439.817.076
	Belanja Pegawai BLUD [BLUD]	1 Tahun	69.439.817.076	69.439.817.076
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			67.525.730.051
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD			67.525.730.051
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD			67.525.730.051
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD			67.525.730.051
	Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD]	1 Tahun	67.525.730.051	67.525.730.051
5.2	BELANJA MODAL			7.222.998.373
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			7.222.998.373
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			7.222.998.373
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			7.222.998.373
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			7.222.998.373
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD]	1 Tahun	7.222.998.373	7.222.998.373
Grand Total :		Grand Total :		144.188.545.500



### 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

#### Capaian Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	%	80%	92,99%	116,24 (Sangat Berhasil)	80%	92,99%	116,24 (Sangat Berhasil)
		BOR	%	60-85%	58,93%	98,22 (Cukup Berhasil)	60%	63,71%	105,28% (Sangat Berhasil)
		LOS	hari	6-9 hari	4,15 hari	69,17 (Cukup Berhasil)	6hari	4,79 hari	78,83% ( Berhasil)
		TOI	hari	1-3 hari	2,90 hari	96,67 (Sangat Berhasil)	3 hari	2,73 hari	91% (Berhasil)
		BTO	kali	40-50 kali	51,92 kali	78,16 (Cukup Berhasil)	50 kali	48,55 kali	97,1% (Sangat Berhasil)
		NDR	permil	25/1000	23,48/1000	93,92 (Berhasil)	25/1000	23,78/1000	104,88% (Sangat Berhasil)
		GDR	permil	45/1000	46,95/1000	104,33 (Cukup Berhasil)	45/1000	38,91/1000	113,53% (Sangat Berhasil)
<b>Capaian Kinerja Sasaran I</b>				<b>93,81 % → Sangat Berhasil</b>			<b>101,12 % → Sangat Berhasil</b>		

**Capaian Sasaran II**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	%	>60%	62,26 %	103,77 (Sangat Berhasil)	>60%	99,64 %	116,06 (Sangat Berhasil)
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	80%	93,23%	116,53 (Sangat Berhasil)	80%	86,18%	107,72 (Sangat Berhasil)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	>76,61%	78,19%	102,06 (Berhasil)	>76,61%	82,03%	107,07 (Berhasil)
<b>Capaian Kinerja Sasaran II</b>				<b>107,45 % → Sangat Berhasil</b>			<b>126,95 % → Sangat Berhasil</b>		

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra)

Tabel 13. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	80 %	80 %	80 %	92,96%	92,96%	92,96%
		BOR	60-85%	60-85%	60-85%	76,00%	58,93%	63,71%
		LOS	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	3,49 hari	4,15 hari	4,79 hari
		TOI	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1,10 hari	2,90 hari	2,73 hari
		BTO	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	79,55 kali	51,92 kali	48,55 kali
		NDR	25/1000	25/1000	25/1000	21,10/1000	23,48/1000	23,78/1000
		GDR	45/1000	45/1000	45/1000	37,33/1000	46,95/1000	38,91/1000
2	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%	>60%	>60%	51,20%	62,26 %	99,64 %
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	> 80%	> 80%	> 80%	78,14 %	93,23%	86,18%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	>76,61%	>76,61%	>76,61%	76,74%	78,19%	82,03%

Capaian kinerja sesuai dengan target Rencana Startegis RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan keberhasilan dalam realisasinya pada semua indikator. Khusus pada indikator CRR pada tahun 2020 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian pada tahun 2019 masih berada pada posisi di bawah target (69 %) ini menunjukkan bahwa CRR di RSUD Sultan Imanuddin masih kurang berhasil. Upaya yang harus dilakukan yaitu menyusun bisnis plan yang baik. Upaya



inovasi pelayanan dan mempertahankan mutu guna menambah nilai pendapatan RS.

### **Aspek Pendukung Keberhasilan**

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan yang terus menerus ditingkatkan. Hal tersebut sejalan dengan regulasi mengenai rujukan berjenjang yang harus dipenuhi rumah sakit mengenai kompetensi, kapasitas dan kualitasnya. Komitmen RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Secara terus menerus dan berkesinambungan di semua bidang dan unit pelayanan untuk mempertahankan status Paripurna dengan Akreditasi SNARS Edisi 1.1.

### **Strategi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada masa Pandemi**

#### **Covid19:**

1. Fokus pada pelayanan pasien (Rawat Inap dan Rawat Jalan), pelayanan pasien Covid 19 di RSSI dan RS Perluasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Upaya pengelolaan citra layanan RSUD Sultan Imanuddin di masa pandemi covid-19.
3. Pengelolaan Honor – Insentif Nakes dan Non Nakes melalui Insentif Pusat dan Daerah pada pelayanan covid-19.
4. Pelayanan Covid 19 tersentral di Rumah Sakit Sultan Imanuddin dengan memfungsikan Gedung perawatan 5 lantai (64 kamar).
5. Fokus belanja yaitu : BHP/APD, Honor dan Insentif relawan, konsumsi petugas, dan operasional RS Perluasan → BHP PCR
6. Penguatan SIM - RS
7. Mengantisipasi Lonjakan Kasus (*Surge Capacity*) yang antara lain berisi :
  - Penambahan SDM,
  - Peralatan dan logistik,
  - Peningkatan kompetensi area kritis,
  - Penambahan jumlah tempat tidur
8. Manajemen rantai pasokan dilaksanakan dalam pemenuhan obat-obat esensial, diagnostik (termasuk reagen yang dibutuhkan pada pemeriksaan

laboratorium, APD dan alat uji) serta persediaan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan.

## 1.2 Realisasi Anggaran

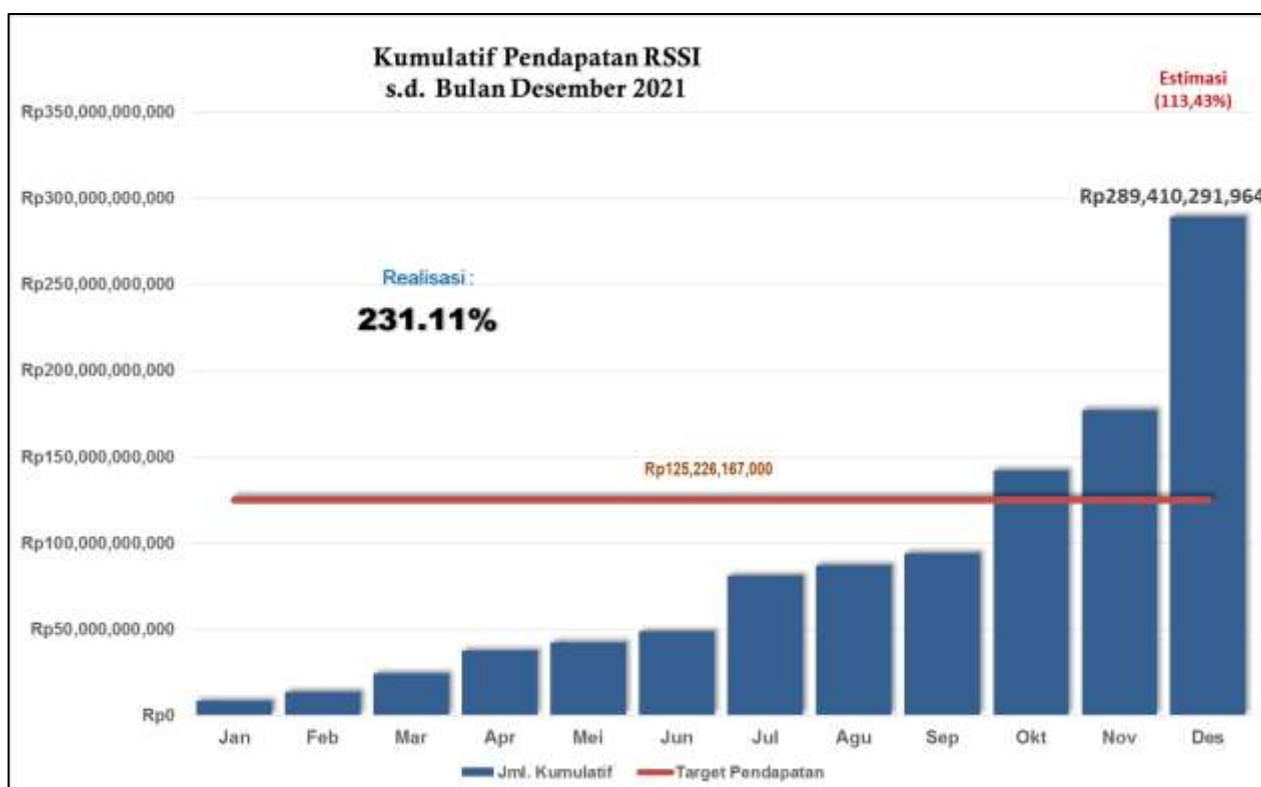
### 1. Penerimaan/Pendapatan

Target dan realisasi penerimaan/pendapatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017 s.d 2021 sebagai berikut :

**Tabel 14. Target dan realisasi penerimaan/pendapatan**

Tahun	Target	Realisasi	%
Tahun 2017	75.000.000.000	62.581.107.484,64	83,44 %
Tahun 2018	85.365.000.000	80.353.251.760,86	94,12 %
Tahun 2019	106.734.340.200	77.927.694.218	73,01 %
Tahun 2020	112.131.085.680	123.455.203.734.25	110,10 %
Tahun 2021	125.226.167.000	289.410.291.964	231,11%

Peningkatan pendapatan tahun 2021 yang melebihi target disumbang oleh adanya klaim pelayanan Covid19.



Gambar 5. Grafik Pendapatan

### 2. Anggaran Belanja

Anggaran Belanja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017

s.d 2021 sebagai berikut :

**Tabel 15. Anggaran Belanja**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	%
<b>Tahun 2017</b>	159.218.150.000	143.375.336.329	90,05
<b>Tahun 2018</b>	152.896.248.000	145.749.438.213	95,33
<b>Tahun 2019</b>	185.625.145.000	155.741.982.906	83,90
<b>Tahun 2020</b>	205.348.874.180	197.971.417.882	96,41
<b>Tahun 2021</b>	<b>298.577.274.013</b>	<b>289.540.492.355</b>	<b>96,97</b>

**Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021**

No.	Sumber Dana	Dana DPA-SKPD (Rp.)	Realisasi			KET. (Sisa Anggaran)
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	%	
1	APBD	56.165.483.513	52.848.913.628	94,10	100	3.316.569.885
2	DAK	98.223.245.000	95.830.979.113	97,56	100	2.392.265.887
3	BLUD	144.188.545.500	140.860.599.614	97,69	100	3.327.945.886
Total Pagu, Realisasi Fisik Dan Keuangan		298.577.274.013	289.540.492.355	96,97	100	9.036.781.658

Anggaran Belanja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017 s.d 2021 dan berdasarkan sumber anggaran :

**Tabel 16. Sumber Dana Anggaran Belanja**

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	DAU	31.585.212.000	33.980.296.000	22.523.481.800	24.079.679.500	56.165.483.513
2.	DAK	47.201.338.000	30.899.306.000	44.247.323.000	51.128.629.000	98.223.245.000,00
3.	PADS	75.000.000.000	86.792.646.000	107.466.340.200	112.131.085.680	144.188.545.500,00
4.	DBH SDA Pertambangan	0	0	0		
5.	SILPA Umum	0	40.500.000	700.000.000	6.625.000.000	
	SILPA BLUD	0	0	4.800.000.000		
	SILPA Khusus	3.000.000.000	0	0		
6.	DBH Provinsi	0	0	2.000.000.000		
	DBH Pusat (Dana Bagi Hasil)	0	1.107.500.000	2.500.000.000	3.297.021.100	
7.	Dana Insentif Daerah	2.431.600.000	76.000.000	1.388.000.000	4.283.619.400	
8.	Pendapatan Hibah	0	0	0		
9.	Dana Penyesuaian	0	0	0		
10.	DID Tambahan	0	0	0	3.803.839.500	
	<b>Jumlah</b>	<b>159.218.150.000</b>	<b>152.896.248.000</b>	<b>185.625.145.000</b>	<b>205.348.874.180</b>	<b>298.577.274.013</b>

**Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sesudah Perubahan (Tahun 2021)						Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Keuangan				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan	Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan							
					Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										298.577.274.013	289.541.992.355	96,97			
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										182.961.722.780	177.431.213.269	96,98		
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6.500.000	6.500.000	100,00	
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan	100%	6 Laporan	100%	100%	6 Laporan	100%	6.500.000	6.500.000	100,00
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										38.015.903.158	35.819.211.318	94,22	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan	100%	323Orang	100%	100%	323Orang	100%	38.014.313.158	35.817.711.318	94,22

1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan	100%	6 Laporan	100%	100%	6 Laporan	100%	1.590.000	1.500.000	94,34
1	2	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>45.774.310</b>	<b>44.902.337</b>	<b>98,10</b>
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100%	1 Unit	100%	100%	1 Unit	100%	15.794.310	15.794.310	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sesudah Perubahan (Tahun 2021)						Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Keuangan				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan	Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan							
					Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan								
		umum	disediakan	umum													
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100%	2 Jenis	100%	100%	2 Jenis	100%	19.500.000	19.500.000	100,00
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Jumlah Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100%	2 OK	100%	100%	2 OK	100%	10.480.000	9.608.027	91,68
1	2	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>704.999.812</b>	<b>700.000.000</b>	<b>99,29</b>

1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	4 Unit	100%	100%	4 Unit	100%	704.999.812	700.000.000	99,29
1	2	1	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>										144.188.545.500	140.860.599.614	97,69
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Jumlah operasional pelayanan rumah sakit	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	100%	100%	12 Bulan	100%	144.188.545.500	140.860.599.614	97,69
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>										104.253.030.366	101.730.723.906	97,58
1	2	2	2.01		<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										103.933.030.339	101.438.553.024	97,60

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sesudah Perubahan (Tahun 2021)					Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Keuangan	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan	Capaian Kinerja					Hasil Kegiatan
									Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan				
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Cakupan Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Jumlah pembangunan RS beserta sarana dan prasarannya	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah	90%	14 Unit	100%	90%	14 Unit	100%	1.072.718.910	1.068.283.429	99,59

1	2	2	2.01	5	Pengembangan Rumah Sakit	Cakupan Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Jumlah pengembangan RS	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah	90%	2 Unit	100%	90%	2 Unit	100%	77.098.087.000	76.420.739.800	99,12
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah	90%	14 Unit	100%	90%	14 Unit	100%	2.041.578.000	2.032.681.500	99,56
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	90%	37 Jenis	100%	90%	37 Jenis	100%	2.595.488.429	2.506.608.982	96,58

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sesudah Perubahan (Tahun 2021)						Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Keuangan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan	Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan				
					Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan					
				kewenangan daerah										



1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Jumlah pengadaan alkes	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah	90%	77 Jenis	100%	90%	77 Jenis	100%	21.125.158.000	19.410.239.313	91,88
1	2	2	2.02		<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>270.000.027</b>	<b>242.615.882</b>	<b>89,86</b>
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	Jumlah perawatan dan pengobatan bagi pasien tidak mampu	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	250 orang	100%	100%	250 orang	100%	270.000.027	242.615.882	89,86
1	2	2	2.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>										<b>50.000.000</b>	<b>49.555.000</b>	<b>99,11</b>
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Persentase Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	1 Aplikasi	100%	100%	1 Aplikasi	100%	50.000.000	49.555.000	99,11
1	2	3			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>										<b>11.362.520.867</b>	<b>10.380.055.180</b>	<b>91,35</b>
1	2	3	2.03		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>11.362.520.867</b>	<b>10.380.055.180</b>	<b>91,35</b>
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sesudah Perubahan (Tahun 2021)					Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Keuangan	
Kode		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan	Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan						
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan					

1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah tenaga yang mengikuti penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Persentase Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	1 Orang	100%	100%	1 Orang	100%	30.420.000	14.460.000	47,53
1	2	3	2.03	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Cakupan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	178 Orang/	90%	100%	178 Orang/	90%	11.332.100.867	10.365.595.180	91,47
<b>TOTAL</b>													<b>298.577.274.013</b>	<b>289.541.992.355</b>	<b>96,97</b>		

### **1.3 Efisiensi Realisasi Anggaran RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021**

Pengelolaan keuangan daerah menjadi acuan dalam tingkat kemajuan dan perkembangan daerah, melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menggali pendapatan dan peran alokasi anggaran secara mandiri untuk menetapkan prioritas pembangunannya sehingga pengelolaan keuangan daerah apabila dilaksanakan dengan baik dan benar akan membuat aset serta keutuhan daerah tersebut terjaga. Pemerintah daerah mempunyai hak otonomi untuk menentukan peraturan dan kebijakannya sendiri sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diberi kewenangan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan potensi dan kebutuhan dalam daerah, APBD dapat menjadi tolak ukur ataupun indikator kemampuan dalam membiayai atau melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan serta rancangan proyek jangka menengah dalam periode waktu tertentu dengan tujuan penggunaan secara efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan juga sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan daerah. Berbicara mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan tentunya berhubungan dengan keterbukaan informasi publik, bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan segera, dengan biaya yang pantas, dan dengan mengedepankan dari waktu ke waktu. Hal ini berkembang seiring dengan kesadaran bahwa dalam berkehidupan negara yang demokratis memiliki hak untuk dilayani, serta badan publik berkewajiban untuk menyediakan informasi secara efektif dan efisien. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dalam menyediakan informasi publik dengan melakukan publikasi pada laman resmi sehingga dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah, BLUD diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memiliki keistimewaan yaitu dapat mengelola keuangannya secara fleksibel sebagai pengecualian pengelolaan keuangan dengan OPD lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun merupakan OPD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD sesuai dengan keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.RS/U.12.12.1910.I1. Sebagaimana tercantum pada Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, hal pembiayaan menyebutkan bahwa Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun diberikan kewenangan dalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai BLUD tentunya harus mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga anggaran belanja yang disediakan dapat terealisasi secara baik.

Perhitungan efisiensi realisasi anggaran RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga dihitung dengan formula :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left( \left( AAKRO_j \times \left( \prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tahun 2021 sbb :

Keluaran (Output Kegiatan)	Capaian Keluaran (Output Kegiatan)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (AARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO)-RARO
1	2	3	4	5=3x2	6=5-4
Kegiatan BLUD	100,00%	144.188.545.500,00	140.850.051.849,48	144.188.545.500,00	3.338.493.650,52
Kegiatan APBD	100,00%	298.577.274.013,00	281.538.596.001,00	298.577.274.013,00	17.038.678.012,00
<b>JUMLAH</b>		<b>442.765.819.513,00</b>	<b>422.388.647.850,48</b>	<b>442.765.819.513,00</b>	<b>20.377.171.662,52</b>
<b>Efisiensi Anggaran terhadap Realisasi</b>					<b>4,60%</b>

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi realisasi anggaran RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 sebesar **4,60%** dimana nilai idealnya atau nilai tertinggi efisiensi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen) sehingga nilai efisiensi RSSI masih dalam rentang efisien. Artinya dari alokasi anggaran yang telah ditentukan jika dihubungkan dengan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan terjadi efisiensi penggunaan sebesar 4,60%.

## **BAB IV PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis, dari jumlah 10 indikator, 7 indikator dengan kategori capaian sangat berhasil, 4 indikator dengan capaian berhasil.

## 5.2 Solusi Atas Permasalahan

Untuk terus meningkatkan kinerja Rumah Sakit Sultan Imanudin pada masa mendatang dibuat strategi:

1. Menyediakan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai dengan standar rumah sakit kelas B, misalnya dokter spesialis Jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis urologi, bedah syaraf, patologi anatomi, dokter spesialis radiologi dan dokter-dokter spesialis lainnya;
2. Memenuhi sarana dan prasarana bangunan gedung perawatan dan alat kesehatan / kedokteran sesuai dengan standar rumah sakit kelas B;
3. Meningkatkan Pendapatan BLUD untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit yaitu belanja rutin dan kebutuhan obat-obatan, bahan, alat kesehatan habis pakai dengan upaya inovasi pelayanan dan mempertahankan mutu guna menambah nilai pendapatan RS.

## Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Tentang Indikator Kinerja Utama
3. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung
4. Laporan Realisasi Anggaran
5. Apresiasi yang Pernah Diterima
6. SOP penyusunan LKjIP
7. Realisasi Indikator Kinerja Individu Pejabat RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021
8. Perjanjian Kinerja (PK)

## 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN  
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN B UN TAHUN  
2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	80%
		BOR	60-85%
		LOS	6-9 hari
		TOI	1-3 hari
		BTO	40-50 kali
		NDR	25/1000
		GDR	45/1000
2.	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	80%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	>76,61%

## 2. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Tentang Indikator Kinerja Utama



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**  
 Akreditasi KARS No. KARS-SERT/943/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017  
 Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



### **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

NOMOR : RS/U.19.06.1126 .I.3

### **TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2019-2022**

#### **DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017-2022;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tentang perubahan Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan



diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

#### **MEMUTUSKAN:**

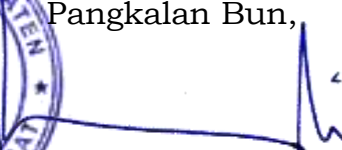
Menetapkan


KESATU

: Perubahan Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

- KEDUA : Perubahan IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017- 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada  
tanggal 27 September 2019

Direktur RSUD Sultan Imanuddin  
Pangkalan Bun,  
  
dr. FACHRUDDIN  
NIP. 19711121 200212 1 00



Lampiran : Keputusan Direktur RSUD  
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun  
Nomor : RS/U.19.06.1126.I.3  
Tanggal : 27 September 2019

**1. Unit Kerja**

: RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

**2. Tugas Pokok**

: Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan rujukan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun wajib melakukan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan teadur dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

**3. Fungsi**

a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,  
:

pengendalian, pembinaan upaya kesehatan perorangan yang kelompok dalam:

a.1. Bidang Sarana Prasarana

a.2. Bidang Pelayanan Medik

a.3. Bidang Penunjang

b. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan bidang upaya kesehatan rujukan

c. Pengelolaan sumber daya manusia

d. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

#### 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi SNARS, dibagi Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada, dikalikan dengan 100.	Laporan Hasil Survei Komisi Akreditasi RS	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	BOR	Bed Occupancy Rate (BOR) Yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, standar ideal : 60-85%.	Laporan realisasi BOR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	LOS	Average Length of Stay (Av LOS) Yaitu rata-rata lama perawatan seseorang, standar ideal : 6 – 9 hari.	Laporan realisasi LOS	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	TOI	Turn Over Interval (TOI) Yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1 – 3 hari.	Laporan realisasi TOI	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	BTO	Bed Turn Over (BTO) Yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai: 40-50 kali.	Laporan realisasi BTO	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	NDR	Net Death Rate (NDR) Yaitu angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 orang penderita keluar, angka yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.	Laporan realisasi NDR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	GDR	Gross Death Rate (GDR) Yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.	Laporan realisasi GDR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	
Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	Nilai dalam Persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Cost Recovery = Realisasi Pendapatan dibagi realisasi pengeluaran	Laporan realisasi CRR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun	
	Persentase indikator Pelayanan (SPM) yang mencapai target	Capaian Standar Minimal	Jumlah indikator SPM yang memenuhi target minimal yang telah ditetapkan dibagi seluruh indikator SPM RS dikali seratus.	Laporan realisasi SPM	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	Indeks Masyarakat Kepuasan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun	

Direktur RSUD Sultan Imanuddin  
Pangkalan Bun,

dr. FACHRUDDIN  
NIP. 19711121 200212 1 00





### 3. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung

a. Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi



## Komisi Akreditasi Rumah Sakit

# SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : **KARS-SERT/2892/XII/2021**

Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit dan dinyatakan :

**LULUS TINGKAT:**

# PARIPURNA



Kepada :

Nama Rumah Sakit : **RS UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN**  
Alamat : **Jl. Sultan Syahrir No 17 Pangkalan Bun  
KALIMANTAN TENGAH**  
Berlaku : **Sampai dengan 20 Mei 2022**

Jakarta, **20 Desember 2021**  
**KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT**  
Ketua Eksekutif



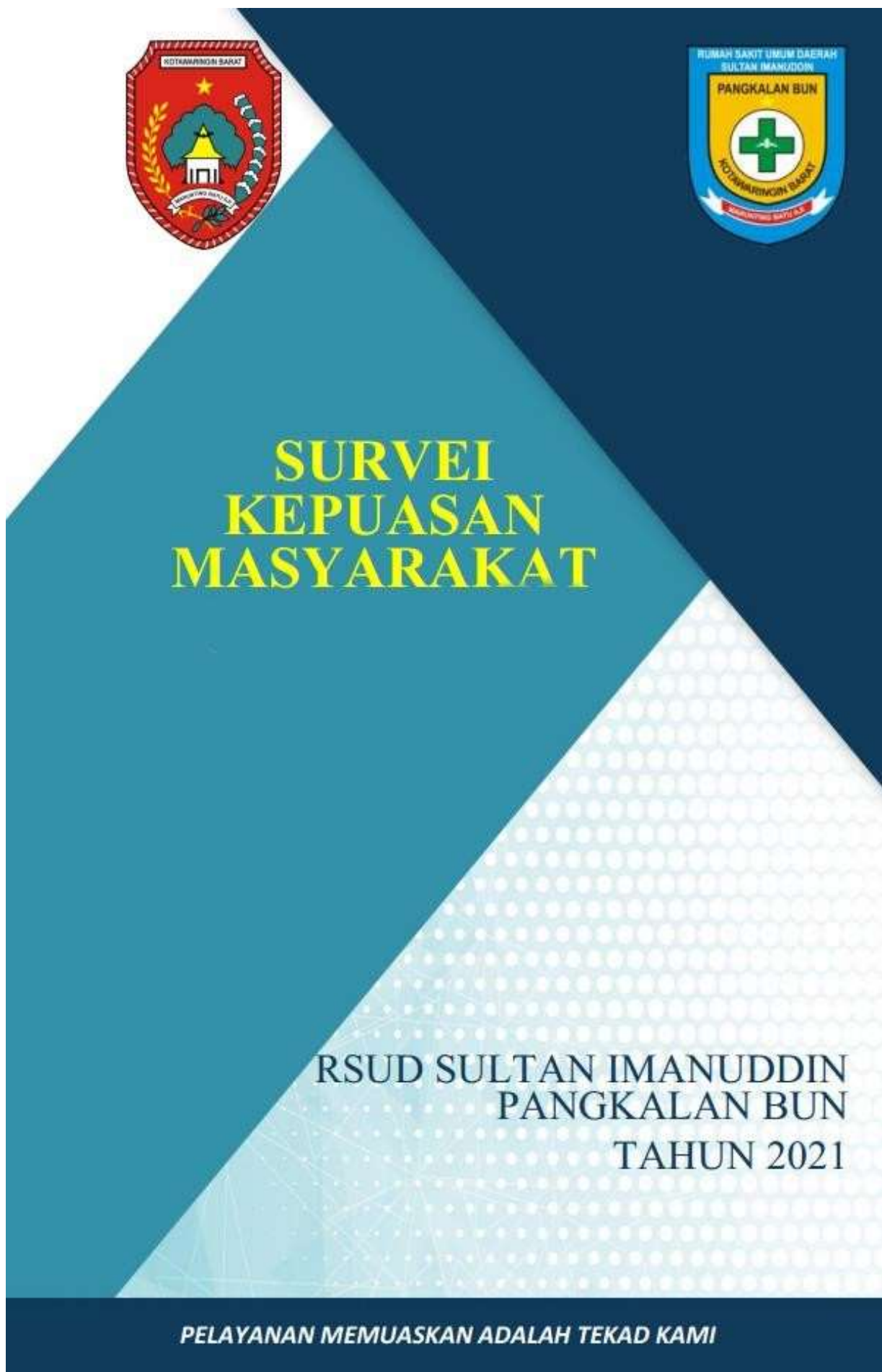
**Dr. dr. Sutoto, M. Kes, FISQu**







b. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik



**Hasil Pelaksanaan Survey IKM Tahun 2021**

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum kualitas pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dipersepsikan Baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai IKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 82,03.
2. Hasil survei menunjukkan ada 1 unsur pelayanan yang dipersepsikan Sangat Baik yaitu unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Dan 8 unsur yang dipersepsikan Baik oleh masyarakat, meliputi : 1) Biaya/tarif, 2) Kompetensi Petugas, 3) Persyaratan Pelayanan, 4) Perilaku Petugas, 5) Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, 6) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 7) Sarana dan Prasarana, dan 8) Waktu Pelayanan. Meskipun unsur-unsur pelayanan tersebut sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi.

### **B. Rekomendasi**

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama dalam kedisiplinan menjalankan SOP.
2. Diperlukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang terlibat secara langsung dalam pelayanan.
3. Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan baik kepada masyarakat maupun petugas terkait aturan-aturan yang berlaku.
4. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memberi motivasi untuk mendapatkan prestasi di

masa mendatang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

#### 4. Laporan Realisasi Anggaran

##### REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PADA SETIAP PROGRAM RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2021

Kode	Uraian	Dana DPA-SKPD (Rp.)	Realisasi			KET.
			Keuangan		Fisik	(Sisa Anggaran)
			Rp	%	%	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	182.961.722.780,00	177.429.713.269,48	96,98	99,99	5.532.009.510,52
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	104.253.030.366,00	101.730.723.906,00	97,58	100	2.522.306.460,00
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.362.520.867,00	10.380.055.180,00	91,35	100	982.465.687,00
<b>Total Pagu, Realisasi Fisik Dan Keuangan</b>		<b>298.577.274.013,00</b>	<b>289.540.492.355,48</b>	<b>96,97</b>	<b>100</b>	<b>9.036.781.657,52</b>

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PADA SETIAP PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN OBJEK BELANJA**

**RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2021**

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
			Rp	(%)	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>182.961.722.780,00</b>	<b>177.429.713.269,48</b>	<b>96,98</b>	<b>99,99</b>
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	100,00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	100,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.015.903.158,00	35.817.711.318,00	94,22	99,97
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.014.313.158,00	35.817.711.318,00	94,22	99,98
5.1.01	Belanja Pegawai	26.138.956.000,00	25.066.996.764,00	95,90	99,97
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	20.282.796.000,00	20.222.996.764,00	99,71	100,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	15.093.046.000,00	15.066.170.183,00	99,82	100,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	15.093.046.000,00	15.066.170.183,00	99,82	100,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.319.350.000,00	1.312.291.017,00	99,46	100,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.319.350.000,00	1.312.291.017,00	99,46	100,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	206.360.000,00	197.980.000,00	95,94	100,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	206.360.000,00	197.980.000,00	95,94	100,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.879.437.000,00	1.871.070.000,00	99,55	100,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.879.437.000,00	1.871.070.000,00	99,55	100,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	100.942.000,00	99.715.000,00	98,78	100,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	100.942.000,00	99.715.000,00	98,78	100,00

5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	896.414.000,00	892.576.500,00	99,57	100,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	896.414.000,00	892.576.500,00	99,57	100,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.559.000,00	25.612.909,00	96,44	100,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.559.000,00	25.612.909,00	96,44	100,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	293.000,00	241.236,00	82,33	100,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	293.000,00	241.236,00	82,33	100,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	636.110.000,00	633.900.610,00	99,65	100,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	636.110.000,00	633.900.610,00	99,65	100,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.184.000,00	30.859.797,00	98,96	100,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	31.184.000,00	30.859.797,00	98,96	100,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	93.101.000,00	92.579.512,00	99,44	100,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	93.101.000,00	92.579.512,00	99,44	100,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.848.000.000,00	4.844.000.000,00	82,83	100,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.848.000.000,00	4.844.000.000,00	82,83	100,00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
			Rp	(%)	
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.848.000.000,00	4.844.000.000,00	82,83	100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.160.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.160.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	-	-	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.875.357.158,00	10.750.714.554,00	90,53	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.875.357.158,00	10.750.714.554,00	90,53	100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.875.357.158,00	10.750.714.554,00	90,53	100,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	11.875.357.158,00	10.750.714.554,00	90,53	100,00
<b>1.02.01.2.02.05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>94,34</b>	<b>100,00</b>

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	1.500.000,00	94,34	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.500.000,00	94,34	100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.590.000,00	1.500.000,00	94,34	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.590.000,00	1.500.000,00	94,34	100,00
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>1.02.01.2.05.02</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.01	Belanja Barang	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>1.02.01.2.05.11</b>	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>45.774.310,00</b>	<b>44.902.337,00</b>	<b>98,10</b>	<b>100,00</b>
<b>1.02.01.2.06.02</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>15.794.310,00</b>	<b>15.794.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.794.310,00	15.794.310,00	100,00	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.794.310,00	15.794.310,00	100,00	100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.794.310,00	15.794.310,00	100,00	100,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.794.310,00	15.794.310,00	100,00	100,00
<b>1.02.01.2.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	100,00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
			Rp	(%)	

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	100,00
<b>1.02.01.2.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>10.480.000,00</b>	<b>9.608.027,00</b>	<b>91,68</b>	<b>100,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000,00	9.608.027,00	91,68	100,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	10.480.000,00	9.608.027,00	91,68	100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.480.000,00	9.608.027,00	91,68	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.480.000,00	9.608.027,00	91,68	100,00
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>704.999.812,00</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>99,29</b>	<b>100,00</b>
<b>1.02.01.2.07.01</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>704.999.812,00</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>99,29</b>	<b>100,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	704.999.812,00	700.000.000,00	99,29	100,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	704.999.812,00	700.000.000,00	99,29	100,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	704.999.812,00	700.000.000,00	99,29	100,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	704.999.812,00	700.000.000,00	99,29	100,00
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>1.02.01.2.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.1.02.02	Belanja Jasa	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>144.188.545.500,00</b>	<b>140.860.599.614,48</b>	<b>97,69</b>	<b>100,00</b>
<b>1.02.01.2.10.01</b>	<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	<b>144.188.545.500,00</b>	<b>140.860.599.614,48</b>	<b>97,69</b>	<b>100,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	69.439.817.076,00	69.311.596.798,48	99,82	100,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	69.439.817.076,00	69.311.596.798,48	99,82	100,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	69.439.817.076,00	69.311.596.798,48	99,82	100,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	69.439.817.076,00	69.311.596.798,48	99,82	100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.525.730.051,00	64.577.780.231,00	95,63	100,00



5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.525.730.051,00	64.577.780.231,00	95,63	100,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.525.730.051,00	64.577.780.231,00	95,63	100,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.525.730.051,00	64.577.780.231,00	95,63	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.222.998.373,00	6.971.222.585,00	96,51	100,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.222.998.373,00	6.971.222.585,00	96,51	100,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.222.998.373,00	6.971.222.585,00	96,51	100,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.222.998.373,00	6.971.222.585,00	96,51	100,00
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>104.253.030.366,00</b>	<b>101.730.723.906,00</b>	<b>97,58</b>	<b>100,00</b>
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</b>	<b>103.933.030.339,00</b>	<b>101.438.553.024,00</b>	<b>97,60</b>	<b>100,00</b>

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
			Rp	(%)	
	<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
<b>1.02.02.2.01.01</b>	<b>Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya</b>	<b>1.072.718.910,00</b>	<b>1.068.283.429,00</b>	<b>99,59</b>	<b>100,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	323.999.676,00	322.410.110,00	99,51	100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	323.999.676,00	322.410.110,00	99,51	100,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	323.999.676,00	322.410.110,00	99,51	100,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	323.999.676,00	322.410.110,00	99,51	100,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	748.719.234,00	745.873.319,00	99,62	100,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	748.719.234,00	745.873.319,00	99,62	100,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	748.719.234,00	745.873.319,00	99,62	100,00

5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	560.569.734,00	558.540.819,00	99,64	100,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	188.149.500,00	187.332.500,00	99,57	100,00
<b>1.02.02.2.01.05</b>	<b>Pengembangan Rumah Sakit</b>	<b>77.098.087.000,00</b>	<b>76.420.739.800,00</b>	<b>99,12</b>	<b>100,00</b>
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.098.087.000,00	76.420.739.800,00	99,12	100,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	77.098.087.000,00	76.420.739.800,00	99,12	100,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	77.098.087.000,00	76.420.739.800,00	99,12	100,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	77.098.087.000,00	76.420.739.800,00	99,12	100,00
<b>1.02.02.2.01.08</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit</b>	<b>2.041.578.000,00</b>	<b>2.032.681.500,00</b>	<b>99,56</b>	<b>100,00</b>
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.041.578.000,00	2.032.681.500,00	99,56	100,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.041.578.000,00	2.032.681.500,00	99,56	100,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.041.578.000,00	2.032.681.500,00	99,56	100,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.041.578.000,00	2.032.681.500,00	99,56	100,00
<b>1.02.02.2.01.08</b>	<b>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>2.595.488.429,00</b>	<b>2.506.608.982,00</b>	<b>96,58</b>	<b>100,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.915.993.600,00	1.844.596.985,00	96,27	100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.915.993.600,00	1.844.596.985,00	96,27	100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.915.993.600,00	1.844.596.985,00	96,27	100,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	273.282.000,00	272.766.876,00	99,81	100,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	493.755.000,00	452.670.909,00	91,68	100,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	1.145.456.600,00	1.115.659.200,00	97,40	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	679.494.829,00	662.011.997,00	97,43	100,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	79.999.975,00	76.670.000,00	95,84	100,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	79.999.975,00	76.670.000,00	95,84	100,00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD	
			REALISASI KEUANGAN	REAL

			Rp	(%)	FISIK (%)
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	79.999.975,00	76.670.000,00	95,84	100,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	100,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	100,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	100,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	389.449.854,00	375.967.000,00	96,54	100,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	389.449.854,00	375.967.000,00	96,54	100,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	100,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	165.749.958,00	153.120.000,00	92,38	100,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	191.449.896,00	190.597.000,00	99,55	100,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00	100,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	202.345.000,00	201.674.997,00	99,67	100,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	202.345.000,00	201.674.997,00	99,67	100,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	202.345.000,00	201.674.997,00	99,67	100,00
<b>1.02.02.2.01.14</b>	<b>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>21.125.158.000,00</b>	<b>19.410.239.313,00</b>	<b>91,88</b>	<b>100,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.125.158.000,00	19.410.239.313,00	91,88	100,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.125.158.000,00	19.410.239.313,00	91,88	100,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.125.158.000,00	19.410.239.313,00	91,88	100,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	21.125.158.000,00	19.410.239.313,00	91,88	100,00
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>270.000.027,00</b>	<b>242.615.882,00</b>	<b>89,86</b>	<b>100,00</b>
<b>1.02.02.2.02.23</b>	<b>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</b>	<b>270.000.027,00</b>	<b>242.615.882,00</b>	<b>89,86</b>	<b>100,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.027,00	242.615.882,00	89,86	100,00

5.1.02.01	Belanja Barang	270.000.027,00	242.615.882,00	89,86	100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	270.000.027,00	242.615.882,00	89,86	100,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	270.000.027,00	242.615.882,00	89,86	100,00
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.555.000,00</b>	<b>99,11</b>	<b>100,00</b>
<b>1.02.02.2.03.02</b>	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.555.000,00</b>	<b>99,11</b>	<b>100,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.555.000,00	99,11	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	50.000.000,00	49.555.000,00	99,11	100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	49.555.000,00	99,11	100,00
<b>KODE</b>	<b>URAIAN PROGRAM &amp; KEGIATAN</b>	<b>DANA DPA-SKPD (Rp.)</b>	<b>REALISASI APBD</b>		
			<b>REALISASI KEUANGAN</b>		<b>REAL FISIK (%)</b>
			<b>Rp</b>	<b>(%)</b>	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.000.000,00	49.555.000,00	99,11	100,00
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>11.362.520.867,00</b>	<b>10.380.055.180,00</b>	<b>91,35</b>	<b>100,00</b>
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.332.100.867,00</b>	<b>10.365.595.180,00</b>	<b>91,47</b>	<b>100,00</b>
<b>1.02.03.2.02.02</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</b>	<b>11.332.100.867,00</b>	<b>10.365.595.180,00</b>	<b>91,47</b>	<b>100,00</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.332.100.867,00	10.365.595.180,00	91,47	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.332.100.867,00	10.365.595.180,00	91,47	100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.332.100.867,00	10.365.595.180,00	91,47	100,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.138.860.000,00	859.854.000,00	75,50	100,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	124.848.000,00	124.848.000,00	100,00	100,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	10.068.392.867,00	9.380.893.180,00	93,17	100,00
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.420.000,00</b>	<b>14.460.000,00</b>	<b>47,53</b>	<b>100,00</b>
<b>1.02.03.2.03.01</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>30.420.000,00</b>	<b>14.460.000,00</b>	<b>47,53</b>	<b>100,00</b>

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.420.000,00	14.460.000,00	47,53	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.500.000,00	9.000.000,00	85,71	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000,00	9.000.000,00	85,71	100,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.500.000,00	9.000.000,00	85,71	100,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	19.920.000,00	5.460.000,00	27,41	100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.920.000,00	5.460.000,00	27,41	100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.920.000,00	5.460.000,00	27,41	100,00
		<b>298.577.274.013,00</b>	<b>289.540.492.355,48</b>	<b>96,97</b>	<b>100,00</b>

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp) Anggaran (RBA)	Lebih / (Kurang)		%
			Realisasi	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>143.987.585.500,00</b>	<b>140.810.359.614,48</b>	<b>3.166.571.443,52</b>	<b>97,79</b>
<b>5.1.01</b>	<b>BIAYA PELAYANAN</b>	<b>122.664.472.195,00</b>	<b>121.327.710.321,48</b>	<b>1.336.761.873,52</b>	<b>485,50</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Biaya Pegawai</b>	<b>13.306.545.000,00</b>	<b>13.274.778.883,48</b>	<b>31.766.116,52</b>	<b>99,76</b>
5.1.01.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	515.600.000,00	484.904.413,48	30.695.586,52	94,05
5.1.01.01.11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.807.445.000,00	1.807.190.000,00	255.000,00	99,99
5.1.01.01.14	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber PNS	0,00	-	0,00	#DIV/0!
5.1.01.01.15	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	-
5.1.01.01.18	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	10.797.500.000,00	10.796.684.470,00	815.530,00	-
<b>5.1.01.02</b>	<b>Biaya Bahan</b>	<b>50.044.249.879,00</b>	<b>49.041.214.046,00</b>	<b>1.003.035.833,00</b>	<b>98,00</b>
5.1.01.02.01	Biaya Bahan Obat-obatan	15.210.622.749,00	15.210.523.965,00	98.784,00	100,00
5.1.01.02.02	Biaya BHP Medis	11.219.520.460,00	11.083.385.622,00	136.134.838,00	98,79
5.1.01.02.03	Biaya Bahan dan alat Laboratorium Klinik	4.972.345.800,00	4.944.595.108,00	27.750.692,00	99,44
5.1.01.02.05	Biaya Bahan dan alat Radiologi	1.181.836.040,00	950.754.741,00	231.081.299,00	80,45
5.1.01.02.06	Biaya Bahan Makanan Pokok	2.588.920.440,00	2.276.125.860,00	312.794.580,00	87,92
5.1.01.02.07	Biaya Bahan Peralatan dan Perlengkapan Laundry	704.629.600,00	703.061.000,00	1.568.600,00	99,78
5.1.01.02.08	Biaya Bahan Gas Medis	9.939.240.000,00	9.939.182.000,00	58.000,00	100,00
5.1.01.02.09	Biaya Bahan Pengolahan Darah/Bank Darah	1.543.797.500,00	1.275.470.000,00	268.327.500,00	82,62
5.1.01.02.12	Biaya BHP Non Medis	2.683.337.290,00	2.658.115.750,00	25.221.540,00	99,06

<b>5.1.01.03</b>	<b>Biaya Jasa Pelayanan</b>	<b>56.083.272.076,00</b>	<b>55.991.817.915,00</b>	<b>91.454.161,00</b>	<b>99,84</b>
5.1.01.03.01	Biaya Jasa Pelayanan Medis	56.083.272.076,00	55.991.817.915,00	91.454.161,00	99,84
5.1.01.03.03	Lain-lain Biaya Jasa Pelayanan	0,00	-	0,00	-
<b>5.1.01.04</b>	<b>Biaya Pemeliharaan</b>	<b>1.036.894.540,00</b>	<b>984.647.777,00</b>	<b>52.246.763,00</b>	<b>94,96</b>
5.1.01.04.02	Biaya Pemeliharaan - alat Kedokteran	392.304.750,00	389.594.777,00	2.709.973,00	99,31
5.1.01.04.03	Biaya Pemeliharaan - alat Laboratorium	31.627.200,00	16.720.000,00	14.907.200,00	52,87
5.1.01.04.05	Biaya Pemeliharaan - Peralatan Laundry	33.870.625,00	33.480.000,00	390.625,00	98,85
5.1.01.04.06	Biaya Pemeliharaan - Peralatan Kesehatan/Perawatan	331.491.965,00	305.100.000,00	26.391.965,00	92,04
5.1.01.04.08	Biaya Pemeliharaan - Peralatan/ Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	68.295.000,00	6.705.000,00	91,06
5.1.01.04.09	Biaya Pemeliharaan - Jaringan Ruma Sakit	102.600.000,00	101.883.000,00	717.000,00	99,30
5.1.01.04.10	Biaya Pemeliharaan - Komputer dan Leptop	50.000.000,00	49.575.000,00	425.000,00	99,15
5.1.01.04.11	Biaya Pemeliharaan - Printer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
<b>5.1.01.05</b>	<b>Biaya Barang dan Jasa</b>	<b>2.182.835.700,00</b>	<b>2.028.851.700,00</b>	<b>153.984.000,00</b>	<b>92,95</b>
5.1.01.05.01	Biaya Cetakan Rekam Medis	1.460.292.500,00	1.460.292.500,00	0,00	100,00
5.1.01.05.03	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	56.900.000,00	54.850.000,00	2.050.000,00	96,40
5.1.01.05.04	Biaya BBM/Gas LPG	235.442.200,00	194.640.200,00	40.802.000,00	82,67
5.1.01.05.05	Biaya Peralatan Makan dan Dapur	430.201.000,00	319.069.000,00	111.132.000,00	74,17

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp) Anggaran (RBA)	Lebih / (Kurang)		%
			Realisasi	(Rp)	
<b>5.1.01.07</b>	<b>Biaya Pelayanan Lain-lain</b>	<b>10.675.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>59,95</b>
5.1.01.07.02	Biaya Program Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	10.675.000,00	6.400.000,00	4.275.000,00	59,95
<b>5.1.02</b>	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	<b>14.100.114.932,00</b>	<b>12.511.426.708,00</b>	<b>1.579.193.782,00</b>	<b>88,73</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Biaya Pegawai</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>90,00</b>
5.1.02.01.14	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	90,00
5.1.02.01.16	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	-	0,00	#DIV/0!
<b>5.1.02.02</b>	<b>Biaya Administrasi Kantor</b>	<b>3.691.614.108,00</b>	<b>3.051.841.186,00</b>	<b>639.772.922,00</b>	<b>82,67</b>
5.1.02.02.01	Biaya Alat Tulis Kantor	464.681.790,00	464.681.215,00	575,00	100,00
5.1.02.02.02	Biaya Cetak	1.348.986.410,00	1.348.966.660,00	19.750,00	100,00

5.1.02.02.03	Biaya Penggandaan	246.462.900,00	140.371.700,00	106.091.200,00	56,95
5.1.02.02.05	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	14.500.000,00	2.000.000,00	12.500.000,00	13,79
5.1.02.02.08	Biaya Makanan dan Minuman Rapat	264.000.000,00	263.032.500,00	967.500,00	99,63
5.1.02.02.12	Biaya Pakaian Dinas Harian (PDH)	270.433.008,00	270.430.600,00	2.408,00	-
5.1.02.02.15	Biaya Pakaian Kerja Lapangan	21.725.000,00	21.702.900,00	22.100,00	99,90
5.1.02.02.20	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	4.480.000,00	11.520.000,00	28,00
5.1.02.02.21	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	196.000.000,00	95.524.510,00	100.475.490,00	48,74
5.1.02.02.26	Biaya Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	848.825.000,00	440.651.101,00	408.173.899,00	51,91
<b>5.1.02.03</b>	<b>Biaya Pemeliharaan</b>	<b>1.109.000.475,00</b>	<b>1.094.980.440,00</b>	<b>14.020.035,00</b>	<b>98,74</b>
5.1.02.03.01	Biaya Pemeliharaan - Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	123.120.577,00	110.734.590,00	12.385.987,00	89,94
5.1.02.03.08	Biaya Pemeliharaan - Peralatan Dapur	966.173,00	950.000,00	16.173,00	98,33
5.1.02.03.13	Biaya Pemeliharaan - Peralatan Rumah Tangga Lainnya	160.000.000,00	159.980.000,00	20.000,00	99,99
5.1.02.03.14	Biaya Pemeliharaan - Alat-alat Besar	121.016.225,00	120.895.300,00	120.925,00	99,90
5.1.02.03.16	Biaya Pemeliharaan - Gedung dan Bangunan	382.090.000,00	382.080.550,00	9.450,00	100,00
5.1.02.03.18	Biaya Pemeliharaan - Jaringan Air	147.707.500,00	147.707.500,00	0,00	100,00
5.1.02.03.19	Biaya Pemeliharaan - Penerangan Jalan dan Taman	130.000.000,00	128.637.500,00	1.362.500,00	98,95
5.1.02.03.21	Biaya Pemeliharaan - Instalasi Pengolahan Limbah	44.100.000,00	43.995.000,00	105.000,00	99,76
<b>5.1.02.04</b>	<b>Biaya Barang dan Jasa</b>	<b>9.157.519.890,00</b>	<b>8.228.067.939,00</b>	<b>919.957.509,00</b>	<b>89,85</b>
5.1.02.04.01	Biaya alat Listrik dan Instalasi	342.639.700,00	342.639.700,00	0,00	100,00
5.1.02.04.02	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	259.405.000,00	250.249.000,00	9.156.000,00	96,47
5.1.02.04.03	Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas	336.406.500,00	336.406.250,00	250,00	100,00
5.1.02.04.04	Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	26.594.700,00	26.594.700,00	0,00	100,00
5.1.02.04.05	Biaya Telepon	66.000.000,00	13.821.561,00	52.178.439,00	20,94
5.1.02.04.06	Biaya Air	180.000.000,00	55.360.800,00	124.639.200,00	30,76
5.1.02.04.07	Biaya Listrik	2.971.773.650,00	2.454.680.960,00	517.092.690,00	82,60
5.1.02.04.09	Biaya Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	3.120.000,00	1.080.000,00	74,29
5.1.02.04.10	Biaya Kawat / Faksimile / Internet	201.412.200,00	142.317.470,00	59.094.730,00	70,66
5.1.02.04.11	Biaya Paket / Pengiriman	6.000.000,00	1.634.200,00	4.365.800,00	27,24
5.1.02.04.12	Biaya Sertifikasi	0,00	-	0,00	#DIV/0!
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp) Anggaran (RBA)</b>	<b>Lebih / (Kurang)</b>		<b>%</b>
			<b>Realisasi</b>	<b>(Rp)</b>	
5.1.02.04.13	Biaya Jasa / Administrasi Pemakaman Mayat Tak Dikenal	1.195.000.000,00	1.155.100.000,00	39.900.000,00	96,66
5.1.02.04.20	Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.725.000,00	1.875.100,00	849.900,00	68,81

5.1.02.04.38	Biaya Jasa Konsultansi Penelitian	150.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00	93,33
5.1.02.04.43	Biaya Jasa Konsultansi Penilai (Appraisal)	200.000.000,00	99.000.000,00	101.000.000,00	49,50
5.1.02.04.49	Biaya Peralatan dan Perlengkapan	170.500.000,00	169.926.000,00	574.000,00	99,66
5.1.02.04.58	Biaya Pemeriksaan Lab. Kesling	78.200.000,00	78.173.500,00	26.500,00	-
5.1.02.04.60	Biaya Jasa Pemusnahan Sampah Medis dan Abu	327.985.000,00	327.985.000,00	0,00	100,00
5.1.02.04.61	Biaya Jasa Kebersihan Kantor (CS)	2.628.678.140,00	2.621.263.698,00	7.414.442,00	-
5.1.02.04.67	Biaya Jasa Hosting / Pengembangan / Pemeliharaan Website	10.000.000,00	7.920.000,00	2.080.000,00	-
<b>5.1.02.05</b>	<b>Biaya Promosi</b>	<b>74.829.959,00</b>	<b>74.387.143,00</b>	<b>442.816,00</b>	<b>-</b>
5.1.02.05.01	Biaya Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi	74.829.959,00	74.387.143,00	442.816,00	-
5.1.02.05.02	Biaya Jasa Pembuatan Media Informasi / Publikasi	0,00	-	0,00	-
<b>5.1.02.08</b>	<b>Biaya Umum dan Administrasi Lainnya</b>	<b>17.150.500,00</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.08.01	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	17.150.500,00	17.150.000,00	500,00	100,00
<b>5.1.03</b>	<b>BIAYA INVESTASI</b>	<b>7.222.998.373,00</b>	<b>6.971.222.585,00</b>	<b>250.615.788,00</b>	<b>96,51</b>
<b>5.1.03.03</b>	<b>Biaya Modal</b>	<b>7.222.998.373,00</b>	<b>6.971.222.585,00</b>	<b>250.615.788,00</b>	<b>96,51</b>
5.1.03.03.01	Biaya Alat Kesehatan dan Kedokteran	4.563.220.000,00	4.329.536.085,00	233.683.915,00	94,88
5.1.03.03.02	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.179.013.373,00	1.166.245.500,00	12.767.873,00	98,92
5.1.03.03.05	Biaya Meubelair	491.577.500,00	487.744.500,00	3.833.000,00	99,22
5.1.03.03.08	Biaya Investasi Pembangunan Gedung	872.596.500,00	871.436.500,00		
5.1.03.03.10	Biaya Pengadaan Mesin dan Peralatan Penunjang Kesehatan	56.296.000,00	55.995.000,00	301.000,00	99,47
5.1.03.03.11	Biaya Modal Peralatan Dapur dan Laundry	11.180.000,00	11.150.000,00	30.000,00	99,73
5.1.03.03.12	Biaya Modal Software / Sistem Informasi Manajemen	49.115.000,00	49.115.000,00	0,00	100,00
<b>5.2</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>	<b>200.960.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>	<b>150.720.000,00</b>	<b>25,00</b>
<b>5.2.01</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>	<b>200.960.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>	<b>150.720.000,00</b>	<b>25,00</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b>Biaya Bunga</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>25,00</b>
5.2.01.01.01	Biaya Bunga	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	25,00
<b>5.2.01.02</b>	<b>Biaya Administrasi Bank</b>	<b>960.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>25,00</b>
5.2.01.02.01	Biaya Administrasi Bank	960.000,00	240.000,00	720.000,00	25,00
<b>JUMLAH BIAYA</b>		<b>144.188.545.500,00</b>	<b>140.860.599.614,48</b>	<b>3.317.291.443,52</b>	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD	PAGU	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	69.439.817.076	69.311.596.798,48	128.220.278	99,82



5.2.2.47.01	Belanja Barang Jasa BLUD	67.525.730.051	64.577.780.231,00	2.947.949.820	95,63
5.2.3.35.01	Belanja Modal BLUD	7.222.998.373	6.971.222.585,00	251.775.788	96,51
<b>JUMLAH BIAYA</b>		<b>144.188.545.500</b>	<b>140.860.599.614,48</b>	<b>3.327.945.886</b>	<b>97,69</b>

### 5. Apresiasi yang Pernah Diterima

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Institusi Pemberi Penghargaan</b>	<b>Tahun Penerima Penghargaan</b>
1.	Terbaik I Rumah Sakit Pelayanan Prima Kategori Rumah Sakit Rujukan Regional Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	2018-2019
2.	Juara 1 Lomba Kebersihan Tingkat SOPD se Kab. Kotawaringin Barat	Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat	2018 s.d 2019
3.	Peringkat 1 Pelayanan JKN Terunggul regional BPJS Cabang Sampit → Nominasi Nasional 42 Besar RS Terunggul Pelayanan JKN wakil Kalimantan	BPJS	2019
4.	Top BUMD Awards 2020 #Star 4	Majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan Lembaga Kajian Nawacita (LKN)	2020
5.	-	-	2021

## 6. SOP penyusunan LKjIP

	<b>Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat</b> <b>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan BU</b>	Nomor SOP : U/SOP/09/325
		Tanggal Pembuatan : 15 Juni 2019
		Tanggal Revisi :
		Tanggal Pengesahan : 17 Juni 2019
	Subag Perencanaan dan Pengendalian Program	Disahkan :  Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun  dr. FACHRUDDIN NIP. 19711121 200212 1 005
<b>SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</b>		
<b>Dasar Hukum :</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.		1. Menguasai administrasi keuangan 2. Menguasai administrasi perkantoran 3. Mampu mengoperasikan komputer
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
Renstra Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Laporan Keuangan		1. Komputer 2. Jaringan internet 3. ATK

<b>Himbauan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
LKJIP disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir	File ini disimpan oleh Subbag Perencanaan dan Pengendalian Program

Diagram Alur SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Direktur RSUD	Kepala Tata Usaha	Kasubbag Rendal	Kabid/Kasi	Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menelaah surat Bupati tentang LKjIP						Surat Bupati	1 Jam		
2.	Mendisposisi surat ke Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program						Disposisi Surat	1 jam		
3.	Mengumpulkan bahan LKjIP						Bahan Penyusunan, Renstra, RFK, PK Data Bidang	7 hari		
4.	Mengetik konsep LKjIP						Bahan Konsep LKjIP	7 hari		
5.	Memeriksa konsep LKjIP dan meneruskan ke Kepala Tata Usaha RSUD						Draf LKjIP	1 hari		
6.	Memeriksa konsep dan meneruskan ke Direktur RSUD						Kosep/hasil periksa draft LKjIP	1 hari		
7.	Memeriksa konsep LKjIP						Konsep LKjIP	1 hari		
8.	Menindaklanjuti dan mengirimkan ke Bupati, cq. Bagian Organisasi Sekda Kobar						LKjIP RSUD	1 hari		

## 7. Realisasi Indikator Kinerja Individu Pejabat RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	SASARAN	No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	T/BT
1	dr. FACHRUDDIN Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19711121 200212 1 005	DIREKTUR	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	1	Persentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	80%	92.96%	T
				2	Bed Occupancy Rate (BOR)	60%	63.71%	T
				3	Average Length of Stay (Av LOS)	6-9 Hari	4.79 hari	T
				4	Turn Over Interval (TOI)	1-3 Hari	2.73 hari	T
				5	Bed Turn Over (BTO)	40-50 Kali	48.55 kali	T
				6	Net Death Rate (NDR)	25/1000	23.78/1000	T
				7	Gross Death Rate (GDR)	45/1000	38.91/1000	T
			Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	1	Cost Recovery Rate (CRR)	60%	99.64%	T
				2	Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	80%	86.18%	T
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat	76%	82.03%	T
2	dr. RITA WEY Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19720919 2002122 006	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan Dan Penunjang	Meningkatnya mutu pelayanan medik, keperawatan dan penunjang	1	Persentase SPM di jajaran Pelayanan	80%	73%	BT
				2	Persentase Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) yang mencapai target	100%	85%	BT
			Tercukupinya peralatan kesehatan di rumah sakit	1	Persentase ketersediaan peralatan kesehatan di rumah sakit	80%	78%	BT
3	HARDINO, S.Kep. Pembina IV a NIP. 197305201993031008	Wakil Direktur Umum Dan Keuangan	Meningkatnya mutu pelayanan umum-keuangan di RS	1	Persentase SPM pelayanan administrasimanajemen dan keamanan	100%	80%	BT

			2	Indeks Profesionalitas ASN	70%	41%	BT
			3	Persentase kecukupan SDM berdasarkan kategori SDM	95%	96%	T
			4	Indeks Kepuasan Karyawan	78%	89%	T
			5	Cost Recovery Rate (CRR)	60%	99.64%	T
		Meningkatnya Tingkat	1	Persentase biaya operasional	60%	100%	T

NO	NAMA	JABATAN	SASARAN	No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	T/BT
			Kemandirian keuangan di rumah sakit	2	Ketepatan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	T
4	dr. EMMA, Sp.PK. Pembina Tingkat I / IV b NIP. 197312172005012008	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Meningkatnya mutu pelayanan medik	1	Persentase Pedoman Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway yang disusun pada masing-masing SMF di bawah jajaran yanmed	100%	100%	T
				2	Persentase IKM jajaran bidang pelayanan medik	78%	100%	T
5	dr. ABIMAYU Pembina Tingkat I / IV b NIP. 197005262005011011	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Meningkatnya mutu pelayanan penunjang	1	Persentase SPM pelayanan penunjang yang sesuai target	100%	78%	BT
				2	Persentase unit kerja yang melakukan IKM dan ditindaklanjuti jajaran bidang penunjang	78%	27%	BT
			1	Terpenuhnya fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana dan alat kesehatan dibagian penunjang	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana dan alat kesehatan dibagian penunjang yang dimanfaatkan	100%	90%	BT
6	AIMANDINATA, S.Kep. Penata Tingkat I / III d NIP. 197212271993031007	Kepala Bidang Keperawatan	Meningkatnya mutu pelayanan dan SDM keperawatan	1	Persentase pasien yang meninggal lebih dari 48 jam di ruang perawatan	100%	100%	T
				2	Persentase tindak lanjut hasil survey kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan	100%	100%	T
7	GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep. Penata Tingkat I / III d NIP. 197309251993031002	Kepala Bagian Perencanaan, Diklat dan Pengembangan	Terwujudnya pelaksanaan perencanaan program, anggaran dan evaluasi pelaporan	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	T

			kegiatan rumah sakit	2	Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan >20 jam pelajaran/orang/tahun	60%	8%	BT
--	--	--	----------------------	---	---	-----	----	----

NO	NAMA	JABATAN	SASARAN	No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	T/BT
8	RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes. Pembina IV a NIP. 196904081992031013	Kepala Bagian Keuangan	Terpenuhinya target pendapatan Rumah Sakit	1	Persentase jumlah penerimaan pendapatan rumah sakit	100%	100%	T
			Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit	1	Penilaian Kinerja Keuangan Rumah Sakit	100%	100%	T
			Meningkatnya Mutu Pelayanan Keuangan Rumah Sakit	1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) BPJS Kesehatan	80%	100%	T
9	DR. URIP SANTOSO, SH.MH. Pembina IV a NIP. 196808181988032013	Kepala Bagian Umum	Terwujudnya pemenuhan kegiatan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan ketertiban.	1	Persentase dokumen perumusan kebijakan teknis yang di susun sesuai ketentuan	100%	100%	T
				2	Persentase tindak Lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat manajemen	100%	100%	T
				3	Persentase pengaduan / konsultasi yang terselesaikan	100%	100%	T
				4	Persentase penyelesaian laporan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan Analisis Beda Kerja ( ABK )	100%	58%	BT
				5	Persentase penyelesaian laporan gangguan keamanan dan ketertiban	100%	100%	T
				6	Presentase dokumen laporan stock opname gudang logistik	100%	100%	T
10	AYU MIARSIH, S.Kep. Ns. Penata / III c NIP. 197402081998032007	Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan	Terlaksananya upaya peningkatan mutu	1	Persentase dokumen hasil IKM di jajaran seksi Pelayanan medik rawat jalan yang ditindaklanjuti	100%	100%	T



			elayanan pasien di instalasi jajaran pelayanan medik rawat jalan	2	Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di jajaran seksi Pelayanan medik rawat jalan yang ditindaklanjuti	80%	89%	T
				3	Persentase Panduan Praktek Klinis (PPK) yang disusun dibawah Jajaran Bidang Pelayanan Medik (rawat jalan)	100%	100%	T

NO	NAMA	JABATAN	SASARAN	No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	T/BT
11	SANTA BETTY, S.Tr.Keb., M.Kes Pembina IV a NIP. 19670918 198901 2 002	Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap	Terlaksananya upaya peningkatan mutu pelayanan pasien di instalasi jajaran pelayanan medik rawat inap	1	Persentase dokumen hasil IKM di jajaran seksi Pelayanan medik rawat Inap yang ditindaklanjuti	100%	100%	T
				2	Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di jajaran seksi Pelayanan medik rawat inap yang ditindaklanjuti	80%	93%	T
				3	Persentase Panduan Praktek Klinis (PPK) yang disusun dibawah Jajaran Bidang Pelayanan Medik (rawat inap)	100%	100%	T
12	MIA ANDRIYANI, S.Farm. Apt.MPH. Pembina IV a NIP. 198203272008032001	Seksi Penunjang Medik	Terlaksananya upaya peningkatan mutu pelayanan di jajaran penunjang medik	1	Persentase dokumen hasil IKM di jajaran seksi penunjang medik yang ditindaklanjuti	100%	100%	T
				2	Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di jajaran seksi penunjang medik	80%	68%	BT
				3	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Foto Thorax (< 3 Jam)	100%	100%	T
				4	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium (< 120 menit)	100%	89%	BT
				5	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi (< 30 menit)	100%	70%	0
				6	Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan (< 10 menit)	100%	88%	BT

				7	Waktu Tanggap Pelayanan Perawatan Jenazah	100%	100%	T
13	SONNY SAPUTRA, SKM.,MM Pembina IV a NIP. 197505081999031002	Seksi Penunjang Non Medik	Terlaksananya upaya peningkatan mutu pelayanan di jajaran penunjang non medik	1	Persentase dokumen hasil IKM di jajaran seksi penunjang non medik yang ditindaklanjuti	100%	100%	T
				2	Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di jajaran seksi penunjang non medik	80%	70%	T
				3	Persentase parameter air bersih yang diperiksa dan yang memenuhi syarat	100%	83%	BT
				4	Persentase parameter air limbah yang diperiksa dan memenuhi syarat	100%	60%	BT
				5	Kecepatan Memberikan Pelayanan Ambulans/Mobil Jenazah di Rumah Sakit (< 30	100%	94%	BT

NO	NAMA	JABATAN	SASARAN	No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	T/BT
					menit)			
				6	Waktu Tanggap Kerusakan Alat	80%	98%	T
				7	Ketepatan Waktu Penyediaan Linen Untuk Ruang Rawat Inap Dan Ruang Pelayanan	100%	100%	T
				8	Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien	<20%	25%	BT
				9	Persentase gedung yang dipelihara dan dipelihara serta memenuhi syarat	100%	100%	T
				10	Waktu respon terhadap listrik mati	100%	100%	T
14	WAHYONO, S.Kep. Ns.M.Kep Penata Tingkat I / III d NIP. 198106242008031001	Seksi Keperawatan Rawat Jalan	Meningkatnya kualitas asuhan keperawatan dan SDM keperawatan	1	Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di Pelayanan keperawatan rawat jalan yang ditindaklanjuti	100%	89%	BT
				2	Persentase dokumen hasil IKM di unit seksi pelayanan keperawatan rawat jalan yang ditindaklanjuti	100%	100%	T

				3	Persentase dokumen hasil tindak lanjut survey kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan rawat jalan	90%	77%	T
15	NORKHAFSOH, S.Kep. Penata Tingkat I / III d NIP. 198412072009032003	Seksi Keperawatan Rawat Inap	Meningkatnya kualitas asuhan keperawatan dan SDM keperawatan	1	Persentase dokumen evaluasi hasil SPM (pasien yang meninggal lebih dari 48 jam di ruang perawatan) pelayanan keperawatan rawat inap yang ditindaklanjuti	100%	100%	T
				2	Persentase dokumen hasil IKM di unit seksi pelayanan keperawatan rawat inap yang ditindaklanjuti	100%	100%	T
				3	Persentase dokumen hasil tindak lanjut survey kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan rawat inap	90%	100%	T
16	AVRIAZAR BENG KIUK, SKM. MPH. Pembina IV a NIP. 198004062005011010	Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan berkualitas dan tepat waktu	1	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun	100%	95%	BT

NO	NAMA	JABATAN	SASARAN	No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	T/BT
			Terlaksananya SIMRS	1	Persentase aplikasi simrs yang yang terimplementasi.	100%	80%	BT
17	WINDARTI AJI, S.PSi, M.Psi.	Sub Bagian Diklat, Penelitian dan Pengembangan SDM	Tersedianya perencanaan kebutuhan diklat dan litbang	1	Persentase dokumen perencanaan kegiatan tahunan diklat yang disusun	100%	100%	T
				2	Persentase kegiatan Diklat yang terlaksana	100%	95%	BT
				3	Persentase kegiatan litbang yang terlaksana	100%	95%	BT
18	YOGIE KURNIAWAN, SE.M.ec.Dev.	Sub Bagian Anggaran, Verifikasi	Terlaksananya verifikasi pendapatan	1	Persentase surat tanda setoran yang terverifikasi	100%	100%	T

	Penata Tingkat I / III d NIP. 198611112009031002	dan Perbendaharaan	Terlaksananya pemberian Informasi Tentang Tagihan Pasien Rawat Inap	1	Kecepatan Waktu Pemberian Informasi Tentang Tagihan Pasien Rawat Inap (< 2 jam)	100%	99.75%	BT
			Terlaksananya Ketepatan Waktu Pemberian Insentif jasa pelayanan	1	Ketepatan Waktu Pemberian Insentif jasa pelayanan.	100%	100%	T
			Terlaksananya proses verifikasi belanja	1	Persentase Surat Perintah Membayar (SPM) yang terealisasi	100%	100%	T
19	IGNATIUS DWIMANIKWARNO, SE Penata III c NIP.197212062006041014	Sub Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan aset Rumah Sakit sesuai ketentuan	1	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Tersusun sesuai Ketentuan	100%	100%	T
				2	Persentase Dokumen Laporan Aset yang Tersusun sesuai Ketentuan	100%	100%	T
20	MEILA DYAH KURNIAWATI, S.AP Penata III c NIP.	Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Terlaksananya penatalaksanaan SDM	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SDM berdasarkan ABK	100%	58%	BT
				2	Persentase bahan evaluasi penggajian remunerasi pegawai	100%	100%	T
				3	Ketepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat	100%	100%	T
				4	Ketepatan Waktu Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	100%	100%	T
21	SRI PURWENI.S.Kep.Ners.M.Kep	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan	Terlaksananya tata kelola	1	Jumlah Rancangan dokumen perundangundangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	T

NO	NAMA	JABATAN	SASARAN	No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	T/BT
	Penata Tingkat I / III d NIP. 197309292000122004	Humas	bagian Tata Usaha, Hukum dan Hubungan Masyarakat	2	Jumlah pengaduan masyarakat pengguna jasa RS yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	T
				3	Jumlah surat keterangan yang dikelola sesuai SPO	100%	100%	T

22	AGUS JAMALUDIN, SKM, M.P.H. Penata Tingkat I / III d NIP. 198305082009031003	Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Terlaksananya pemenuhan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rumah tangga, meliputi ; ketertiban dan keamanan, kebersihan rumah sakit, perlengkapan, pelaksanaan dan pelayanan adminstrasi bidang rumah tangga, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang rumah tangga.	1	Persentase terlayannya kegiatan rumah tangga dan perlengkapan	100%	100%	T
				2	Persentase Penanganan laporan pengaduan kamanan dan ketertiban di lingkungan RS	100%	100%	T
				3	Persentase terlaksananya kegiatan stock ofname gudang logistik setiap bulannya dalam satu tahun	100%	100%	T

## **8. Perjanjian Kinerja (PK)**





**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

*Pelayanan yang memuaskan adalah tekad kami*



**TAHUN  
2021**

**PERJANJIAN KINERJA  
PERUBAHAN**



rsudpbun@gmail.com



Jl. Sultan Syahrir No.17, Pangkalan Bun



0532 - 21404



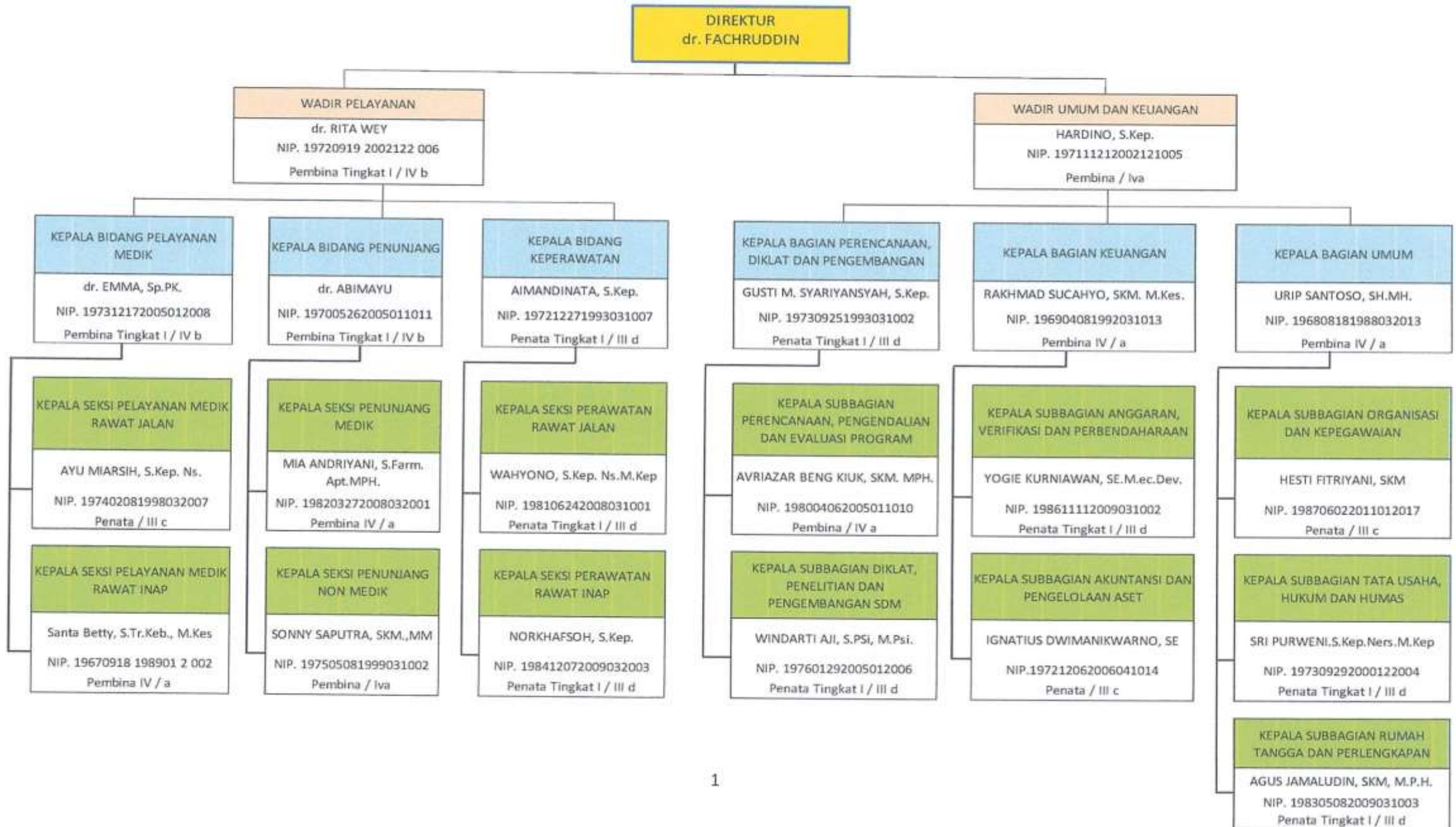


PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2021  
PERUBAHAN

## Daftar Isi

Halaman Judul	
Daftar Isi .....	i
Struktur Organisasi RSUD Tahun 2021 .....	1
PK Direktur .....	3
A. Wakil Direktur Pelayanan.....	6
1. Kepala Bidang Pelayanan Medik .....	9
a. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; .....	11
b. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap. ....	13
2. Kepala Bidang Penunjang.....	15
a. Kepala Seksi Penunjang Medik; .....	18
b. Kepala Seksi Penunjang Non Medik. ....	20
3. Kepala Bidang Keperawatan .....	22
a. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan .....	24
b. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.....	26
B. Wakil Direktur Umum dan Keuangan .....	28
1. Kepala Bagian Perencanaan, Diklat dan Pengembangan .....	31
a. Kepala Subbagian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program; .	33
b. Kepala Subbagian Diklat, Penelitian dan Pengembangan SDM. ....	35
2. Kepala Bagian Keuangan.....	37
a. Kepala Subbagian Anggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan;.....	39
b. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pengelolaan Aset. ....	41
3. Kepala Bagian Umum .....	43
a. Kepala Subbagian Tata Usaha, Hukum dan Humas;.....	46
b. Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian; .....	48
c. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.....	50

## Struktur Organisasi RSUD Tahun 2021



**Susunan Organisasi UPT RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kelas B  
terdiri atas:**

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
  1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
    - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
    - b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
  2. Bidang Penunjang, membawahi:
    - a) Seksi Penunjang Medik; dan
    - b) Seksi Penunjang Non Medik.
  3. Bidang Keperawatan, membawahi:
    - a) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan
    - b) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
  1. Bagian Perencanaan, Diklat dan Pengembangan, membawahi:
    - a) Subbagian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program;
    - b) Subbagian Diklat, Penelitian dan Pengembangan SDM.
  2. Bagian Keuangan, membawahi:
    - a) Subbagian Anggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan;
    - b) Subbagian Akuntansi dan Pengelolaan Aset.
  3. Bagian Umum, membawahi:
    - a) Subbagian Tata Usaha, Hukum dan Humas;
    - b) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
    - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



Kepada Yth.  
Bupati  
Kotawaringin Barat  
di -  
Pangkalan Bun

**SURAT PENGANTAR**

Nomor :

Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya:

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Jumlah	Ket.
1.	Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	1 (satu) berkas	
2.	Dokumen Bisnis Anggaran Perubahan Tahun 2021	1 (satu) berkas	

Pangkalan Bun, Oktober 2021



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Sultan Immanuel Pangkalan Bun,

**dr. FACHRUDDIN**

NIP. 19711121 200212 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. FACHRUDDIN**  
Jabatan : Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. NURHIDAYAH, SH, MH**  
Jabatan : Bupati Kotawaringin Barat  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Kedua  
Bupati Kotawaringin Barat,

**Hj. NURHIDAYAH, SH, MH**

Pihak Pertama,  
Direktur RSUD Sultan Imanuddin  
Pangkalan Bun,

**dr. FACHRUDDIN**  
NIP. 19711121 200212 1 005

RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1 SETDA	
3. DIREKTUR	
4. WADIR UMUM-KEUANGAN	
5. KABAG RENDALEV-LITBANG	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Nama : dr. FACHRUDDIN

Jabatan : Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	>80 %
		BOR	60-85%
		LOS	6-9 hari
		TOI	2 hari
		BTO	40-50 kali
		NDR	25/1000
		GDR	45/1000
2.	Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	>60%
		Persentase Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78%

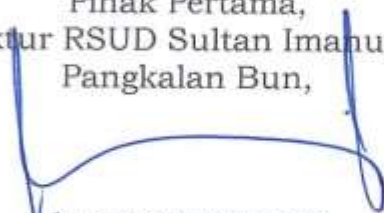
No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	182,961,722,780.00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	104,253,030,366.00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11,362,520,867.00
<b>Jumlah</b>		<b>298,577,274,013.00</b>

Pihak Kedua  
Bupati Kotawaringin Barat,








Hj. NURHIDAYAH, SH, MH

Pihak Pertama,  
Direktur RSUD Sultan Imanuddin  
Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN  
NIP. 19711121 200212 1 005

RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1 SETDA	
3. DIREKTUR	
4. WADIR UMUM-KEUANGAN	
5. KABAG RENDALEV-LITBANG	





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. RITA WEY**

Jabatan : Wadir Pelayanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. FACHRUDDIN**

Jabatan : Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**dr. FACHRUDDIN**  
NIP. 19711121 200212 1 005

**Pihak Pertama,**



**dr. RITA WEY**  
NIP. 19720919 2002122 006



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021

Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah

Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **dr. RITA WEY**  
 Jabatan : **Wadir Pelayanan**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Target 2021
1.	Meningkatnya mutu pelayanan medik, keperawatan dan penunjang	Persentase SPM di jajaran Pelayanan	100%
		Persentase Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) yang mencapai target	100%
2.	Tercukupinya peralatan kesehatan di rumah sakit	Persentase ketersediaan peralatan kesehatan di rumah sakit	80%

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.383.423.430,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	65.433.435.630,00
	Unit Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)	86.800.000,00
	Unit Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	88.500.000,00
	Unit Pelayanan Instalasi Fisioterapi / Rehabilitasi Medik	42.720.000,00
	Unit Pelayanan Instalasi Hemodialisa	3.894.204.600,00
	Unit Pelayanan Instalasi Rawat Inap	1.818.000.000,00
	Unit Perawatan Intensif (ICU)	33.000.000,00
	Unit Pelayanan Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Anaestesi	28.250.000,00
	Instalasi Gizi	3.134.795.113,00
	Instalasi Laboratorium	5.020.148.000,00
	Instalasi Radiologi	3.769.206.913,00
	Instalasi Farmasi	32.299.969.524,00
	Divisi Laundry	738.500.225,00
	Instalasi Pemulasaraan Jenazah	1.200.790.000,00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR)	7.798.488.815,00
	Instalasi Rekam Medik	1.460.292.500,00
	Divisi Transportasi	275.485.200,00
	Unit Bank Darah	1.983.763.550,00
	Divisi CSSD	1.710.508.990,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	104.203.030.366,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	103.933.030.339,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270.000.027,00
		<b>169.586.453.796,00</b>

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**dr. FACHRUDDIN**

NIP. 19711121 200212 1 005

**Pihak Pertama,**

**dr. RITA WEY**

NIP. 19720919 2002122 006



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021

Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah

Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. EMMA, Sp.PK**

Jabatan : Kabid Pelayanan Medik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. RITA WEY**

Jabatan : Wadir Pelayanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**dr. RITA WEY**

NIP. 19720919 2002122 006

**Pihak Pertama,**

**dr. EMMA, Sp.PK**

NIP. 197312172005012008

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : dr. EMMA, Sp.PK.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Meningkatnya mutu pelayanan medik	1. Persentase Pedoman Pelayanan Klinis dan <i>Clinical Pathway</i> yang disusun pada masing-masing SMF di bawah jajaran yanmed	100%
		2. Persentase IKM jajaran bidang pelayanan medik	78%

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.993.300.000,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.993.300.000,00
	Unit Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)	86.800.000,00
	Unit Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	88.500.000,00
	Unit Pelayanan Instalasi Rawat Inap	1.818.000.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.125.158.000,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.125.158.000,00
<b>Total</b>		<b>23.118.458.000,00</b>

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Kedua,



dr. RITA WEY

NIP. 19720919 2002122 006

Pihak Pertama,



dr. EMMA Sp.PK

NIP. 197312172005012008



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021

Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah

Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rsi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AYU MIARSIH, S.Kep. Ns.**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. EMMA, Sp.PK**

Jabatan : Kabid Pelayanan Medik

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**dr. EMMA, Sp.PK**

NIP. 197312172005012008

**Pihak Pertama,**

**AYU MIARSIH, S.Kep. Ns.**

NIP. 197402081998032007

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **AYU MIARSIH, S.Kep. Ns.**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya upaya peningkatan mutu pelayanan pasien di instalasi jajaran pelayanan medik rawat jalan	Persentase dokumen hasil IKM di jajaran seksi Pelayanan medik rawat jalan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di jajaran seksi Pelayanan medik rawat jalan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Panduan Praktek Klinis (PPK) yang disusun dibawah Jajaran Bidang Pelayanan Medik (rawat jalan)	100%

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**dr. EMMA, Sp.PK**  
NIP. 197312172005012008

**Pihak Pertama,**



**AYU MIARSIH, S.Kep. Ns.**  
NIP. 197402081998032007



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SANTA BETTY, S.Tr.Keb., M.Kes**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. EMMA, Sp.PK**

Jabatan : Kabid Pelayanan Medik

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**dr. EMMA, Sp.PK**  
NIP. 197312172005012008

**Pihak Pertama,**

**SANTA BETTY, S.Tr.Keb., M.Kes**  
NIP. 19670918 198901 2 002



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

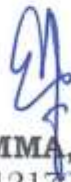
Nama : **SANTA BETTY, S.Tr.Keb., M.Kes**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya upaya peningkatan mutu pelayanan pasien di instalasi jajaran pelayanan medik rawat inap	Persentase dokumen hasil IKM di jajaran seksi Pelayanan medik rawat inap yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di jajaran seksi Pelayanan medik rawat inap yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Panduan Praktek Klinis (PPK) yang disusun dibawah Jajaran Bidang Pelayanan Medik (rawat inap)	100%

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**dr. EMMA, Sp.PK**  
NIP. 197312172005012008

**Pihak Pertama,**



**SANTA BETTY, S.Tr.Keb., M.Kes**  
NIP. 19670918 198901 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. ABIMAYU**

Jabatan : Kabid Penunjang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. RITA WEY**

Jabatan : Wadir Pelayanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**dr. RITA WEY**

NIP. 19720919 2002122 006

**Pihak Pertama,**

**dr. ABIMAYU**

197005262005011011

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : dr. ABIMAYU

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang

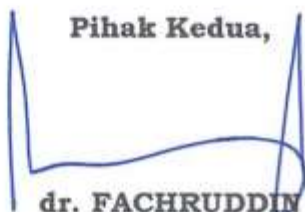
No.	Sasaran Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Target 2021
1.	Meningkatnya mutu pelayanan penunjang	Persentase SPM pelayanan penunjang yang sesuai target	100%
		Persentase unit kerja yang melakukan IKM dan ditindaklanjuti jajaran bidang penunjang	78%
2.	Terpenuhnya fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana dan alat kesehatan dibagian penunjang	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana dan alat kesehatan dibagian penunjang yang dimanfaatkan	80%

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.625.656.640,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	61.625.656.640,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	61.625.656.640,00
1.02.02.04	Unit Pelayanan Instalasi Hemodialisa	3.894.216.800,00
1.02.02.08	Instalasi Gizi	3.184.795.113,00
1.02.02.09	Instalasi Laboratorium	5.653.957.000,00
1.02.02.10	Instalasi Radiologi	3.535.397.913,00
1.02.02.11	Instalasi Farmasi	32.299.969.524,00
1.02.02.12	Divisi Laundry	738.500.225,00
1.02.02.13	Instalasi Pemulasaraan Jenazah	800.790.000,00
1.02.02.15	Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)	7.798.488.815,00
1.02.02.18	Instalasi Rekam Medik	1.460.292.500,00
1.02.02.32	Divisi Transportasi	275.485.200,00
1.02.02.33	Unit Bank Darah	1.983.763.550,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	82.807.872.339,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	82.807.872.339,00
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta	

	Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.072.718.910,00
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	77.098.087.000,00
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.041.578.000,00
1.02.02.2.01.08	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.595.488.429,00
<b>TOTAL</b>		<b>144.433.528.979,00</b>

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**dr. FACHRUDDIN**

NIP. 19711121 200212 1 005

**Pihak Pertama,**



**dr. ABIMAYU**

NIP. 197005262005011011



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIA ANDRIYANI, S.Farm. Apt.MPH.**

Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. ABIMAYU**

Jabatan : Kabid Penunjang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**dr. ABIMAYU**  
NIP. 197005262005011011

**Pihak Pertama,**

**MIA ANDRIYANI, S.Farm. Apt.MPH.**  
NIP. 198203272008032001

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **MIA ANDRIYANI, S.Farm. Apt.MPH.**

Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medik

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya upaya peningkatan mutu pelayanan di jajaran penunjang medik	1. Persentase dokumen hasil IKM di jajaran seksi penunjang medik yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di jajaran seksi penunjang medik	100%
		3. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Foto Thorax (<3 Jam)	100%
		4. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium (<120 menit)	100%
		5. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi (< 30 menit)	100%
		6. Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan (<10 menit)	100%
		7. Waktu Tanggap Pelayanan Perawatan Jenazah	100%

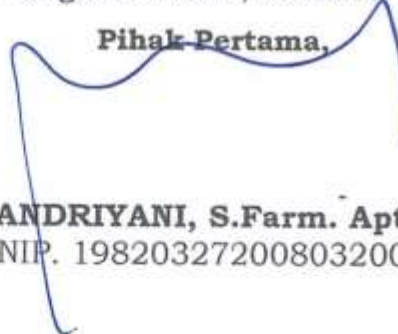
**Pihak Kedua,**



**dr. ABIMAYU**  
NIP. 197005262005011011

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Pertama,**



**MIA ANDRIYANI, S.Farm. Apt.MPH.**  
NIP. 198203272008032001



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah

Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SONNY SAPUTRA, SKM.,MM**

Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Non Medik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. ABIMAYU**

Jabatan : Kabid Penunjang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**dr. ABIMAYU**

NIP. 197005262005011011

**Pihak Pertama,**

**SONNY SAPUTRA, SKM.,MM**

NIP. 197505081999031002

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : SANTA BETTY, S.Tr.Keb., M.Kes

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya upaya peningkatan mutu pelayanan di jajaran penunjang non medik	1. Persentase dokumen hasil IKM di jajaran seksi penunjang non medik yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di jajaran seksi penunjang non medik	100%
		3. Persentase parameter air bersih yang diperiksa dan yang memenuhi syarat	100%
		4. Persentase parameter air limbah yang diperiksa dan memenuhi syarat	100%
		5. Kecepatan Memberikan Pelayanan Ambulans/Mobil Jenazah di Rumah Sakit (< 30 menit)	100%
		6. Waktu Tanggap Kerusakan Alat	80%
		7. Ketepatan Waktu Penyediaan Linen Untuk Ruang Rawat Inap Dan Ruang Pelayanan	100%
		8. Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien	<20%
		9. Persentase gedung yang dipelihara dan dipelihara serta memenuhi syarat	100%
		10. Waktu respon terhadap listrik mati	100%

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**dr. ABIMAYU**  
NIP. 197005262005011011

**Pihak Pertama,**



**SONNY SAPUTRA, SKM.,MM**  
NIP. 197505081999031002





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AIMANDINATA, S.Kep.**

Jabatan : Kabid Keperawatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. RITA WEY**

Jabatan : Wadir Pelayanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**dr. RITA WEY**

NIP. 19720919 2002122 006

**Pihak Pertama,**

**AIMANDINATA, S.Kep.**

NIP. 197212271993031007

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : AIMANDINATA, S.Kep.

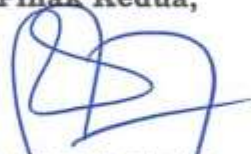
Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan

No.	Sasaran Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Target 2021
1.	Meningkatnya mutu pelayanan dan SDM keperawatan	1. Persentase pasien yang meninggal lebih dari 48 jam di ruang perawatan	25 per 1000
		2. Persentase tindak lanjut hasil survey kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan	100%

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	103,970,000.00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	103,970,000.00
	Unit Pelayanan Instalasi Fisioterapi / Rehabilitasi Medik	42,720,000.00
	Unit Perawatan Intensif (ICU)	33,000,000.00
	Unit Pelayanan Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Anaestesi	28,250,000.00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270,000,027.00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	270,000,027.00
<b>Total</b>		<b>373,970,027.00</b>

Pangkalan Bun, Oktober 2021

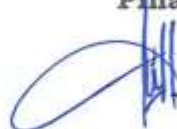
**Pihak Kedua,**



**dr. RITA WEX**

NIP. 19720919 2002122 006

**Pihak Pertama,**



**AIMANDINATA, S.Kep.**

NIP. 197212271993031007



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah

Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYONO, S.Kep. Ns.M.Kep**

Jabatan : Kepala Seksi Perawatan Rawat Jalan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AIMANDINATA, S.Kep.**

Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**AIMANDINATA, S.Kep.**  
NIP. 197212271993031007

**Pihak Pertama,**

**WAHYONO, S.Kep. Ns.M.Kep**  
NIP. 198106242008031001

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **WAHYONO, S.Kep. Ns.M.Kep**

Jabatan : Kepala Seksi Perawatan Rawat Jalan

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Meningkatnya kualitas asuhan keperawatan dan SDM keperawatan	Persentase dokumen evaluasi hasil SPM di Pelayanan keperawatan rawat jalan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase dokumen hasil IKM di unit seksi pelayanan keperawatan rawat jalan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase dokumen hasil tindak lanjut survey kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan rawat jalan	90%

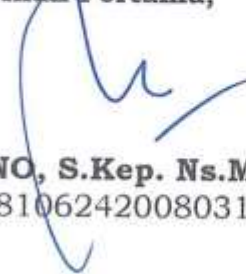
**Pihak Kedua,**



**AIMANDINATA, S.Kep.**  
NIP. 197212271993031007

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Pertama,**



**WAHYONO, S.Kep. Ns.M.Kep**  
NIP. 198106242008031001



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NORKHAFSOH, S.Kep.**

Jabatan : Kepala Seksi Perawatan Rawat Inap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AIMANDINATA, S.Kep.**

Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**AIMANDINATA, S.Kep.**  
NIP. 197212271993031007

**Pihak Pertama,**

**NORKHAFSOH, S.Kep.**  
NIP. 198412072009032003

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **NORKHAFSOH, S.Kep.**

Jabatan : Kepala Seksi Perawatan Rawat Inap

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Meningkatnya kualitas asuhan keperawatan dan SDM keperawatan	Persentase dokumen evaluasi hasil SPM (pasien yang meninggal lebih dari 48 jam di ruang perawatan) pelayanan keperawatan rawat inap yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase dokumen hasil IKM di unit seksi pelayanan keperawatan rawat jalan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase dokumen hasil tindak lanjut survey kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan rawat jalan	90%

**Pihak Kedua,**



**AIMANDINATA, S.Kep.**  
NIP. 197212271993031007

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Pertama,**



**NORKHAFSOH, S.Kep.**  
NIP. 198412072009032003



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARDINO, S.Kep.**

Jabatan : Wadir Umum Dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. FACHRUDDIN**

Jabatan : Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**dr. FACHRUDDIN**

NIP. 19711121 200212 1 005

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Pertama,

**HARDINO, S.Kep.**

NIP. 197305201993031008



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
 Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah

Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **HARDINO, S.Kep.**

Jabatan : **Wadir Umum Dan Keuangan**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Target 2021
1.	Meningkatnya mutu pelayanan umum-keuangan di RS	Persentase SPM pelayanan administrasi-manajemen dan keamanan	100%
		Indeks Profesionalitas ASN	>70%
		Persentase kecukupan SDM berdasarkan kategori SDM	95%
2.		Indeks Kepuasan Karyawan	78%
3.	Meningkatnya Tingkat Kemandirian keuangan di rumah sakit	Cost Recovery Rate (CRR)	60%
4.		Persentase biaya operasional	60%
5.		Ketepatan pelaksanaan kegiatan	100%

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.578.299.350,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.015.903.158,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.774.310,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	704.999.812,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	78.805.122.070,00



KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Divisi Logistik dan Perbekalan	156.165.544,00
	Divisi Pendidikan dan Pelatihan	1.874.425.000,00
	Divisi SIMRS dan Pemasaran Sosial	1.337.315.000,00
	Divisi Administrasi Umum	2.122.368.600,00
	Divisi Kepegawaian	270.433.008,00
	Divisi Promosi	255.216.992,00
	Sub Bagian Keuangan	72.719.650.726,00
	Sub Bagian Perencanaan	69.547.200,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	50.000.000,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.362.520.867,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11.332.100.867,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.420.000,00
<b>Total</b>		<b>128.990.820.217,00</b>

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**dr. FACHRUDDIN**

NIP. 19711121 200212 1 005

**Pihak Pertama,**



**HARDINO, S.Kep.**

NIP. 197305201993031008



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Diklat Dan Pengembangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARDINO, S.Kep.**

Jabatan : Wadir Umum Dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

  
**HARDINO, S.Kep.**  
NIP. 197305201993031008

**Pihak Pertama,**

  
**GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**  
NIP. 197309251993031002

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Diklat Dan Pengembangan

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terwujudnya pelaksanaan perencanaan program, anggaran dan evaluasi pelaporan kegiatan rumah sakit	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%
		Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan $\geq$ 20 jam pelajaran/orang/ tahun	60%

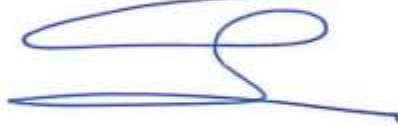
KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.281.287.200,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.281.287.200,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.406.850.000,00
1.02.02.17	Divisi Pendidikan dan Pelatihan	1.874.425.000,00
1.02.02.19	Divisi SIMRS dan Pemasaran Sosial	1.337.315.000,00
1.02.02.34	Sub Bagian Perencanaan	69.547.200,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	50.000.000,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.420.000,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.420.000,00
		<b>3.361.707.200,00</b>

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

  
**HARDINO, S.Kep.**  
 NIP. 197305201993031008

**Pihak Pertama,**

  
**GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**  
 NIP. 197309251993031002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021

Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah

Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AVRIAZAR BENG KIUK, SKM. MPH.**

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Diklat Dan Pengembangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**  
NIP. 197309251993031002

**Pihak Pertama,**

**AVRIAZAR BENG KIUK, SKM. MPH.**  
NIP. 198004062005011010

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **AVRIAZAR BENG KIUK, SKM. MPH.**

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program

No	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan berkualitas dan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun : 1) Menyusun Rencana Kerja (Renja) 2) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 3) Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 4) Menyusun Dokumen Bisnis Anggaran (DBA-BLUD) 5) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 6) Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) 7) Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) 8) Menyusun Rencana Aksi Program dan Kegiatan 9) Menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) 10) Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) 11) Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan 12) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 13) Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 14) Menghimpun Bahan Penyusunan LKPJ Bupati 15) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 16) Menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) 17) Menyusun Usulan Standar Harga 18) Menyusun Usulan RKBMD 19) Menyusun laporan tingkat kesehatan BLUD	100%
2.	Terlaksananya SIMRS	Persentase aplikasi simrs yang yang terimplementasi.	100%

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**  
NIP. 197309251993031002

**Pihak Pertama,**



**AVRIAZAR BENG KIUK, SKM. MPH.**  
NIP. 198004062005011010



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WINDARTI AJI, S.PSi, M.Psi.**

Jabatan : Kepala Subbagian Diklat, Penelitian Dan Pengembangan Sdm

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Diklat Dan Pengembangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**  
NIP. 197309251993031002

**Pihak Pertama,**

**WINDARTI AJI, S.PSi, M.Psi.**  
NIP. 197601292005012006

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **WINDARTI AJI, S.PSi, M.Psi.**

Jabatan : Kepala Subbagian Diklat, Penelitian Dan Pengembangan Sdm

No	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Tersedianya perencanaan kebutuhan diklat dan litbang	Persentase dokumen perencanaan kegiatan tahunan diklat yang disusun	100%
		Persentase kegiatan Diklat yang terlaksana	100%
		Persentase kegiatan litbang yang terlaksana	100%

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**GUSTI M. SYARIYANSYAH, S.Kep.**  
NIP. 197309251993031002

**Pihak Pertama,**



**WINDARTI AJI, S.PSi, M.Psi.**  
NIP. 197601292005012006



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARDINO, S.Kep.**

Jabatan : Wadir Umum Dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

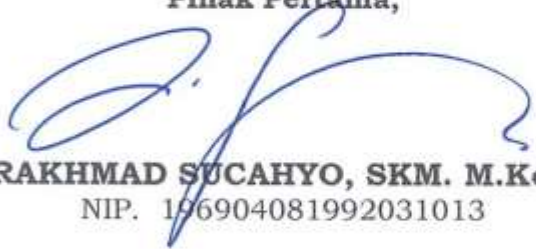
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

  
**HARDINO, S.Kep.**  
NIP. 197305201993031008

**Pihak Pertama,**

  
**RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**  
NIP. 196904081992031013



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terpenuhinya target pendapatan Rumah Sakit	Persentase jumlah penerimaan pendapatan rumah sakit	100%
2.	Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit	Penilaian Kinerja Keuangan Rumah Sakit	100%
3.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Keuangan Rumah Sakit	Tingkat Kepuasan Pelayanan Surat Elibilitas Peserta (SEP) BPJS Kesehatan	80%

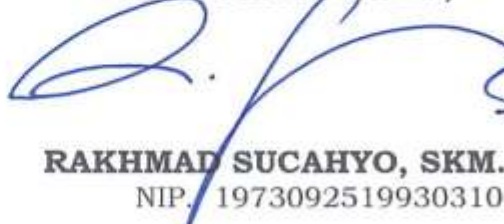
KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.742.053.884,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.015.903.158,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.014.313.158,00
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.590.000,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	72.719.650.726,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	72.719.650.726,00
1.02.02.24	Sub Bagian Keuangan	72.719.650.726,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.332.100.867,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11.332.100.867,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	11.332.100.867,00
		122.104.574.751,00

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Kedua,

  
**HARDINO, S.Kep.**  
 NIP. 197305201993031008

Pihak Pertama,

  
**RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**  
 NIP. 197309251993031002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOGIE KURNIAWAN, SE.M.ec.Dev.**

Jabatan : Kepala Subbagian Anggaran, Verifikasi Dan Perbendaharaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

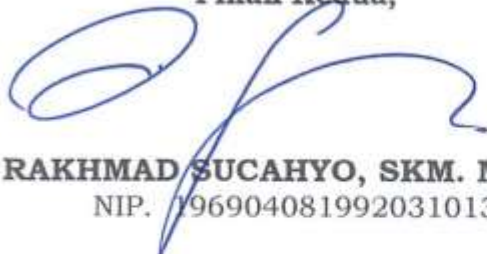
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Kedua,



**RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**  
NIP. 196904081992031013

Pihak Pertama,



**YOGIE KURNIAWAN, SE.M.ec.Dev.**  
NIP. 198611112009031002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **YOGIE KURNIAWAN, SE.M.ec.Dev.**

Jabatan : Kepala Subbagian Anggaran, Verifikasi Dan Perbendaharaan

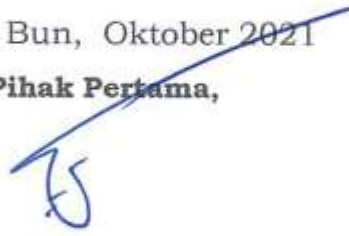
No	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya verifikasi pendapatan	Persentase surat tanda setoran yang terverifikasi	100%
2.	Terlaksananya pemberian Informasi Tentang Tagihan Pasien Rawat Inap	Kecepatan Waktu Pemberian Informasi Tentang Tagihan Pasien Rawat Inap (<2 jam)	100%
3.	Terlaksananya Ketepatan Waktu Pemberian Insentif jasa pelayanan	Ketepatan Waktu Pemberian Insentif jasa pelayanan.	100%
4.	Terlaksananya proses verifikasi belanja	Persentase Surat Perintah Membayar (SPM) yang terealisasi	100%

Pihak Kedua,

  
**RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**  
NIP. 196904081992031013

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Pertama,

  
**YOGIE KURNIAWAN, SE.M.ec.Dev.**  
NIP. 198611112009031002



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IGNATIUS DWI MANIKWARNO, SE**

Jabatan : Kepala Subbagian Akuntansi Dan Pengelolaan Aset

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Kedua,



**RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**  
NIP. 196904081992031013

Pihak Pertama,



**IGNATIUS DWI MANIKWARNO, SE**  
NIP.197212062006041014

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

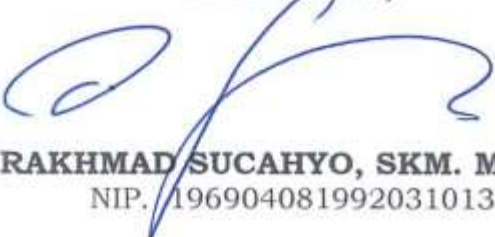
Nama : **YOGIE KURNIAWAN, SE.M.ec.Dev.**

Jabatan : Kepala Subbagian Anggaran, Verifikasi Dan Perbendaharaan

No	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan aset Rumah Sakit sesuai ketentuan	Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	100%
		Persentase dokumen laporan aset yang tersusun sesuai ketentuan	100%

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

  
**RAKHMAD SUCAHYO, SKM. M.Kes.**  
NIP. 196904081992031013

**Pihak Pertama,**

  
**IGNATIUS DWI MANIKWARNO, SE**  
NIP.197212062006041014



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARDINO, S.Kep.**

Jabatan : Wadir Umum Dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

  
**HARDINO, S.Kep.**  
NIP. 197305201993031008

**Pihak Pertama,**

  
**DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**  
NIP. 196808181988032013

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : DR. URIP SANTOSO, SH.MH.

Jabatan : Kepala Bagian Umum

No.	Sasaran Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Target 2021
1.	Terwujudnya pemenuhan kegiatan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan ketertiban.	1. Persentase dokumen perumusan kebijakan teknis yang di susun sesuai ketentuan	100%
		2. Persentase tindak Lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat manajemen	100%
		3. Persentase pengaduan / konsultasi yang terselesaikan	100%
		4. Persentase penyelesaian laporan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan Analisis Beda Kerja ( ABK )	100%
		5. Persentase penyelesaian laporan gangguan keamanan dan ketertiban	100%
		6. Presentase dokumen laporan stock opname gudang logistik	100%

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.554.958.266,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.774.310,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.794.310,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.500.000,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.480.000,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	704.999.812,00
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	704.999.812,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.804.184.144,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.804.184.144,00
1.02.02.16	Divisi Logistik dan Perbekalan	156.165.544,00
1.02.02.20	Divisi Administrasi Umum	2.122.368.600,00
1.02.02.22	Divisi Kepegawaian	270.433.008,00
1.02.02.23	Divisi Promosi	255.216.992,00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	DANA DPA-SKPD (Rp.)
		3.504.958.266,00

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**HARDINO, S.Kep.**  
NIP. 197305201993031008

**Pihak Pertama,**



**DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**  
NIP. 196808181988032013



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **SRI PURWENI.S.Kep.Ners.M.Kep**

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha, Hukum Dan Humas

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya tata kelola bagian Tata Usaha, Hukum dan Hubungan Masyarakat	Jumlah surat keterangan kesehatan yang dikelola sesuai SPO	100%
		Jumlah Rancangan dokumen regulasi yang disusun sesuai ketentuan	100%
		Jumlah pengaduan masyarakat pengguna jasa RS yang selesai ditindaklanjuti	100%

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**  
NIP. 196808181988032013

**Pihak Pertama,**



**SRI PURWENI.S.Kep.Ners.M.Kep**  
NIP. 197309292000122004



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah

Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI PURWENI.S.Kep.Ners.M.Kep**

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha, Hukum Dan Humas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**  
NIP. 196808181988032013

Pihak Pertama,

**SRI PURWENI.S.Kep.Ners.M.Kep**  
NIP. 197309292000122004



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021

Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah

Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEILA DYAH K.,S.AP**

Jabatan : Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**  
NIP. 196808181988032013

Pihak Pertama,

**MEILA DYAH K.,S.AP**  
NIP. 19840526 201001 2 016

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **MEILA DYAH K.,S.AP**

Jabatan : Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya penatalaksanaan SDM	1. Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SDM berdasarkan ABK	100%
		2. Persentase bahan evaluasi penggajian-remunerasi pegawai	100%
		3. Ketepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat	100%
		4. Ketepatan Waktu Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	100%

Pangkalan Bun, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**



**DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**  
NIP. 196808181988032013

**Pihak Pertama,**



**MEILA DYAH K.,S.AP**  
NIP. 19840526 201001 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/1591/IX/2021 Tanggal 17 September 2021  
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com) Website : [rssi.kotawaringinbaratkab.go.id](http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS JAMALUDIN, SKM, M.P.H.**

Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**  
NIP. 196808181988032013

Pihak Pertama,

**AGUS JAMALUDIN, SKM, M.P.H.**  
NIP. 197309292000122004

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN

Nama : **AGUS JAMALUDIN, SKM, M.P.H.**

Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021
1.	Terlaksananya pemenuhan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rumah tangga, meliputi ; ketertiban dan keamanan, kebersihan rumah sakit, perlengkapan, pelaksanaan dan pelayanan adminstrasi bidang rumah tangga, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang rumah tangga.	1. Persentase terlaksananya kegiatan stock ofname gudang logistik setiap bulannya dalam satu tahun	100%
		2. Persentase Penanganan laporan pengaduan kemanan dan ketertiban di lingkungan RS	100%
		3. Persentase terlayannya kegiatan rumah tangga dan perlengkapan	100%

Pihak Kedua,



**DR. URIP SANTOSO, SH.MH.**  
NIP. 196808181988032013

Pangkalan Bun, Oktober 2021

Pihak Pertama,



**AGUS JAMALUDIN, SKM, M.P.H.**  
NIP. 198305082009031003